



Laporan Kinerja

2023



Sekretariat Jenderal
Kementerian Kelautan dan Perikanan

Laporan Kinerja

2023



Sekretariat Jenderal
Kementerian Kelautan dan Perikanan

kata pengantar

Segala puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2023 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Tahun 2023 merupakan suatu bentuk akuntabilitas organisasi kepada instansi dan publik atas amanat/tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan dan berisikan tentang capaian atas target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja Tahun 2023.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta sebagai salah satu instrumen penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi dan transparansi serta pertanggungjawaban dan wujud pencapaian kinerja organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kinerja organisasi diukur atas dasar pencapaian indikator kinerja yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2023.





Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta sebagai salah satu instrumen penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi dan transparansi serta pertanggungjawaban dan wujud pencapaian kinerja organisasi

Kami menyadari penyusunan laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan masukan dan saran yang membangun dalam pencapaian target kinerja ke depan. Melalui Laporan Kinerja ini, diharapkan peran strategis seluruh jajaran Sekretariat Jenderal semakin meningkat sehingga dapat mendukung kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan secara keseluruhan dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

Jakarta, Januari 2024

Rudy Heriyanto Adi Nugroho
Sekretaris Jenderal
Kementerian Kelautan dan Perikanan



RUDY HERIYANTO ADI NUGROHO
SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN



daftar isi

	KATA PENGANTAR	4
	RINGKASAN EKSEKUTIF	16
01	PENDAHULUAN	22
	<ul style="list-style-type: none">• Latar Belakang• Kedudukan, Tugas dan Fungsi Organisasi• Sumber Daya Manusia• Potensi• Tantangan• Lingkungan Strategis• Sistematika Penyajian	

02	PERENCANAAN KINERJA	32
	<ul style="list-style-type: none">• Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2020-2024• Rencana Kerja Tahun 2023• Pemanfaatan Informasi pada Laporan Kinerja Tahun 2022 sebagai feedback Perencanaan dan Penetapan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2023• Penyesuaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023	
03	AKUNTABILITAS KINERJA	52
	<ul style="list-style-type: none">• Capaian Kinerja• Sasaran Program 1. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan KKP dan Sekretariat Jenderal• Kinerja Anggaran• Efisiensi Sumber Daya• Evaluasi Atas Capaian Kinerja Tahun 2023• Prestasi dan Kinerja Lainnya	
04	PENUTUP	144
05	LAMPIRAN	146

daftar gambar

Gambar 1.	Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal	26
Gambar 2.	Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Jenderal berdasarkan Permen PanRB Nomor 53 Tahun 2014	29
Gambar 3.	Grafik NKO Sekretariat Jenderal Tahun 2019-2023	53
Gambar 4.	Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023	57
Gambar 5.	Grafik Capaian Indeks Reformasi Birokrasi KKP Tahun 2017-2023	59
Gambar 6.	Grafik Capaian IP ASN KKP dan Per Unit Kerja Eselon I Semester I 2023	66
Gambar 7.	Grafik Capaian IP ASN KKP Tahun 2019-2023	68
Gambar 8.	Proposi penilaian Kinerja Anggaran per level	78
Gambar 9.	Bobot Per Indikator Atas Aspek Penilaian Kinerja Anggaran Per Level	79
Gambar 10.	Kategori Nilai Kinerja Anggaran	79
Gambar 11.	Realisasi NKA KKP dalam aplikasi SMART, Kementerian Keuangan	80
Gambar 12.	Realisasi NKA Unit Kerja Eselon I dalam aplikasi SMART, Kementerian Keuangan	81
Gambar 13.	Realisasi NKA KKP 2019-2023	82
Gambar 14.	Rincian Jumlah Proposal yang Disubmit Per Unit Kerja Eselon I	85
Gambar 15.	Perbandingan % Penyerapan Realisasi Anggaran Per Unit Kerja Eselon I	124
Gambar 16.	Tren % Penyerapan Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal 2019-2023	125

daftar tabel

Tabel 1.	Komposisi Pegawai Sekretariat Jenderal Berdasarkan Unit Kerja dan Jenis Kelamin	27
Tabel 2.	Rencana Kerja Sekretariat Jenderal Tahun 2023	34
Tabel 3.	Penetapan Target Indikator Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2023	37
Tabel 4.	Rincian Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2023 berdasarkan DIPA Awal	40
Tabel 5.	Detail Penyesuaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023	42
Tabel 6.	Capaian IK Sekretariat Jenderal Tahun 2023	52
Tabel 7.	Capaian IK Sekretariat Jenderal Tahun 2023	54
Tabel 8.	Rincian Capaian IK-1. Indeks Reformasi Birokrasi KKP	56
Tabel 9.	Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023	58
Tabel 10.	Sebaran Capaian Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023	58
Tabel 11.	Rincian Penyesuaian Kualifikasi dan Syarat Setiap Jenjang Jabatan	64
Tabel 12.	Penyesuaian Rincian Bobot Predikat Kinerja	65
Tabel 13.	Capaian IP ASN Per Unit Kerja Eselon I	67
Tabel 14.	Rincian Capaian dan Target IK-2	67
Tabel 15.	Capaian IP ASN Instansi Pusat Tahun 2022	68
Tabel 16.	Capaian Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi KKP Tahun 2023	73
Tabel 17.	Perbandingan Capaian Variabel Dimensi Input Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi KKP	74
Tabel 18.	Perbandingan Capaian Variabel Dimensi Proses Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi KKP	75
Tabel 19.	Rincian Capaian dan Target IK-4	80
Tabel 20.	Capaian Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi KKP Tahun 2023	85
Tabel 21.	Rincian Capaian dan Target IK-6	91
Tabel 22.	Rincian Capaian dan Target IK-7	95

Tabel 23.	Perbandingan Capaian Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Sekretariat Jenderal dibandingkan Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal dengan Unit Kerja Eselon I Lingkup KKP	95
Tabel 24.	Daftar Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang menjadi target penilaian capaian IK “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja, Lingkup Sekretariat Jenderal” Tahun 2023	98
Tabel 25.	Rekapitulasi Capaian IK “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja” Lingkup Sekretariat Jenderal Tahun 2023	100
Tabel 26.	Rekapitulasi Capaian IK “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja” Lingkup KKP Tahun 2023	101
Tabel 27.	Rincian capaian dan target Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Sekretariat Jenderal	102
Tabel 28.	Syarat untuk menjadi Unit Kerja WBK dan WBBM berdasarkan Permen PAN RB No 52 Tahun 2014	104
Tabel 29.	Rincian Capaian dan Target IK-9	105
Tabel 30.	Jumlah Unit Kerja Berpredikat WBK Tahun 2023 berdasarkan Kepmen KP 189/2023 tentang Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di Lingkungan KKP Tahun 2023	106
Tabel 31.	Rincian Capaian dan Target IK-10	109
Tabel 32.	Rincian Realisasi PNBP BLU Tahun 2023	110
Tabel 33.	Perbandingan Realisasi PNBP BLU dengan PNBP KKP Tahun 2023	119
Tabel 34.	Target dan Realisasi PNBP KKP Tahun 2023	112
Tabel 35.	Rincian Capaian dan Target IK-11	116
Tabel 36.	Rincian Realisasi Akad Penyaluran Dana Bergulir	117
Tabel 37.	Anggaran dan Realisasi Sekretariat Jenderal Per Satker Tahun 2023	120

Tabel 38.	Anggaran dan Realisasi Per Unit Kerja Eselon I berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2023	122
Tabel 39.	Anggaran dan Realisasi Sekretariat Jenderal Tahun 2019-2023	125
Tabel 40.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran Kelamin	127
Tabel 41.	Capaian Sekretariat Jenderal Tahun 2023 dan Penetapan Target 2024	128
Tabel 42.	Komposisi Pegawai Sekretariat Jenderal Berdasarkan Unit Kerja dan Jenis 47	129

Capaian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun Anggaran

2023





Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melantik Irjen Pol Prof. Dr. Rudy Heriyanto Adi Nugroho sebagai Sekretaris Jenderal berdasarkan Keputusan Presiden No.170/TPA Tahun 2023 pada 11 Desember 2023 di Gedung Mina Bahari IV Jakarta.







RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2023 berisikan tentang capaian serta kendala yang dihadapi selama Tahun 2023 dalam rangka pencapaian target yang telah ditetapkan pada Tahun 2023. Program dan Kegiatan Sekretariat Jenderal yang dilaksanakan di Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari Keputusan Sekretariat Jenderal Nomor 17 Tahun 2020 tentang Renstra Sekretariat Jenderal Tahun 2022-2024.

Sebagai perwujudan visi Sekretariat Jenderal Tahun 2020-2024 yaitu “Penggerak Utama Tata Kelola Pemerintahan yang Baik menuju Terwujudnya Visi kementerian Kelautan dan Perikanan, telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2023 terdiri dari 2 Sasaran Program dan 11 Indikator Kinerja. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Sekretariat Jenderal Tahun 2023 terpantau sebesar 102,36 lebih tinggi jika dibandingkan dengan NKO pada 2022 sebesar 83,51. Dinamika yang terjadi sepanjang Tahun 2023 menunjukkan bahwa Sekretariat Jenderal tidak hanya diam saja atas

perubahan yang terjadi baik di dalam organisasi maupun diluar organisasi, dalam rangka mencapai kinerja yang diharapkan. Pada bagian akhir dari Laporan Kinerja ini disajikan daftar penghargaan di Lingkup KKP yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal melalui layanan manajerial dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik sepanjang Tahun 2023.

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja Tahun 2023, didapatkan hasil Nilai Kinerja Sasaran Program ke-1 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Jenderal sebesar 110,15 dan Sasaran Program ke-2 yaitu PNBK Sektor KP Meningkat sebesar 94,57. Dari 11 Indikator Kinerja yang telah ditetapkan di Tahun 2023, terdapat 1 indikator kinerja yang belum tercapai yaitu Persentase Pencapaian Target PNBK BLU LPMUKP dengan target 97% dan realisasi sebesar 73,4% atau mencapai 75,67%. Sedangkan 10 indikator lainnya telah mencapai target atau bahkan melampaui target yang telah ditetapkan dengan rincian sebagai berikut: 1). Indeks Reformasi Birokrasi KKP target 78

realisasi 85,40 2). Indeks Profesionalitas ASN KPP target 81,22 realisasi 88,20, 3). Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) KKP target 87,3 realisasi 87,3, 4). Nilai Kinerja Anggaran (NKA) KKP target 86 realisasi 95,04, 5). Nilai Hasil Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup KKP target 75% realisasi 82,93%, 6). Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup KKP target 92% realisasi 112,59%, 7) Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Sekretariat Jenderal dibandingkan Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal target $\leq 0,5$ realisasi sebesar 0,01, 8). Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Sekretariat Jenderal dengan target 75%, realisasi 99,12%, 9). Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi lingkup Sekretariat Jenderal, target 2 unit realisasi 2 unit, 10). Persentase Pencapaian Target PNPB BLU LPMUKP target 97% realisasi 73,4% dan 11). Persentase Realisasi Penyaluran Dana Bergulir BLU LPMUKP target 80%, realisasi 90,77 % atau mencapai 113,46%.

Adapun langkah perbaikan yang akan dilaksanakan untuk dapat mencapai target kinerja Persentase Pencapaian Target PNPB BLU LPMUKP adalah sebagai berikut: 1). monitoring terhadap debitur yang telah dibiayai dengan tetap mengingatkan terkait dengan pembayaran jasa layanan maupun pembayaran pokok melalui SMS blast maupun melalui tenaga pendamping di daerah, 2). inventarisasi dan klasterisasi debitur untuk kemudian dilakukan penagihan berdasarkan skala prioritas dari tingkat kolektibilitasnya, terutama terhadap debitur yang memiliki nilai piutang jasa layanan yang tinggi. Terhadap debitur yang telah dilakukan proses penagihan dan tidak memiliki itikad yang baik, maka akan dilanjutkan kepada proses teguran, bahkan sampai dengan proses penyelesaian (jika dimungkinkan) dan 3). mengoptimalkan penerimaan jasa provisi akad yang telah dilaksanakan di Tahun 2023 namun belum dilakukan pencairan di 2023, maka sesuai dengan ketentuan akad harus segera dicairkan dengan jangka waktu paling lambat selama

satu tahun pasca dilakukannya akad, sehingga LPMUKP akan melakukan optimalisasi pencairan terhadap pinjaman yang telah diakadkan, serta potensi pencairan baru di Tahun 2024.

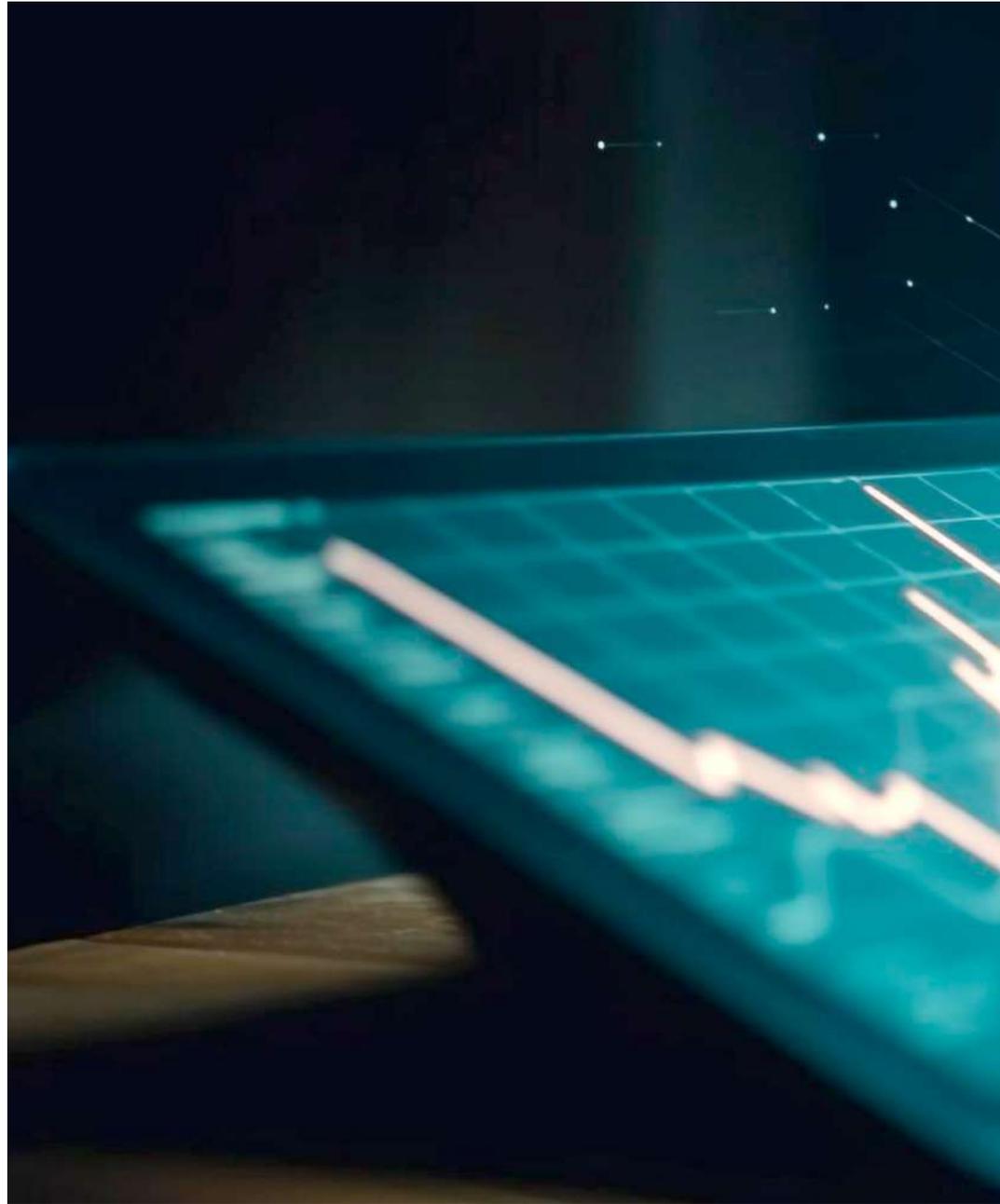
Anggaran Sekretariat Jenderal Tahun 2023 sebesar Rp656.780.605.000,00 dengan realisasi sebesar Rp631.793.931.033,00 atau mencapai 96,20%. Alokasi anggaran Sekretariat Jenderal tersebar di 2 Satker Pusat yaitu Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa dan BLU-LPMUKP, 1 satker Kantor Daerah yaitu Badan Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan 34 Provinsi satker dekonsentrasi. Porsi anggaran terbesar terdapat di Satker Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa mencapai 86,69%, BLU-LPMUKP sebesar 9,71%, BPISDKP sebesar 3,4% dan satker dekonsentrasi sebesar 1,2%. Sedangkan untuk persentase penyerapan anggaran terbesar yaitu Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa sebesar 99,21%, 34 provinsi satker dekonsentrasi 98,26%, BPISDKP sebesar 97,17% dan paling rendah yaitu BLU-LPMUKP sebesar 65,52%.

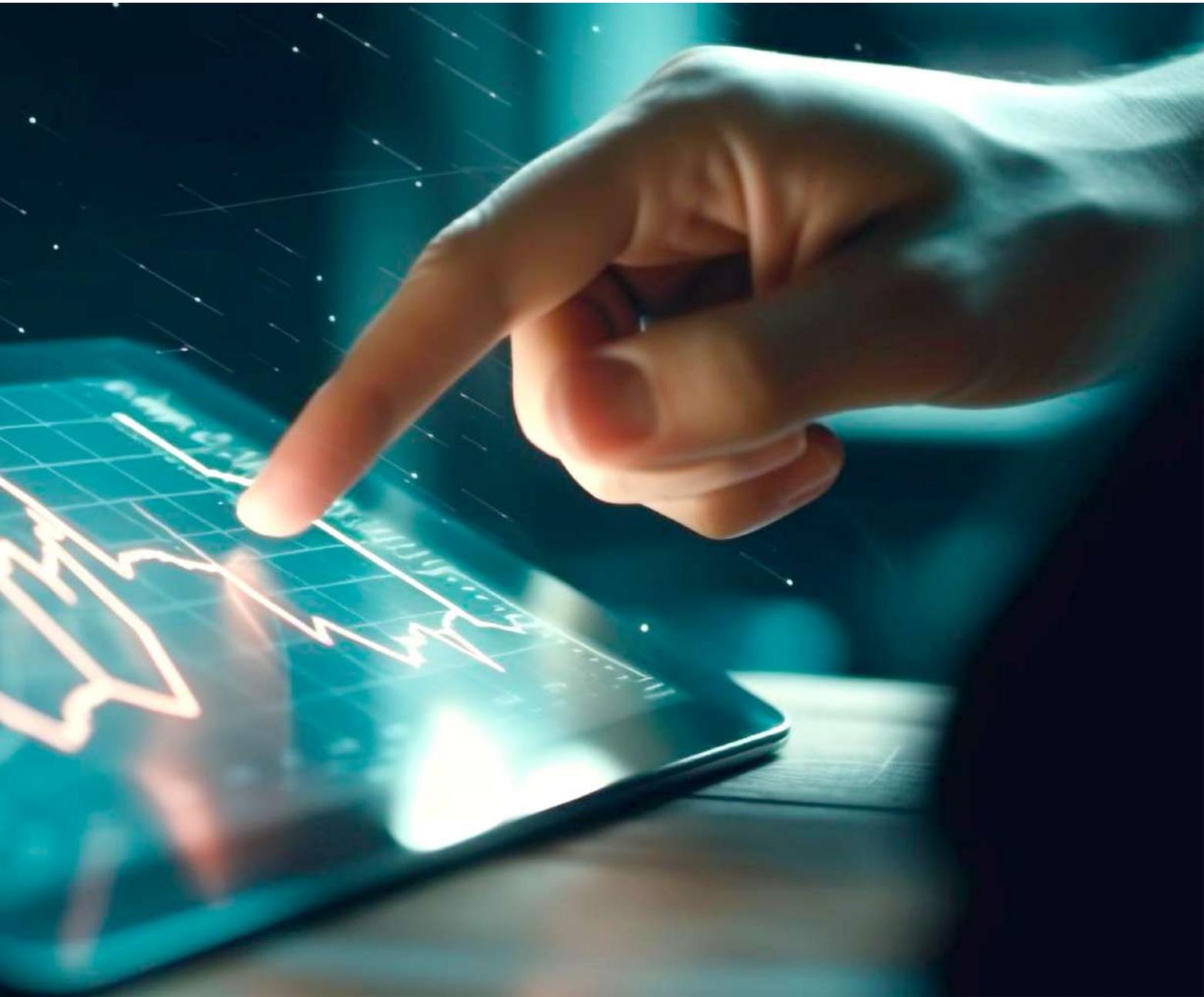
Selain itu, KKP dengan dukungan fungsi koordinasi Sekretariat Jenderal mendapatkan sederet prestasi di tingkat nasional diantaranya : kinerja anggaran KKP meraih penghargaan kinerja anggaran terbaik ke-2 Tahun 2022 untuk kategori KL dengan pagu sedang, opini WTP dari BPK-RI, Peningkatan Nilai SAKIP KKP menjadi 83,65 dari 82,84, penghargaan sarpras ramah kelompok rentan dari Kementerian PAN RB, Peringkat Kedua Kategori Implementasi Penerapan Manajemen, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KKP meraih Penghargaan Juristica Award 2023 dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Terbaik dan peringkat Terbaik V Tingkat Kementerian pada Pertemuan Nasional Dokumentasi dan Informasi Hukum *Legal Development Content Creator* (LDCC) 2023, Juara Pertama Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Award 2023, Parahita Ekapraya untuk penerapan pengarusutamaan gender dengan kategori Mentor terbaik 2023, Juara Kedua Anugrah “Reksa Bandha”



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

Tahun 2023 kategori Peningkatan Tata Kelola BMN Berkelanjutan, Akreditasi A (sangat baik) penyelenggaraan Kearsipan, dan Hasil Pengawasan Kearsipan dengan nilai 92,47 (sangat memuaskan) dari Arsip Nasional Republik Indonesia, Predikat Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Pusat, Peringkat Kedua Kategori Implementasi Penerapan Manajemen Kinerja dan peringkat Ketiga Kategori Pengembangan (BKN Award 2023), Predikat Kualitas Tertinggi atau Zona Hijau (Penilaian Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik dari Ombudsman) dan Penghargaan Bhumandala Kanaka dan Bhumandala Kencana diberikan kepada KKP atas pencapaiannya dalam pengembangan simpul jaringan informasi geospasial Tahun 2023.









01

PENDAHULUAN



LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Sekretariat Jenderal atas capaian kinerja dan penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal mengacu pada 1). Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, 2). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, 3). Peraturan Menteri PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi SAKIP Instansi Pemerintah dan 4). Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di KKP. Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal menjelaskan tentang capaian kinerja dan evaluasi

serta pengungkapan yang memadai dari hasil analisis terhadap capaian kinerja. Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal menjelaskan kinerja yang telah diperjanjikan Sekretaris Jenderal kepada Menteri Kelautan dan Perikanan dan memberikan informasi kepada publik atas kinerja yang telah dicapai dan upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi Sekretariat Jenderal untuk meningkatkan kinerjanya.

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri KP Nomor 48/PERMEN-KP/ Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja KKP, Sekretariat Jenderal adalah unit organisasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan KKP, dengan struktur organisasi sebagai berikut :

1. Biro Perencanaan
2. Biro Keuangan
3. Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi
4. Biro Hukum
5. Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa
6. Pusat Data Statistik dan Informasi

Dalam menjalankan tugasnya, **Sekretariat Jenderal** menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi kegiatan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
2. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan.
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan.
4. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana.
5. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundangundangan serta pelaksanaan advokasi hukum.
6. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah.
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Tugas dan fungsi Unit Kerja Eselon II Lingkup Sekretariat Jenderal sebagai berikut :

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pengelolaan kinerja organisasi, dan kerja sama antar lembaga di bidang kelautan dan perikanan. Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Koordinasi, penyusunan, dan sinkronisasi perencanaan kebijakan umum dan strategis serta perencanaan kawasan terpadu di bidang kelautan dan perikanan;
- b. Koordinasi, penyusunan, dan sinkronisasi rencana, program, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta analisis, formulasi, dan perencanaan

- c. pinjaman dan hibah luar negeri, dan dana transfer di bidang kelautan dan perikanan;
- c. Koordinasi, penyusunan, dan sinkronisasi perencanaan, pengukuran, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja organisasi, serta bahan pimpinan;
- d. Penyiapan koordinasi, fasilitasi, penyusunan, analisis, sinkronisasi, perumusan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kerja sama di bidang kelautan dan perikanan dengan kementerian/ lembaga, pemerintah daerah, dan lembaga nonpemerintah; dan
- e. Pelaksanaan urusan ketatausahaan biro.

Susunan organisasi Biro Perencanaan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Biro Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengelolaan keuangan, serta pengelolaan barang milik negara. Biro Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja.
- b. Koordinasi dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak.
- c. Koordinasi dan pengelolaan badan layanan umum.
- d. Koordinasi dan pelaksanaan tata laksana dan transformasi keuangan serta kepatuhan pejabat perbendaharaan.
- e. Koordinasi dan pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan, pengendalian internal dan kepatuhan atas laporan keuangan, serta penyelesaian kerugian negara.
- f. Koordinasi dan pengelolaan barang milik negara.
- g. Pelaksanaan urusan ketatausahaan biro.

Susunan organisasi Biro Keuangan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi

mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengelolaan sumber daya manusia aparatur, organisasi dan tata laksana, serta koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi. Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Koordinasi, penyusunan, dan pelaksanaan perencanaan, pengembangan, manajemen talenta, monitoring dan evaluasi pembinaan sumber daya manusia aparatur.
- b. Koordinasi, alih tugas jabatan, kepegawaian, penghargaan, disiplin, pemberhentian, dan pemensiunan pegawai.
- c. Koordinasi, penyusunan, dan pelaksanaan pengkajian, analisis, pembinaan, pengembangan, dan pengelolaan administrasi angka kredit, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan jabatan fungsional.
- d. Koordinasi dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penilaian prestasi kerja pegawai.
- e. Koordinasi, penyusunan, dan pelaksanaan pengelolaan sistem, data, informasi, dan arsip kepegawaian.
- f. Koordinasi dan fasilitasi, analisis, penataan, dan evaluasi organisasi, dan tata laksana.
- g. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi.
- h. Pelaksanaan urusan ketatausahaan biro.

Susunan organisasi Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, rancangan perjanjian, hukum internasional bidang kelautan dan perikanan, advokasi, dokumentasi, dan informasi hukum. Biro Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi dan fasilitasi perencanaan, penelaahan, penyusunan, pembahasan, dan harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan.

- b. Instrumen hukum, serta monitoring, evaluasi, dan bimbingan teknis peraturan perundang-undangan di bidang kesekretariatan, pengawasan internal, perikanan tangkap, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, serta riset dan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.
- c. Koordinasi dan fasilitasi perencanaan, penelaahan, penyusunan, pembahasan, dan harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum, serta monitoring, evaluasi, dan bimbingan teknis peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan ruang laut, perikanan budidaya, penguatan data saing produk kelautan dan perikanan, serta karantina ikan dan pengendalian mutu.
- d. Koordinasi dan fasilitasi konsultansi hukum, pendapat hukum, pendampingan, penyelesaian perkara hukum, dan diseminasi hukum.
- e. Koordinasi dan fasilitasi perencanaan, penelaahan, penyusunan, dan pembahasan rancangan perjanjian dan hukum internasional di bidang kelautan dan perikanan.
- f. Pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.
- g. Pelaksanaan urusan ketatausahaan biro.

Susunan organisasi Biro Hukum terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri

mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan, analisis, dan pengembangan program hubungan masyarakat, serta kerja sama internasional di bidang kelautan dan perikanan. Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan hubungan masyarakat di bidang kelautan dan perikanan.
- b. Koordinasi, fasilitasi, penyusunan, analisis, penyerasian, perumusan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan.

- c. Koordinasi, fasilitasi, penyusunan, analisis, penyerasian, perumusan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kerja sama regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan.
- d. Pelaksanaan urusan ketatausahaan biro.

Susunan organisasi Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, dan pelaksanaan urusan rumah tangga, tata usaha pimpinan, keprotokolan, persuratan, dan kearsipan, serta pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa. Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan, dan bimbingan teknis urusan rumah tangga kantor pusat, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor pusat, dan urusan angkutan pegawai, serta keamanan kantor pusat.
- b. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Menteri, Sekretaris Jenderal, dan Staf Ahli, serta persandian.
- c. Koordinasi dan pelaksanaan keprotokolan bagi Menteri, Sekretaris Jenderal, dan Staf Ahli.
- d. Koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan, dan bimbingan teknis pengelolaan persuratan dan kearsipan.
- e. Koordinasi dan pengelolaan perlengkapan serta layanan perkantoran;
- f. koordinasi dan pengelolaan layanan dan dukungan layanan pengadaan barang/jasa, serta bimbingan teknis pengadaan barang/jasa.
- g. Pelaksanaan urusan ketatausahaan biro.

Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:

- a. Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
- b. Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat Jenderal juga memiliki Pusat Data, Statistik, dan Informasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri namun secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal. Pusat Data, Statistik, dan Informasi dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pusat Data, Statistik, dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan penyediaan data dan statistik, pengembangan aplikasi sistem informasi, dan infrastruktur teknologi informasi, serta layanan perizinan terpadu Kementerian di bidang kelautan dan perikanan.

Pusat Data, Statistik, dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan koordinasi penyusunan, perencanaan, standarisasi, pengolahan, analisis, dan bimbingan teknis data dan statistik kelautan dan perikanan.
- b. Penyiapan koordinasi penyusunan, perencanaan, standarisasi, perancangan, pengembangan, bimbingan teknis, integrasi, dan pemeliharaan aplikasi sistem informasi.
- c. Penyiapan koordinasi penyusunan, perencanaan, perancangan, pengembangan, standarisasi, bimbingan teknis, integrasi, dan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi.
- d. Pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Statistisi.
- e. Penyiapan koordinasi perencanaan, pengembangan, monitoring, dan evaluasi layanan perizinan terpadu Kementerian di bidang kelautan dan perikanan.
- f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan. Susunan organisasi Pusat Data, Statistik, dan Informasi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan

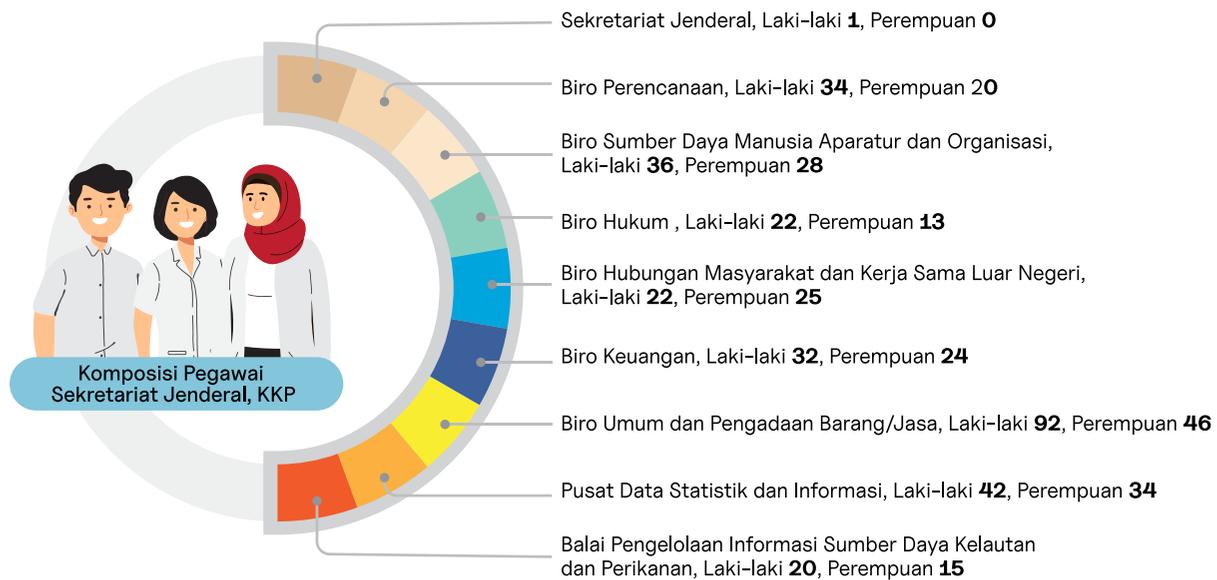


Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal
(Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/ Tahun 2020 tentang
Organisasi dan Tata Kerja KKP)

Tabel 1. Komposisi Pegawai Sekretariat Jenderal Berdasarkan Unit Kerja dan Jenis Kelamin

No	UNIT KERJA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Sekretariat Jenderal	3	-	3
2	Biro Perencanaan	34	20	54
3	Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi	36	28	64
4	Biro Hukum	22	13	35
5	Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri	22	25	47
6	Biro Keuangan	32	24	56
7	Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa	92	46	138
8	Pusat Data Statistik dan Informasi	42	34	76
9	Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	20	15	35
	Jumlah	313	213	526

Sumber: epegawaikkp.go.id



POTENSI

Reformasi Birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan prasyarat penting dalam pencapaian sasaran pembangunan nasional. Untuk itu perlu dilakukan pemetaan potensi yang dimiliki oleh Sekretariat Jenderal, untuk memanfaatkan secara efektif dan efisien dari peluang dan kesempatan yang ada. Potensi yang dimiliki oleh Sekretariat Jenderal antara lain:

1. Komitmen kuat dari pimpinan dan seluruh aparatur Sekretariat Jenderal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Sumber Daya Manusia baik struktural maupun fungsional yang handal dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal.
3. Sarana dan prasarana aparatur dalam pelaksanaan kegiatan perkantoran yang memadai.
4. Peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum yang kuat dalam pelaksanaan kegiatan di KKP.
5. Sistem kerja berbasis elektronik dan teknologi informasi yang dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas kerja.
6. Kualitas Laporan Keuangan yang handal dengan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian.
7. Perencanaan program, anggaran, dan pengelolaan kinerja yang baik dan berkualitas.
8. Pelaksanaan RB dalam peningkatan Birokrasi yang efektif, bersih, efisien, dan akuntabel.
9. Informasi publik yang transparan dan kehumasan yang komunikatif dan adaptif.

TANTANGAN

Untuk mengoptimalkan kinerja Sekretariat Jenderal masih terdapat tantangan yang dihadapi antara lain sebagai berikut:

1. Belum seluruh pegawai mendapatkan luasan ruang kerja yang ideal karena keterbatasan pemilikan gedung perkantoran.

2. Masih diperlukan penataan organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal yang disesuaikan dengan analisis beban kerja dan kebutuhan organisasi yang bersifat dinamis.
3. Pelaksanaan pemerintahan berbasis digital masih perlu penguatan sarana dan prasarana SDM untuk mencapai indeks SPBE.
4. Ketersediaan sumber daya manusia, wilayah kerja yang luas, dan penyediaan sistem aplikasi yang handal dalam pengumpulan dan pengolahan data statistik kelautan dan perikanan.

LINGKUNGAN STRATEGIS

Sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PAN RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 dan Keputusan Menteri KP Nomor 166 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri KP Nomor 32 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi KKP Tahun 2020-2024, Sekretariat Jenderal akan menjadi penggerak utama dalam mengimplementasikan amanat kepada setiap K/L untuk melakukan pelaksanaan RB di Lingkungan KKP.

SISTEMATIKA PENYAJIAN

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja disusun dengan sistematika sebagaimana berikut:

Bab I. Pendahuluan

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi, penjabaran mandat dan peran strategis Sekretariat Jenderal sebagaimana tertuang dalam Renstra dan Renja KKP Tahun 2023 serta pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2023.

Bab II Perencanaan Kinerja

Bab ini menguraikan penjelasan mengenai Rencana Strategis, dukungan pada Prioritas Nasional, Rencana Kerja dan Anggaran Sekretariat Jenderal Tahun 2023. Selain itu, juga diuraikan pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi dan Penyesuaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menyajikan informasi terkait pencapaian dan analisis indikator kinerja sesuai Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2023, serta upaya peningkatan kinerja. Selain itu juga diuraikan efisiensi penggunaan sumber daya yang meliputi efisiensi anggaran dan pemanfaatan teknologi informasi.

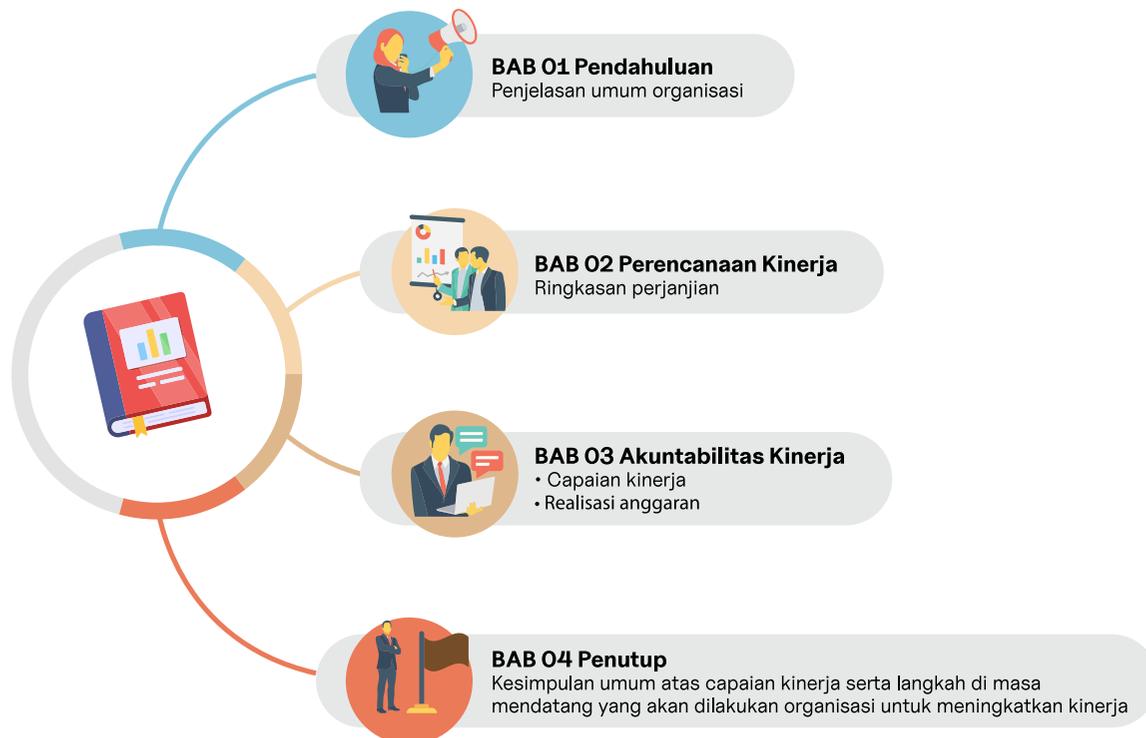
Kinerja Lainnya

Pada subbab ini menguraikan prestasi KKP yang didukung oleh kinerja Sekretariat Jenderal dalam upaya peningkatan layanan publik.

Bab III. Penutup

Bab ini menyajikan informasi dan simpulan umum terkait dengan kinerja Tahun 2023.

Lampiran



Gambar 2. Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Jenderal berdasarkan Permen PanRB Nomor 53 Tahun 2014





02

PERENCANAAN KINERJA



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

PERENCANAAN KINERJA

RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2020-2024

Sekretariat Jenderal sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan KKP diarahkan untuk mendukung dan mengoptimalkan segenap potensi yang ada untuk mewujudkan visi pembangunan kelautan dan perikanan Tahun 2022-2024 yang telah ditetapkan. Visi dan misi KKP Tahun 2020-2024 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden yaitu: “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”. Dalam rangka mewujudkan visi KKP tersebut, Sekretariat Jenderal menetapkan visi “Penggerak Utama Tata Kelola Pemerintahan yang Baik menuju Terwujudnya Visi KKP” sebagaimana tertuang dalam

Keputusan Sekjen Nomor 17/2020 tentang Renstra Sekretariat Jenderal Tahun 2020-2024. Untuk mewujudkan visi Sekretariat Jenderal, maka misi yang ditetapkan adalah: 1). Peningkatan profesionalisme dalam pelayanan dukungan manajemen dan 2). Penguatan budaya organisasi di lingkungan KKP.

Dalam menjabarkan dan mewujudkan misi Sekretariat Jenderal KKP, tujuan dan indikator kinerja yang hendak dicapai yaitu: 1). meningkatnya efektivitas koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan KKP dan 2). meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi di lingkungan KKP.

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas dilaksanakan melalui Sasaran Program “Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan KKP dan Sekretariat Jenderal” dengan indikator kinerja: 1). Nilai PMPRB Sekretariat Jenderal (nilai), 2). Nilai SAKIP KKP, 3). Nilai PM SAKIP Sekretariat Jenderal, 4). Nilai SPBE KKP, 5). Opini BPK atas

LK KKP, 6). Batas tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK atas LK Sekretariat Jenderal dibandingkan Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal TA 2021, 7). Level Maturitas SPIP Sekretariat Jenderal, 8). Indeks Kematangan UKPBJ KKP, 8). Nilai Pengawasan Kearsipan Lingkup KKP, 9). Indeks Sistem Merit KKP, 10). Indeks Profesionalitas (IP) ASN Lingkup Sekretariat Jenderal, 11). Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Sekretariat Jenderal, 12). Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) KKP, 13). Unit yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik, 13). Unit Kerja Sekretariat Jenderal yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar, 15). Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Sekretariat Jenderal, 16). Indeks Perencanaan KKP, 17). Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Sekretariat Jenderal, 18). Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Jenderal.

Selanjutnya Sasaran Program kedua adalah “PNBP BLU Sektor KP Meningkatkan” dengan indikator Persentase Pencapaian Target PNBP Badan Layanan Umum dan realisasi penyaluran dana bergulir BLU-LPMUKP.

Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Jenderal adalah sebagai berikut:

1. Layanan dukungan manajemen internal KKP melalui: a. manajemen perubahan dalam budaya organisasi; b. peningkatan kualitas pelayanan publik dan keterbukaan informasi publik; c. fasilitasi dan koordinasi penyusunan peraturan perundangan dan penyederhanaan peraturan; d. organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran; e. penataan tata laksana pelaksanaan tugas berbasis elektronik melalui penerapan SPBE; f. ASN KKP yang profesional, berintegritas, dan berdaya saing tinggi melalui penerapan merit sistem; g. pelayanan umum internal KKP; dan h. layanan barang dan jasa KKP.
2. Akuntabilitas kinerja organisasi melalui: a. peningkatan kualitas perencanaan program dan anggaran berbasis kinerja; b. peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara dan pengelolaan Barang

Milik Negara (BMN); c. penyediaan data statistik dan sistem informasi yang handal; d. manajemen pengetahuan yang handal dan mudah diakses; e. peningkatan kerja sama internasional; f. kerja sama antarlembaga dan lintas sektor; g. penguatan perencanaan dan pelaksanaan PUG di sektor kelautan dan perikanan dengan target program kegiatan KKP telah responsif gender; dan h. peningkatan strategi transformasi digital KKP, yang terdiri dari pelaksanaan satu data dalam rangka pemanfaatan data yang saling interoperabilitas, terstandar, serta dapat dibagi pakaikan, memanfaatkan analisis dari big data, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia teknologi, informasi, dan komunikasi, dan literasi digital masyarakat kelautan dan perikanan.

3. Fasilitasi percepatan penyaluran dana kelolaan BLU LPMUKP melalui: a. pengelolaan dana bergulir dan pendampingan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sektor kelautan dan perikanan; dan b. peningkatan kualitas layanan penyaluran dana bergulir melalui modernisasi BLU.



**ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
SEKRETARIAT JENDERAL
ADALAH LAYANAN DUKUNGAN
MANAJEMEN INTERNAL KKP,
AKUNTABILITAS KINERJA
ORGANISASI, FASILITASI
PERCEPATAN PENYALURAN
DANA KELOLAAN BLU LPMUKP**

RENCANA KERJA TAHUN 2023

Program kerja yang dilaksanakan yaitu “Program Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kelautan dan Perikanan” dengan tujuan peningkatan pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan kelautan dan perikanan dengan sasaran meningkatnya kesesuaian pelaksanaan dukungan manajerial.

Sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri KP Nomor 85 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja KKP Tahun 2023, Sekretariat Jenderal melaksanakan 6 Kegiatan untuk mendukung pencapaian kinerja yaitu 1). Legislasi, Ligitasi dan Kerjasama, 2). Pengelolaan Organisasi dan SDM, 3). Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan BMN, 4). Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik dan Umum, 5). Pengelolaan Data dan Informasi, dan 6) Pengelolaan Modal Usaha KP dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. Rencana Kerja Sekretariat Jenderal Tahun 2023

ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN (RPO00)
01-Sekretariat Jenderal			678.157.401
WA-Program Dukungan Manajemen			678.157.401
2322-Legislasi, Litigasi dan Kerjasama			20.405.885
AEC-Kerja sama			3.687.239
002-Kesepakatan Kerja Sama Antar Lembaga		Kesepakatan	3.687.239
EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal			10.218.646
957-Layanan Hukum	4	Layanan	7.910.670
969-Layanan Bantuan Hukum	1	Layanan	2.307.976
PEC-Kerja sama			6.500.000
001-Kerjasama Internasional bidang Kelautan dan Perikanan		Dokumen	6.500.000
2323-Pengelolaan Organisasi dan SDM			14.783.782
EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal			1.500.000
960-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	3	Layanan	1.500.000
EBC-Layanan Manajemen SDM Internal			13.283.782
954-Layanan Manajemen SDM	12	Layanan	13.283.782
2325-Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan BMN			48.478.381
EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal			2.814.610

ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN (RPO00)
956-Layanan BMN	4	Layanan	2.814.610
EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal			45.663.771
952-Layanan Perencanaan dan Penganggaran	41	Dokumen	27.536.094
953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi	6	Dokumen	9.014.126
955-Layanan Manajemen Keuangan	41	Dokumen	9.113.551
2328-Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik dan Umum			402.675.388
CAN-Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi			6.388.000
001-Alat Pengolah Data dan Komunikasi Lingkup Sekretariat Jenderal	199	Unit	6.388.000
EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal			362.595.527
958-Layanan Hubungan Masyarakat	6	Layanan	17.853.765
959-Layanan Protokoler	2	Layanan	29.947.399
962-Layanan Umum	16	Layanan	51.893.648
994-Layanan Perkantoran	2	Layanan	262.900.715
EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal			33.691.861
951-Layanan Sarana Internal	4	Unit	19.291.861
971-Layanan Prasarana Internal	1	Unit	14.400.000
2329-Pengelolaan Data dan Informasi			134.638.969
BMA-Data dan Informasi Publik			9.565.641
001-Layanan Data Statistik Kelautan dan Perikanan	39	Layanan	9.565.641
EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal			4.261.163
960-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	Layanan	4.261.163
FAB-Sistem Informasi Pemerintahan			6.790.101
001-Aplikasi Sistem Informasi Kelautan dan Perikanan	3	Layanan	3.000.000
002-Infrastruktur Teknologi Informasi Kelautan dan Perikanan	3	Layanan	3.790.101

ESELON I/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN (RP000)
RAN-Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi			108.722.064
001-Sistem Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Terintegrasi yang Operasional	1	Unit	87751.834
002-Sarana Data Citra Satelit Radar	1	Unit	20.970.230
RCL-OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi			5.300.000
001-OM Sarana Data Citra Satelit Radar	1	Unit	5.300.000
6453-Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan			57.174.996
BDG-Fasilitas dan Pembinaan UMKM			10.984.600
001-UMKM yang Dilayani Permodalan BLU	5.964	UMKM	10.984.600
BIF-Pengawasan dan Pengendalian Layanan			3.557.726
001-Layanan Pengelolaan Risiko Modal Usaha	1	Layanan	3.557.726
EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal			39.355.905
962-Layanan Umum	1	Layanan	38.855.655
994-Layanan Perkantoran	1	Layanan	500.250
EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal			200.000
951-Layanan Sarana Internal	10	Unit	200.000
FAE-Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan			3.076.765
001-Laporan Pengelolaan Keuangan	1	Laporan	954.700
002-Laporan Pengawasan Internal Pengelolaan Modal Modal Usaha	1	Laporan	576.100
003-Laporan Monitoring dan Evaluasi Program Pengelolaan Dana Bergulir	1	Laporan	1.545.965

Sumber: Aplikasi Krisna (Desember 2023)

PEMANFAATAN INFORMASI PADA LAPORAN KINERJA TAHUN 2022 SEBAGAI FEEDBACK PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2023

Penentuan target indikator kinerja didasarkan pada hasil evaluasi capaian kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2022 sebagai bagian dari pemanfaatan informasi kinerja dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3. Penetapan Target Indikator Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2023

VOLUME	SATUAN	POLARISASI	PERHITUNGAN	TARGET 2022	CAPAIAN 2022	% CAPAIAN	SASARAN/ INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	KETERANGAN
Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan KKP dan Sekretariat Jenderal					107,08	Tata Kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Jenderal			
Nilai PMPRB Sekretariat Jenderal	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	33	33,52	101,58%	Nilai PMPRB Sekretariat Jenderal	33,5	Target disusun berdasarkan capaian kinerja Tahun 2022
Nilai SAKIP KKP	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	82	82,48	100,59%	Nilai SAKIP KKP	82	Target 2023 mempertimbangkan penerapan Lembar Kerja Evaluasi dari Permen PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sehingga target tidak mengalami perubahan.
Nilai PM SAKIP Sekretariat Jenderal	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80,01	80,03	100,02%	Nilai PM SAKIP Sekretariat Jenderal	80,5	Target disusun berdasarkan capaian kinerja Tahun 2022
Nilai SPBE KKP	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	2,95	3,3	111,86%	Nilai SPBE KKP	3	Target disusun berdasarkan usulan Pusdatin selaku Koordinator SPBE di KKP, dimana terdapat perubahan instrumen penilaian yang semula 3 menjadi 4 instrumen dengan penambahan Domain Manajemen. Jumlah indikator penilaian pun menjadi bertambah dari 37 menjadi 47.



VOLUME	SATUAN	POLARISASI	PERHITUNGAN	TARGET 2022	CAPAIAN 2022	% CAPAIAN	SASARAN/ INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	KETERANGAN
Opini BPK atas LK KKP	Opini	Maximize	Nilai Posisi Akhir	5	5	100,00%	Opini BPK atas Laporan Keuangan KKP	5	Target disusun berdasarkan capaian kinerja Tahun 2022
Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Sekretariat Jenderal dibandingkan Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal TA. 2021	Persen	Minimize	Nilai Posisi Akhir	<1	-	120%	Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Sekretariat Jenderal dibandingkan Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal TA 2022	<0,5	Target disusun berdasarkan capaian kinerja Tahun 2022.
Level Maturitas SPIP KKP	Level	Maximize	Nilai Posisi Akhir	3	3	100,00%	Level Maturitas SPIP KKP	3	Target disusun berdasarkan capaian kinerja Tahun 2022 dan mengacu pada Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas SPIP
Indeks Kematangan UKPBJ KKP	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	9	9	100,00%		-	Indikator dihilangkan karena telah mendapatkan nilai maksimal dari yang ditetapkan secara nasional
Nilai Pengawasan Kearsipan	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	90	89,36	99,29%	Nilai Pengawasan Kearsipan KKP	90	Target disusun berdasarkan capaian kinerja Tahun 2022.
Indeks Sistem Merit KKP	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	0,8	0,95	118,75%	Indeks Sistem Merit KKP	0,85	Target disusun berdasarkan target pada Renstra Sekretariat Jenderal
Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Sekretariat Jenderal	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	78	82,46	105,72%	Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Sekretariat Jenderal	80	Target disusun berdasarkan capaian kinerja Tahun 2022 dan mempertimbangkan integrasi sistem aplikasi IP ASN KKP dengan Badan Kepegawaian Negara
Unit Kerja Berpredikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	Unit	Maximize	Nilai Posisi Akhir	2	2	100,00%	Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi	3	Target disusun berdasarkan capaian kinerja Tahun 2022

VOLUME	SATUAN	POLARISASI	PERHITUNGAN	TARGET 2022	CAPAIAN 2022	% CAPAIAN	SASARAN/ INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	KETERANGAN
Rasio Jumlah Pemberitaan Negatif terhadap Total Pemberitaan tentang Sektor Kelautan dan Perikanan	Persen	Minimize	Nilai Posisi Akhir	<13	0,74	5,69%	Rasio Jumlah Pemberitaan Negatif terhadap Total Pemberitaan tentang Sektor Kelautan dan Perikanan	<5	Target disusun berdasarkan capaian kinerja Tahun 2022
Unit yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik	Unit	Maximize	Nilai Posisi Akhir	1	2	200,00%	Nilai Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Sekretariat Jenderal	75	Target disusun berdasarkan capaian kinerja Tahun 2022
Unit Kerja Sekretariat Jenderal yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar	Persen	Maximize	Rata-rata	88	98,85	112,33%	Persentase Unit Kerja Sekretariat Jenderal yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar	92	Target disusun berdasarkan capaian kinerja Tahun 2022 dan mempertimbangkan perubahan manual perhitungan dengan menghilangkan komponen keikutsertaan dan menambah bobot komponen keaktifan menjadi 80%.
Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Sekretariat Jenderal	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	70	97,86	139,80%	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Sekretariat Jenderal	75	Target ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan dengan Penanggung Jawab IK dilevel KKP (Inspektorat Jenderal) dan Unit Kerja Eselon I
Indeks Perencanaan	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80	82,35	102,94%	Indeks Perencanaan KKP	83	Target disusun berdasarkan capaian kinerja Tahun 2022
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	89	93,38	104,92%	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Sekretariat Jenderal	89	Target 2023 ditetapkan berdasarkan capaian kinerja Tahun 2022 dan mempertimbangkan adanya reformulasi perhitungan nilai IKPA
Nilai Kinerja Anggaran	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	86	87,73	102,01%	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Jenderal	86	Target disusun berdasarkan capaian kinerja Tahun 2022

VOLUME	SATUAN	POLARISASI	PERHITUNGAN	TARGET 2022	CAPAIAN 2022	% CAPAIAN	SASARAN/ INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	KETERANGAN
							Indeks Reformasi Hukum KKP	79	Usulan indikator baru dari Biro Hukum di Tahun 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah)
PNBP BLU Sektor KP Meningkat				59,93		PNBP BLU Sektor KP Meningkat			
Persentase pencapaian target PNPB Badan Layanan Umum	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	97	89,33	92,09%	Persentase Pencapaian Target PNPB BLU LPMUKP	97	Target disusun berdasarkan perjanjian kinerja antara BLU LPMUKP dengan Kementerian Keuangan
Persentase penyaluran dana bergulir BLU LPUMKP	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80	22,2	27,75%	Persentase Penyaluran Dana Bergulir BLU LPUMKP	80	Target disusun berdasarkan perjanjian kinerja antara BLU LPMUKP dengan Kementerian Keuangan

Dalam mencapai indikator kinerja yang telah ditetapkan, Sekretariat Jenderal Tahun 2023 mengelola anggaran sebesar Rp.678.157.401.000,00 sesuai dengan DIPA Sekretariat Jenderal yang ditetapkan pada 30 November 2022.

Tabel 4. Rincian Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2023 berdasarkan DIPA Awal

SUMBER DANA	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	JUMLAH
Rupiah Murni	87.366.530	402.042.492	131.573.383	620.982.405
BLU		56.974.996	200.000	57.174.996
Jumlah	87.366.530	459.017.488	131.773.383	678.157.401.000

Sumber: DIPA Sekretariat Jenderal Tahun 2023



PENYESUAIAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Proses penyesuaian Perjanjian Kinerja merupakan proses keberlanjutan dari reviu atas Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan ditetapkan sebelumnya. Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani digunakan sebagai komitmen organisasi yang akan dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala. Sasaran Program dan indikator kinerja di dalam Perjanjian Kinerja dilakukan penajaman dan dilakukan perbaikan substansi dan peningkatan target (apabila diperlukan), termasuk penyelarasan pada level Unit Kerja Eselon II dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan eksternal dan internal yang dinamis. Perubahan tersebut memerlukan adaptasi dan agilitas organisasi.

Beberapa proses dan pembahasan penyesuaian Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2023 sebagai berikut :

- a. Penetapan Indikator Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2023 melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 37 Tahun 2023 tanggal 13 Februari 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Sekretariat Jenderal Tahun 2023.
- b. Terbitnya Keputusan Menteri KP Nomor 166 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri KP Nomor 32 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi KKP Tahun 2020-2024, mengakibatkan perubahan indikator kinerja melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 134 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 37 tanggal 13 Februari 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Sekretariat Jenderal Tahun 2023.
- c. Dialog Kinerja Organisasi Sekretariat Jenderal pada 17 November 2023 yang merubah manual indikator kinerja pada indikator Persentase Penyaluran Dana Bergulir BLU LPUMKP (Gambar 3).

Penyesuaian Perjanjian Kinerja 2023 tersebut dengan rincian sebagaimana Tabel 5.

Tabel 5. Detail Penyesuaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		PENGESAHAN 9 JANUARI 2023	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM		PENGESAHAN JUNI 2023
1.	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Sekretariat Jenderal	1	Nilai PMPRB Sekretariat Jenderal	33,5	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Sekretariat Jenderal	1	Nilai PMPRB Sekretariat Jenderal	33,5
		2	Nilai SAKIP KKP (nilai)	82		2	Nilai SAKIP KKP	82
		3	Nilai PM SAKIP Sekretariat Jenderal (nilai)	80,5		3	Nilai PM SAKIP Sekretariat Jenderal (nilai)	80,5
		4	Nilai SPBE KKP (nilai)	3		4	Nilai SPBE KKP (nilai)	3
		5	Opini BPK atas LK KKP (opini)	WTP (5)		5	Opini BPK atas LK KKP (opini)	WTP (5)
		6	Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Sekretariat Jenderal dibandingkan Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal TA. 2021 (persen)	≤0,5		6	Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Sekretariat Jenderal dibandingkan Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal TA. 2021 (persen)	≤0,5
		7	Level Maturitas SPIP KKP (level)	3		7	Level Maturitas SPIP KKP (level)	3
		8	Nilai Pengawasan Kearsipan (nilai)	90		8	Nilai Pengawasan Kearsipan (nilai)	90
		9	Indeks Sistem Merit KKP (indeks)	0,85		9	Indeks Sistem Merit KKP (indeks)	0,85
		10	Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Jenderal (indeks)	80		10	Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Jenderal (indeks)	80

	PENJELASAN PERUBAHAN (PENGESAHAN JUN 2023)	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (REV. JUN)	PENGESAHAN NOVEMBER 2023	PENJELASAN PERUBAHAN		
	Tetap	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Sekretariat Jenderal	1	Indeks Reformasi Birokrasi KKP (nilai)	78	Penyesuaian dikarenakan perubahan <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi KKP Tahun 2020-2024 sehingga merubah <i>cascading</i> IK yang merupakan indikator pembentuk RB General dan telah ditetapkan koordinator/Penangggung Jawab indikator tersebut yaitu level II lingkup Sekret.	
	Tetap						
	Tetap						
	Tetap						
	Tetap						
	Tetap						
	Tetap			2	Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Sekretariat Jenderal dibandingkan Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal TA. 2021 (persen)	≤0,5	Tetap
	Tetap						Penyesuaian dikarenakan perubahan <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi KKP Tahun 2020-2024 sehingga merubah <i>cascading</i> IK yang merupakan indikator pembentuk RB General dan telah ditetapkan koordinator/Penangggung Jawab indikator tersebut yaitu level II lingkup Sekretariat Jenderal dan Itjen.
	Tetap						
	Tetap						
	Tetap		3	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup KKP (indeks)	81,22	Penyesuaian dikarenakan perubahan <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi KKP Tahun 2020-2024 sehingga merubah <i>cascading</i> IK yang merupakan indikator pembentuk RB General dan telah ditetapkan koordinator/Penangggung Jawab indikator tersebut yaitu level II lingkup Sekretariat Jenderal dan Itjen.	



SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		PENGESAHAN 9 JANUARI 2023	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM		PENGESAHAN JUNI 2023	
		11	Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (unit)	3		11	Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (unit)	3	
		12	Nilai Hasil Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik (nilai)	75		12	Nilai Hasil Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik (nilai)	75	
		13	Rasio Jumlah Pemberitaan Negatif terhadap total pemberitaan tentang sektor kelautan dan perikanan (persen)	<5		13	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) KKP (Indeks)	88	
		14	Persentase Unit kerja Sekretariat Jenderal yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)	92		14	Persentase Unit kerja Sekretariat Jenderal yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)	92	

	PENJELASAN PERUBAHAN (PENGESAHAN JUN 2023)	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (REV. JUN)	PENGESAHAN NOVEMBER 2023	PENJELASAN PERUBAHAN
	Tetap		4 Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (unit)	2	Perubahan satu unit menjadi unit yang dibangun berpredikat menuju WBK, dikarenakan penilaian berubah dari Tim Penilai Internal KKP menjadi Tim Penilai Mandiri di Sekretariat Jenderal.
	Tetap		5 Nilai Hasil Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik (nilai)	75	
	Indikator Kinerja Utama diubah menjadi indikator yang lebih bersifat outcome, yaitu Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP). Pertimbangan utama perubahan IK tersebut karena Indeks PIKP merupakan parameter yang lebih komprehensif untuk menilai kinerja dan tata kelola komunikasi publik yang dilakukan oleh KL.		6 Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) KKP	87,3	Perubahan penghitungan menggunakan penilaian oleh Kementerian Kominfo, yang sebelumnya berupa penilaian mandiri.
			7 Persentase Unit kerja KKP yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)	92	Penyesuaian dikarenakan perubahan <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi KKP Tahun 2020-2024 sehingga merubah cascading IK yang merupakan indikator pembentuk Penanggung Jawab General dan telah ditetapkan koordinator/PJ indikator tersebut yaitu level II lingkup Sekretariat Jenderal dan Itjen.



SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		PENGESAHAN 9 JANUARI 2023	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM		PENGE- SAHAN JUNI 2023	
		15	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Sekretariat Jenderal (persen)	75		15	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Sekretariat Jenderal (persen)	75	
		16	Indeks Perencanaan KKP (indeks)	85		16	Indeks Perencanaan KKP (indeks)	85	
		17	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Sekretariat Jenderal (nilai)	89		17	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Sekretariat Jenderal (nilai)	89	
		18	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Sekretariat Jenderal (nilai)	86		18	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Sekretariat Jenderal (nilai)	86	
		19	Indeks Reformasi Hukum KKP (indeks)	79		19	Indeks Reformasi Hukum KKP (indeks)	79	
2	PNBP BLU Sektor KP Meningkatkan	20	Persentase Pencapaian Target PNPB Badan Layanan Umum (persen)	97		20	Persentase Pencapaian Target PNPB Badan Layanan Umum (persen)	97	
			Persentase penyaluran dana bergulir BLU LPUMKP (persen)	80		21	Persentase penyaluran dana bergulir BLU LPUMKP (persen)	80	

	PENJELASAN PERUBAHAN (PENGESAHAN JUN 2023)	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (REV. JUN)	PENGESAHAN NOVEMBER 2023	PENJELASAN PERUBAHAN
	Tetap		8 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Sekretariat Jenderal (persen)	75	Tetap
	Tetap				Penyesuaian dikarenakan perubahan <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi KKP Tahun 2020-2024 sehingga merubah cascading IK yang merupakan indikator pembentuk RB General dan telah ditetapkan koordinator/PJ indikator tersebut yaitu level II lingkup Sekretariat Jenderal dan Itjen.
	Tetap				
	Tetap		9 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) KKP (nilai)	86	
	Tetap				
	Tetap		10 Persentase Pencapaian Target PNBPN Badan Layanan Umum (persen)	97	Tetap
	Tetap		11 Persentase penyaluran dana bergulir BLU LPUMKP (persen)	80	Perubahan Manual Indikator setelah dilakukan evaluasi atas capaian indikator dan mempelajari alur proses bisnis penyaluran dana bergulir BLU LPMUKP.









03

AKUNTABILITAS KINERJA



AKUNTABILITAS KINERJA

CAPAIAN KINERJA

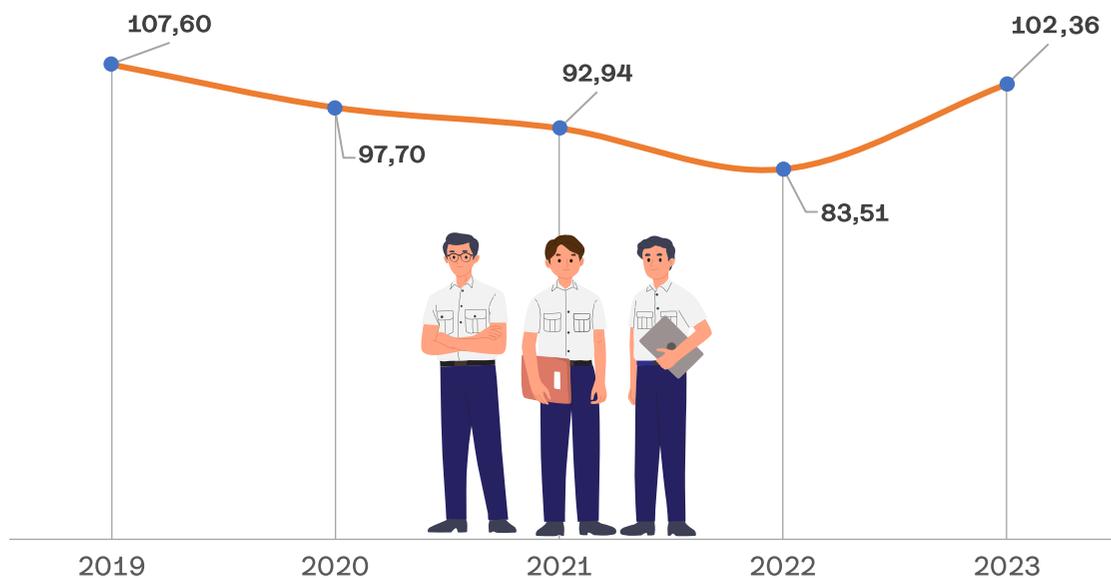
Dalam memantau capaian kinerja organisasi, Sekretariat Jenderal melakukan pengukuran kinerja secara triwulanan melalui aplikasi kinerjaku (www.kinerjaku.kkp.go.id) sesuai karakteristik IK yang selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan laporan kinerja. Proses pengukuran dan perhitungan capaian kinerja menggunakan manual IK yang telah disusun dan disepakati. Tampilan dashboard capaian Sekretariat Jenderal Tahun 2023 seperti pada Tabel berikut:

Tabel 6. Capaian IK Sekretariat Jenderal Tahun 2023

No	SASARAN/INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	%
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Jenderal			108,27	
1.	Indeks Reformasi Birokrasi KKP	78	78,43	100,55
2.	Indeks Profesionalitas ASN KKP	81,22	84,75	104,35
3.	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) KKP	87,3	87,3	100
4.	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) KKP	86	95,04	110,51
5.	Nilai Hasil Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup KKP	75	82,93	110,57
6.	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup KKP	92	112,59	120
7.	Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Sekretariat Jenderal dibandingkan Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal TA. 2023	0,5	0,01	120
8.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Sekretariat Jenderal	75	99,12	120
9.	Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi lingkup Sekretariat Jenderal	2	2	100
PNBP Sektor KP Meningkat			97,84	
10.	Persentase Pencapaian Target PNBP BLU LPMUKP	97	73,4	75,67
11.	Persentase Realisasi Penyaluran Dana Bergulir BLU LPMUKP	80	90,77	113,46

Sumber: kinerjaku.kkp.go.id per 14 Januari 2024

Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2023 sebesar 102,36 atau mengalami kenaikan sebesar 19,55 dibandingkan 2022 sebesar 83,51.



Gambar 3. Grafik NKO Sekretariat Jenderal Tahun 2019-2023

Berdasarkan grafik tersebut, NKO Sekretariat Jenderal mengalami fluktuatif, namun demikian tidak dapat dibandingkan secara apple to apple karena adanya penyesuaian jumlah indikator kinerja, nomenklatur indikator kinerja, manual indikator, tata cara perhitungan serta adanya penyesuaian akibat adanya perubahan kebijakan dengan rincian pada Tabel 7.

Analisis capaian kinerja dilakukan pada setiap pernyataan kinerja indikator kinerja dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 7. Capaian IK Sekretariat Jenderal Tahun 2023

TAHUN	NKO	JUMLAH INDIKATOR KINERJA
2019	107,60	28
2020	97,70	21
2021	92,94	21
2022	83,51	21
2023	103,06	11

Sumber: *Kinerjaku.kkp.go.id* dan *Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal*

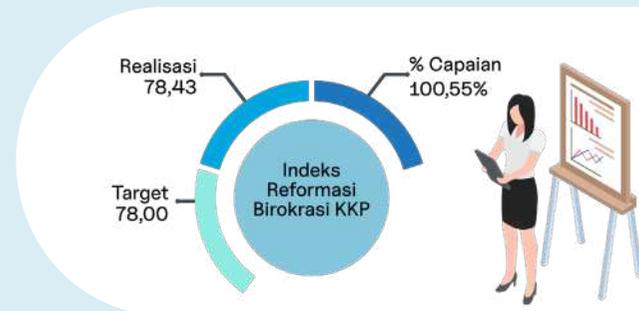


SASARAN PROGRAM 1. TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DI LINGKUNGAN KKP DAN SEKRETARIAT JENDERAL

IK1. INDEKS REFORMASI BIROKRASI KKP

1. Definisi Indikator Kinerja

Reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan khususnya berkaitan dengan tiga hal utama yaitu: (1) mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, (2) birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (making delivered), (3) serta birokrasi yang lincah dan cepat (agile bureaucracy). Nilai kinerja RB KKP merupakan ukuran perkembangan implementasi Reformasi Birokrasi di KKP yang dilaksanakan berdasarkan PermenPANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan PermenPANRB Nomor 25 tahun 2020 tentang Roadmap RB, PermenPANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi RB, KepmenPANRB Nomor 739 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi RB, dan KepmenKP 166 Tahun 2023 tentang Roadmap RB KKP 2020-2024. Komponen RB K/L dibagi menjadi 2 dimensi yaitu dimensi RB general dan RB Tematik. Dimensi RB General (bobot 100) terdiri atas 3 (tiga) komponen yaitu: komponen capaian strategi pelaksanaan RB general (bobot 10), terdiri atas subkomponen kualitas rencana aksi dan subkomponen implementasi rencana aksi, komponen capaian implementasi kebijakan RB (bobot 40), diukur dengan 18 indikator dan capaian sasaran strategis (bobot 50), diukur dengan 7 indikator



Dimensi RB Tematik (bobot 10) terdiri atas komponen capaian RB tematik (bobot 10), diukur dengan 5 indikator. Penajaman dan penyederhanaan evaluasi reformasi birokrasi di Tahun 2023 dilakukan melalui lebih mengukur hasil dan dampak dibandingkan dengan proses, menghilangkan penilaian yang bersifat administrative dan harmonisasi, integrasi dan sinergitas indikator penilaian reformasi birokrasi. Pelaksanaan dan evaluasi Reformasi Birokrasi dilakukan dengan berdasarkan pada :

1. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PAN RB Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024.
2. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi.
3. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 739 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023.

Kategori Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut :

Tabel 8. Kategori Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi

KATEGORI HASIL EVALUASI REFORMASI BIROKRASI		
KATEGORI	NILAI	PREDIKAT
AA	>100	Sangat Memuaskan
A	>80-100	Memuaskan
A-		Memuaskan dengan Catatan
BB	>70-80	Sangat Baik
B	>60-70	Baik
CC	>50-60	Cukup
C	>30-50	Kurang
D	>0-30	Sangat Kurang

2. Analisa Capaian Kinerja

Target Indeks RB KKP Tahun 2023 sebesar 78 dengan realisasi sebesar 85,40 atau telah mencapai 109,49%. Capaian tersebut berdasarkan hasil penilaian dari Kementerian PAN dan RB yang diumumkan secara serentak melalui portal RB. Berdasarkan hasil evaluasi secara nasional yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB, hasil evaluasi RB Tahun 2023 diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Rata-rata Indeks RB di tingkat Kementerian/Lembaga (82 KL) sebesar 76,81 atau mengalami kenaikan 0,28 poin.
2. Rata-rata Indeks RB di tingkat Pemerintah Provinsi (34 Provinsi sebesar 69,71) atau mengalami kenaikan 2,31 poin.
3. Rata-rata Indeks RB di tingkat Pemerintah Kab/ Kota (508 Provinsi sebesar 59,32) atau mengalami kenaikan 2,78 poin.



Gambar 4. Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023

Sumber: Kementerian PAN dan RB

Tabel 9. Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023

SP.01. TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK LINGKUP SEKRETARIAT JENDERAL

IK-1. Indeks Reformasi Birokrasi KKP

Realisasi 2018-2022						2023				Renstra KKP 2020-2024			
2017	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2022-2023	Target 2023	% Capaian terhadap Target 2023	Target 2024	% Capaian terhadap Target 2024
78,95	78,6	79,38	78,27	77,79	78,43	78	85,4	109,49%	8,89	78	109,49%	80	106,75%

Tabel 10. Sebaran Capaian Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023

PREDIKAT	KL	PREDIKAT	KAB/KOTA	JUMLAH
AA	-	-	-	-
A	26	5	35	66
BB	44	13	100	157
B	12	12	135	159
CC	-	2	119	121
D	-	2	90	92
JUMLAH	82	-	29	29
POPULASI	82	34	508	624
%	100%	88,24%	53,15%	61,22%

Pelaksanaan Evaluasi RB dilakukan melalui 2 jenis yaitu Evaluasi Internal dan Evaluasi Eksternal. Evaluasi Internal dilaksanakan oleh Evaluator Internal yaitu APIP masing-masing K/L/D atau Tim yang dibentuk secara khusus untuk melaksanakan evaluasi internal reformasi birokrasi di instansinya. Sedangkan evaluasi eksternal dilakukan oleh evaluator eksternal yang terdiri dari Evaluator Meso

dan Evaluator Nasional. Evaluator Meso merupakan KL yang memiliki peran, tugas dan fungsi untuk melakukan evaluasi aspek implementasi kebijakan yang merupakan komponen dari indeks reformasi birokrasi dan menjadi tanggung jawabnya. Evaluator Nasional merupakan Tim Evaluator yang ditetapkan oleh Ketua UPRBN yang berperan sebagai koordinator dalam pelaksanaan

evaluasi reformasi birokrasi dan melakukan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi tematik dan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi K/L/D. Pelaksanaan Evaluasi RB Tahun 2023 dilaksanakan secara terintegrasi melalui Portal RB Nasional dimana mulai dari input rencana aksi oleh K/L/PD, input data hasil indikator RB oleh KL MEso, penilaian/evaluasi oleh evaluator nasional sampai pada penyampaian Laporan Hasil Evaluasi oleh Evaluator Internal dilakukan secara terpadu melalui Portal RB.

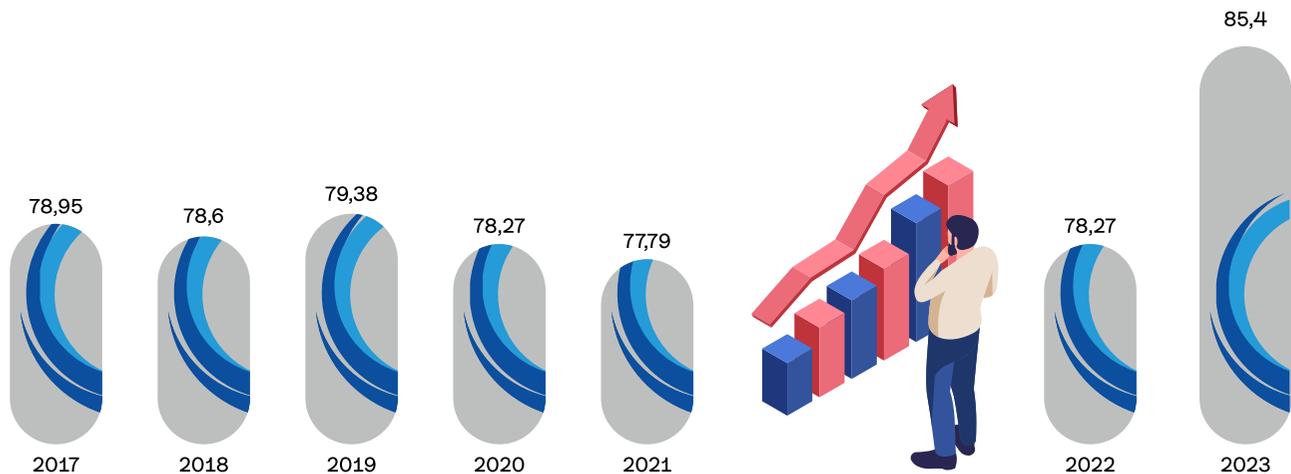
Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PAN dan RB secara umum temuan Evaluasi Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut :

1. Instansi Pemerintah dikecualikan dari perhitungan karena tidak menjadi lokus penilaian indikator meso.
2. Instansi pemerintah banyak yang mendapatkan nilai nol karena tidak memenuhi persyaratan penilaian indikator meso.

3. Instansi pemerintah tidak mengoptimalkan dalam memilih tema RB tematik.
4. Instansi Pemerintah tidak menetapkan seluruh kegiatan utama sampai tahun 2024.
5. Instansi Pemerintah tidak menyusun rencana aksi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
6. Rencana aksi sekedar formalitas, kurang berkualitas dan secara logika kurang berdampak.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, tindak lanjut hasil evaluasi RB yang diperlukan oleh setiap RB adalah sebagai berikut :

1. Setiap Instansi Pemerintah perlu memastikan untuk melaksanakan seluruh kegiatan utama dan memenuhi persyaratan penilaian dari KL pengampu indikator.
2. Setiap Instansi Pemerintah perlu memastikan rencana aksi pelaksanaan Reformasi Birokrasi betul-betul mengungkit capaian indikator kegiatan utama.
3. Setiap instansi pemerintah perlu mengoptimalkan perannya dalam RB Temati.



Gambar 5. Grafik Capaian Indeks Reformasi Birokrasi KKP Tahun 2017-2023

Pencapaian Indeks RB KKP Tahun 2023 disebabkan faktor-faktor antara lain :

1. Telah ditetapkan agen perubahan di lingkungan KKP berdasarkan hasil kolaborasi dari unit kerja eselon I.
2. Telah dilakukan pemetaan dampak dari kebijakan yang akan ditetapkan dalam regulasi dan dituangkan dalam kajian teknis saat pengajuan perencanaan.
3. Telah ditetapkan peta bisnis proses KKP tahun 2020-2024 yang dituangkan dalam Keputusan Menteri KP Nomor 127 tahun 2021 sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai sasaran strategis KKP.
4. Telah disusun peta rencana, dan telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas pembangunan SPBE.
5. Telah diterbitkan Permen KP 13 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja ASN di Lingkungan KKP.
6. Telah dilakukan pemetaan atas gap kompetensi APIP untuk dapat Menyusun program pengembangan kompetensi sehingga peran APIP dapat lebih optimal.
7. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelayanan publik dan hasil survei kepuasan masyarakat (SKM) telah dibahas dan ditindaklanjuti berdasarkan kritik dan pelaku usaha.

Tabel 13 Hasil Evaluasi Indeks Reformasi Birokrasi KKP Tahun 2023
(Berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi Kementerian PAN RB)

3. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Dalam melaksanakan reformasi birokrasi, kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Reformasi Birokrasi di KKP antara lain :

1. Kegiatan utama yang diamanatkan dalam Road Map RB Nasional telah dituangkan pada Road Map RB KKP.
2. Indikator kegiatan utama telah dikawal dengan target yang logis, realistis, dan berorientasi peningkatan kinerja.

3. Tersedia anggaran yang memadai dalam mendukung pelaksanaan aksi yang telah ditetapkan.
4. Penetapan rencana aksi juga telah memperhatikan kondisi baseline/eksisting.
5. Penetapan indikator output pada setiap aksi telah relevan dan cukup dalam menjawab aksi yang ditetapkan.
6. Penetapan target pada setiap indikator output telah mencakup aspek kejelasan, kelayakan, dan keterukuran dari target yang ditetapkan untuk mengukur hasil atau capaian dari suatu aksi.
7. Telah ditetapkannya Road Map RB Tahun 2023-2024 dan Rencana Aksi RB Tahun 2023 yang ditetapkan pada tanggal 17 Oktober 2023
8. telah menyelenggarakan Internalisasi Praktik Baik RB di lingkungan KKP pada tanggal 17 Maret 2023 dalam rangka menindaklanjuti surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Nomor B/01/RB.06/2023, tanggal 18 Januari 2023, hal Perubahan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023.
9. Telah mengusulkan inovasi berdasarkan kriteria inovasi digitalisasi yang telah dilaksanakan secara konkrit, memberikan hasil nyata yang positif dengan indikator yang terukur, serta telah menerima penghargaan dari eksternal termasuk yang telah menjadi nominasi untuk mendapatkan penghargaan. Berdasarkan kriteria tersebut terpilih 10 (sepuluh) usulan praktik baik KKP yang selanjutnya diusulkan kepada Kementerian PAN dan RB 31 Maret 2023, sebagai berikut

4. Rencana Aksi (Upaya) Peningkatan Capaian Kedepan

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2022, beberapa hal yang akan dilakukan untuk peningkatan kualitas tata kelola birokrasi di KKP diantaranya:

1. Melakukan penyederhanaan birokrasi (penyederhaaan organisasi/transformasi berbasis kinerja dan agile).
2. Melaksanakan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi ASN.
3. Penguatan implementasi SPIP.
4. Meningkatkan pembangunan Zona Integritas dan meningkatkan layanan konsultasi dan fasilitasi terhadap seluruh unit kerja.
5. Meningkatkan pelaksanaan SAKIP yang terintegrasi.
6. Melakukan optimalisasi penerapan SPBE yang terintegrasi dan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengukur tingkat efektivitas dan dampak penerapan SPBE.
7. Meningkatkan implementasi digitalisasi arsip
8. Penguatan pengelolaan keuangan dan asset.
9. Penyelesaian tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR).
10. Pelaksanaan tata Kelola kebijakan publik
11. Meningkatkan kematangan penyelenggaran statistic sectoral
12. Penguatan tata Kelola pengadaan barang dan jasa
13. Penguatan sistem merit
14. Peningkatan pelayanan publik prima
15. Meningkatkan mutu self-assesement atas aspek-aspek pada hasil antara area perubahan dan koordinasi dengan instansi leading sektor yang bersangkutan.

5. Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka mendukung ketercapaian Reformasi Birokrasi di KKP, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 261.680.000 dengan realisasi sebesar Rp261.680.000 atau mencapai 100%, dengan kegiatan utama yaitu identifikasi praktik baik RB di lingkungan KKP, penyusunan roadmap RB KKP 2023-2024, penyusunan rencana aksi RB KKP tahun 2023 dan penyusunan laporan impleentasi RB KKP. Selain itu untuk pelaksanaan reformasi birokrasi juga dikelola oleh masing-masing unit kerja eselon I dan terutama Inspektorat Jenderal selaku Evaluasi Internal. Keberhasilan proses transformasi suatu organisasi tidak bisa dilepasakan dari peran dan komitmen pimpinan. Oleh karena itu untuk memastikan dukungan jajaran manajemen KKP terhadap pelaksanaan roadmap RB KKP, telah dibentuk Tim Pengarah, Pelaksana, Evaluator Internal dan Sekretariat sebagaimana tertuang dalam Kepmen KP 166/2023 tentang Perubahan atas Kepmen KP 32/2021 tentang Road Map RB KKP 2020-2024. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam pencapaian indikator kinerja Indeks RB KKP antara lain :sarana perkantoran, laptop, komputer, internet, drive penyimpanan file online dan perangkat lunak video conference.

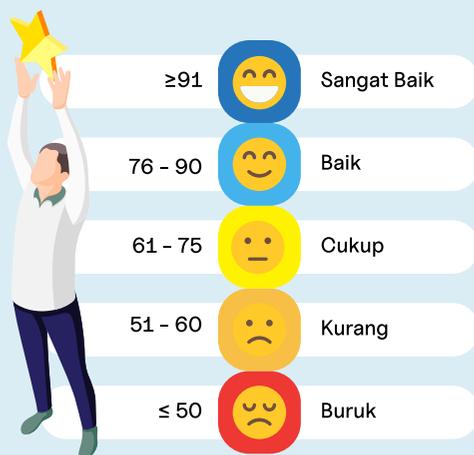
IK 2. INDEKS PROFESIONALITAS ASN KKP

1. Definisi Indikator Kinerja

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan, yang diukur setiap tahun dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi yaitu 1. Kualifikasi, 2. Kompetensi, 3. Kinerja dan 4. Disiplin dengan rincian sebagai berikut :

- **Dimensi Kualifikasi (Bobot 25%)**

Dimensi kualifikasi menggambarkan tingkat atau jenjang pendidikan yang dicapai seseorang untuk memperoleh suatu pengetahuan dan atau keahlian khusus, sehingga seseorang mengetahui, memahami dan mampu melaksanakan pekerjaan tertentu sesuai profesinya.



Gambar 5. Nilai prestasi kerja PNS



Berdasar Surat Edaran Menteri PAN RB Nomor 28 Tahun 2021, untuk mendukung transformasi sumber daya manusia aparatur melalui peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan PNS melalui jalur pendidikan dalam bentuk pemberian tugas belajar. Pemberian tugas belajar diharapkan mampu mengurangi kesenjangan antara standar kompetensi dan/atau persyaratan jabatan dengan kompetensi PNS yang akan mengisi suatu jabatan. Apabila PNS memiliki keahlian atau kompetensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya maka akan berdampak pada peningkatan pengetahuan, kemampuan, keterampilan sikap dan kepribadian profesional PNS sehingga diharapkan mampu meningkatkan nilai IP ASN.

- **Dimensi kompetensi (Bobot 40%)**

Dimensi kompetensi menggambarkan mempunyai seseorang yang merupakan kombinasi dari keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*) dan sikap (*attitude*) yang didukung oleh rencana pengembangan kompetensi berkesinambungan. Kesemuanya itu tercermin melalui perilaku kinerja yang dapat diamati, diukur dan dievaluasi.

Pengembangan kompetensi ASN dapat dilakukan melalui pelatihan klasikal maupun non klasikal sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil. Pelatihan klasikal merupakan bentuk pengembangan kompetensi melalui kegiatan pembelajaran tatap muka di dalam kelas antara lain pelatihan struktural kepemimpinan, pelatihan menajerial, pelatihan teknis, pelatihan fungsional, pelatihan sosial kultural dan lain-lain.

Sedangkan pelatihan non klasikal merupakan bentuk pengembangan kompetensi melalui proses pembelajaran praktik kerja dan atau pembelajaran di luar kelas mencakup di tempat kerja (*experiential learning*), pembelajaran melalui hubungan sosial (*social learning*), dan pembelajaran yang dilakukan secara fleksibel (*flexible learning*). Pelatihan non klasikal berupa *experiential learning* dilakukan dengan kegiatan magang, *benchmarking*, *detasering* dan lainnya. Contoh kegiatan *social learning* adalah *coaching* dan mentoring. Kemudian contoh kegiatan *flexible learning* dilakukan dengan pelatihan jarak jauh, *e-learning*, dan belajar mandiri.

3. Dimensi kinerja (Bobot dimensi 30 Persen)
Dimensi kinerja merupakan penggambaran capaian sasaran kerja pegawai yang didasarkan pada perencanaan kerja pada tingkat individu dan tingkat unit organisasi dengan memperhatikan capaian, target, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku ASN yang bersangkutan. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil diwujudkan dalam komponen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) meliputi aspek kuantitas, kualitas, waktu dan biaya. Penilaian SKP dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kerja dengan target. Kemudian Penilaian Kinerja Pegawai (PKP) meliputi aspek orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama dan kepemimpinan.

4. Dimensi disiplin (Bobot dimensi 5%)
Dimensi disiplin merupakan dimensi yang menggambarkan kesanggupan seorang pegawai untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan atau peraturan kedinasan, apabila dimensi disiplin dilanggar atau tidak ditaati maka ASN yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin langsung maupun hukuman disiplin tidak langsung yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan jabatan. Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, membagi hukuman disiplin dalam 3 (tiga) kategori yakni hukuman disiplin ringan, sedang dan berat.

Tahap Pengukuran Indeks Profesional ASN

1. Persiapan : Tim atau Pengelola Kepegawaian Pengukuran IP ASN bertugas mengumpulkan bahan, menginventarisir seluruh dokumen yang berkaitan dengan bukti fisik, menginput, memverifikasi dan memvalidasi data serta membuat laporan secara hirarki.
2. Pelaksanaan : Pengukuran IP ASN dilakukan secara berkala setiap tahun. Tahap pelaksanaan dilakukan melalui penginputan data pada aplikasi Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN yang telah disediakan.
3. Pengolahan : pengolahan data terdiri atas beberapa tahap yakni (a) Melakukan klasifikasi data IP berdasarkan dimensi yang telah ditetapkan; (b) Melakukan validasi data Indeks berdasarkan klasifikasi jabatan dan unit kerja; (c) Menetapkan hasil penilaian IP ASN Instansi masing-masing.
4. Pelaporan : Setiap unit pengelola kepegawaian menyusun laporan dan menyampaikan secara hirarki. Hasil Pengukuran IP ASN di lingkungan Instansi Pusat dan Instansi Daerah disampaikan ke KemenPANRB melalui BKN.
5. Pengisian/ Tata Cara Pengisian : Pengisian IP dilakukan oleh ASN yang bersangkutan atau oleh unit pengelola kepegawaian. Pengisian data sesuai dimensi IP ASN berdasarkan data di SAPK.

Pada Mei Tahun 2023, Badan Kepegawaian Negara menerbitkan Surat Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Nomor 006/B-BM.02.01/SD/C/2023 tanggal 22 Mei 2023 perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023, atas dasar tersebut KKP kemudian mengubah rumusan atau perhitungan dari 4 Dimensi IP ASN, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Perhitungan bobot pada dimensi kualifikasi mengalami penyesuaian dengan mencantumkan persyaratan pendidikan minimal dengan jenis jabatan yang diduduki.
2. Bagi pejabat administrasi yang disetarakan ke dalam jabatan fungsional mendapatkan bobot yang sama dengan pejabat fungsional yang telah mengikuti pelatihan fungsional berdasarkan hasil koordinasi Instansi Pengguna dengan Instansi Pembina dan melampirkan bukti berupa surat keterangan/rekomendasi yang selanjutnya dimutakhirkan ke dalam Sisten Informari Aparatur Negara Nasional (SIASN).

3. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan pelatihan teknis kurang dari 20 JP akan dinilai secara proporsional.
4. Riwayat pelatihan teknis dan diklat pendukung/seminar/*workshop* /sejenisnya dapat melalui jalur pelatihan secara klasikal dan/atau nonklasikal.
5. Perhitungan bobot dimensi kinerja mengalami penyesuaian menjadi predikat kinerja.
6. Riwayat hukuman disiplin 1 (satu) tahun terakhir.

Menindaklanjuti penyesuaian tersebut, Sekretariat Jenderal telah melakukan penyesuaian antara lain :

1. Telah dilakukan perubahan perhitungan capaian kinerja Pengukuran IP ASN di Lingkungan KKP.
2. Telah dilakukan penyesuaian pengukuran IP ASN di Lingkungan KKP pada laman dashboard <http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn#/ip-asn/eselon>.

Tabel 11. Rincian Penyesuaian Kualifikasi dan Syarat Setiap Jenjang Jabatan

JENJANG JABATAN	PERSYARATAN PENDIDIKAN MINIMAL DALAM JABATAN	PENDIDIKAN YANG DIPEROLEH PNS (BOBOT)					
		S3	S2	S1/D4	D III	DII/DI/SLTA/SEDERAJAT	DIBAWAH SLTA
Jabatan Pimpinan Tinggi	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
Jabatan Administrator	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
Jabatan Pengawas	DIII	25	23	21	20	15	10
Jabatan Pelaksana	DII/DI/SLTA Sederajat	25	23	22	21	20	15
Jabatan Fungsional (Keterampilan)	DII/DI/SLTA/Sederajat	25	23	22	21	20	15
	DIII	25	23	21	20	15	10
Jabatan Fungsional (Keahlian)	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
	S2	25	20	15	10	5	1

Tabel 12. Penyesuaian Rincian Bobot Predikat Kinerja

PREDIKAT KINERJA	BOBOT	
	MAKSIMAL	PEROLEHAN
Sangat Baik	30	30
Baik		25
Butuh Perbaikan		20
Kurang/Misconduct		15
Sangat Kurang		10

KKP telah menyampaikan surat ke Direktur Jabatan ASN Badan Kepegawaian Negara Nomor B.3595/SJ.3/TU.330/X/2023 perihal Permohonan Hasil Penilaian Capaian Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan KKP. Badan Kepegawaian Negara mengirim surat balasan melalui Surat Direktur Jabatan ASN BKN Nomor 236.A/BM.02/SD/C.II/2023 tanggal 6 November 2023 perihal Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2022. Capaian Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan KKP pada Tahun 2022 sebesar 82,04 dengan capaian pada aspek Kualifikasi sebesar 20,97, kompetensi sebesar 31,35, kinerja sebesar 24,72 dan Disiplin sebesar 5,00.

Selanjutnya capaian IP ASN KKP Tahun 2023 akan dihitung pada April 2024 oleh Badan Kepegawaian Negara melalui aplikasi SIASN dan aplikasi MyASN. Capaian IP ASN per Individu dapat di lihat pada aplikasi MyASN BKN, sedangkan capaian IP ASN lingkup KKP dapat dilihat pada aplikasi SIASN Instansi. Pengukuran IP ASN di lingkungan KKP Tahun 2023 dilakukan



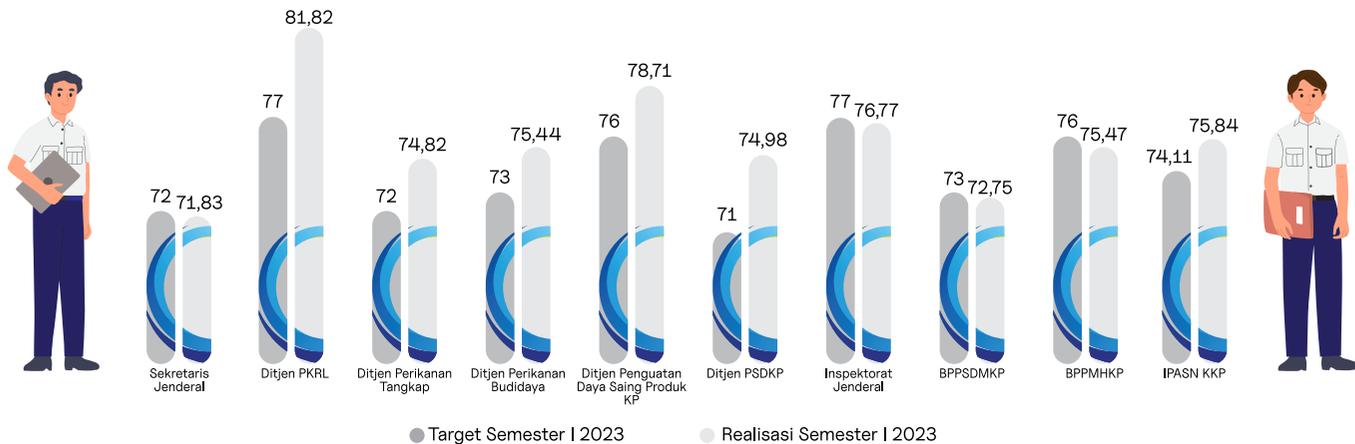
CAPAIAN IP ASN KKP TAHUN 2023 SEBESAR 88,20 (KATEGORI TINGGI) DENGAN RINCIAN NILAI PER DIMENSI YAITU KUALIFIKASI SEBESAR 21,16, KOMPETENSI SEBESAR 37,10, KINERJA SEBESAR 24,95 DAN DISIPLIN 4,98.

secara real time pada dashboard dengan link <http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn#/ip-asn/eselon>, dengan pengambilan data pada aplikasi e-Pegawai KKP yaitu data tingkat pendidikan, kompetensi (diklat struktural, diklat jabatan fungsional, diklat 20 JP dan Seminar serta memadukan dengan jenjang jabatan.

2. Analisa Capaian Kinerja

Sesuai Surat Nota Dinas Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi Nomor 1082/SJ.3/KP.720/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023 perihal Capaian Indikator Kinerja IP ASN di lingkungan KKP Semester I Tahun 2023, maka capaiannya sebesar 75,84 (sedang) atau telah mencapai 102% dari target nilai IP ASN semester I Tahun 2023 sebesar 74,11 dengan rincian kualifikasi sebesar 14,25, kompetensi sebesar 32, kinerja sebesar 24,66 dan disiplin sebesar 4,94. Rincian realisasi IP ASN per Unit Kerja Eselon I adalah sebagai berikut :

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi Nomor 88/SJ.3/TU.140/I/2024 tanggal 11 Januari 2024 perihal Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) di lingkungan KKP Tahun 2023 dan Target Capaian IP ASN KKP Tahun 2024, maka capaian IP ASN KKP Tahun 2023 sebesar 88,20 (kategori Tinggi) dengan rincian nilai per dimensi yaitu kualifikasi sebesar 21,16, kompetensi sebesar 37,10, kinerja sebesar 24,95 dan disiplin 4,98. Rincian realisasi IP ASN KKP dan Per Unit Kerja Eselon I sebagai berikut Tabel 17.



Gambar 6. Grafik Capaian IP ASN KKP dan Per Unit Kerja Eselon I Semester I 2023

Tabel 13. Capaian IP ASN Per Unit Kerja Eselon I

No	UNIT KERJA	TARGET SEMESTER I 2023	REALISASI SEMESTER I 2023	TARGET 2023	REALISASI 2023	% REALISASI 2023	TARGET 2024
1	Sekretariat Jenderal	72	71,83	80	84,75	105,94%	85
2	Ditjen PKRL	77	81,82	85	89,95	105,82%	88
3	Ditjen Perikanan Tangkap	72	74,82	80	87,97	109,96%	84
4	Ditjen Perikanan Budi Daya	73	75,44	81	88,37	109,10%	85
5	Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP	76	78,71	83,2	90,5	108,77%	87
6	Ditjen PSDKP	71	74,98	78	87,5	112,18%	82
7	Inspektorat Jenderal	77	76,77	85	90,61	106,60%	85
8	BPPSDMKP	73	72,75	74	86,12	116,38%	79
9	BPPMHKP	76	75,47	84	88	104,76%	86
IPASN KP		74,11	75,84	81,22	88,20	108,59%	85
PREDIKAT		(Sedang)	(Sedang)	(Tinggi)	(Tinggi)		(Tinggi)

Sumber: <http://ropeg.kkp.go.id> (8 Januari 2024)

Tabel 14. Rincian Capaian dan Target IK-2

SP.01. TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK LINGKUP SEKRETARIAT JENDERAL												
IK-2. Indeks Profesionalitas ASN KKP												
Realisasi 2018-2022					2023				Renstra KKP 2020-2024 (Permen KP 57/2020)			
2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2022-2023	Target 2023	% Capaian terhadap Target 2023	Target 2024	% Capaian terhadap Target 2024
-	72,48	73,37	81,36	82,11	81,22	88,2	108,59%	7,42	-	-	-	-

Capaian Tahun 2019 masih menggunakan Permen PAN 38/2018 tentang Pengukuran IP ASN. Sejak Tahun 2020 pengukuran capaian menggunakan Perka BKN 8/2019 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengukuran IP ASN. Untuk Tahun 2023, perhitungan disesuaikan dengan surat Badan Kepegawaian Negara Nomor 006/B-BM.02.01/SD/C/2023 tanggal 22 Mei 2023 perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023.

Sumber: <http://ropeg.kkp.go.id> dan Laporan Pengukuran IP ASN

Pengambilan data Pengukuran IP ASN KKP Tahun 2023 dilakukan pada 8 Januari 2024, dengan realiasi sebesar 88,20 (kategori tinggi) dari target 2023 sebesar 81,22 atau telah mencapai sebesar 108%. IP ASN KKP belum tercantum pada Renstra Sekretariat Jenderal 2020-2024, yang tercantum adalah IP ASN Sekretariat Jenderal. Meskipun belum tercantum pada Renstra Sekretariat Jenderal, namun Sekretariat Jenderal setiap tahunnya tetap melakukan penetapan target dan pemantauan capaian secara berkala. IP ASN KKP baru ditetapkan sebagai IK pada Tahun 2019 sesuai dengan terbitnya peraturan dari BKN. Namun demikian sejak Tahun 2018 Sekretariat Jenderal telah memiliki indikator kinerja yang menghitung kompetensi dan integritas pegawai dengan nomenklatur indikator yaitu Indek Kompetensi dan Integritas Sekretariat

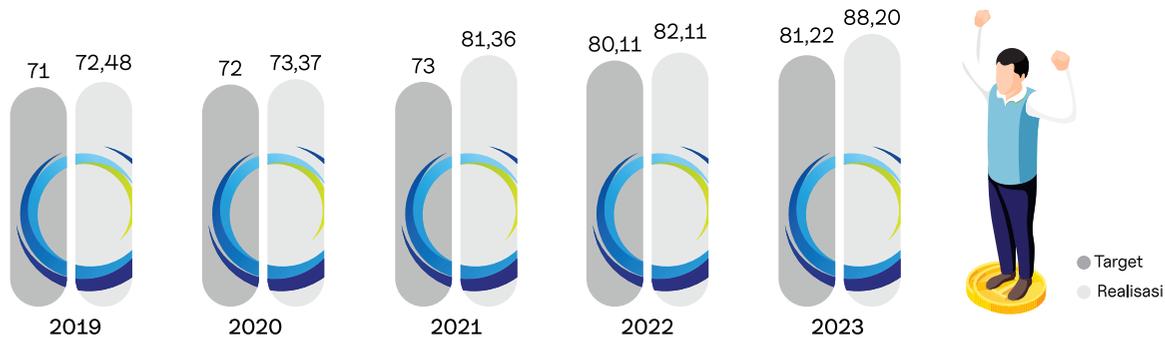
Jenderal dengan target 81 dan realisasi sebesar 91,31 dengan menggunakan 4 (empat) aspek yaitu: 1). Nilai *Assesment*, 2). Presensi /kehadiran 3). Nilai SKP dan 4). Kepatuhan LHPKN/LHKASN.

Indeks IP ASN KKP Tahun 2023 belum dapat dibandingkan dengan capaian KL lainnya hal ini disebabkan BKN dan KL terkait masih dalam proses penyusunan Laporan Tahun 2023. Namun demikian capaian IP ASN KKP 2022 dapat dibandingkan dengan capaian IP ASN Nasional Tahun 2022 sebesar 71,82 (kategori sedang) dengan capaian per dimensi yaitu kompetensi sebesar 21,83, kompetensi sebesar 21,83, kinerja sebesar 23,70 dan disiplin sebesar 5 dengan jumlah instansi yang diukur 82 KL. Rincian perbandingan dengan IP ASN Nasional sebagaimana Tabel 19.

Tabel 15. Capaian IP ASN Instansi Pusat Tahun 2022

INSTANSI	TAHUN PENG-UKURAN	JUMLAH INSTANSI YANG DIUKUR	JUMLAH PNS DIUKUR	KUALIFI-KASI	KOMPE-TENSI	KINERJA	DISIPLIN	NILAI INDEKS	KATE-GORI
Instansi Pusat (82 KL)	2022	82	856.560	21,30	21,83	23,70	5,00	71,82	Sedang

Sumber: BKN, 2022



Gambar 7. Grafik Capaian IP ASN KKP Tahun 2019-2023

Pencapaian IP ASN KKP Tahun 2023 disebabkan faktor-faktor antara lain :

1. Adanya penyesuaian pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023, sehingga terjadi peningkatan dari capaian IP ASN KKP Tahun 2023 sebagaimana surat Badan Kepegawaian Negara Nomor 006/B-BM.02.01/SD/C/2023 tanggal 22 Mei 2023 perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023. Penyesuaian Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023 mencakup kualifikasi sesuai jenjang jabatan, kompetensi diklat 20 JP dapat dihitung secara proporsional, hukuman disiplin perhitungan dari awalnya 5 (lima) tahun menjadi 1 (satu) dan tahun sebelumnya.
2. Keikutsertaan Pelatihan Diklat Perjenjangan bagi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Kepala Unit Kerja lebih di optimalkan dan dikoordinasikan kepada unit penyelenggara Diklat di KKP.
3. Adanya komitmen pimpinan unit kerja untuk melakukan monitoring berkala terhadap capaian IP ASN di masing-masing unit kerja yang disampaikan pada setiap *briefing/apel* pagi sehingga setiap pegawai menjadi termotivasi untuk meningkatkan IP ASN.
4. Pemutakhiran data komponen IP ASN yang dilakukan secara berkala oleh unit kerja.

3. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian IP ASN KKP antara lain :

1. Sosialisasi target IP ASN tahun 2023 melalui penyampaian Nota Dinas keseluruh Unit Kerja Eselon I.
2. Monitoring Capaian secara berkala melalui penyampaian Nota Dinas kepada Unit Kerja Eselon I dan selanjutnya dilakukan berjenjang ke unit kerja dibawahnya.
3. Tersedianya dashboard pengukuran IP ASN secara *real time* sehingga masing-masing pegawai dapat memantau mandiri capaian IP ASN dan melakukan upaya perbaikan pada dimensi yang masih kurang.
4. Telah dilakukan peremajaan data, rekonsiliasi data dan/atau integrasi data riwayat diklat/kursus, penilaian kinerja dan hukuman disiplin di masing-masing unit kerja.
5. Telah disediakan media peningkatan kompetensi untuk seluruh pegawai melalui pelatihan diklat pimpinan, diklat fungsional, diklat teknis 20 jam pelajaran dan seminar/*workshop* dengan *metode hybrid*.
6. Telah disediakan media *online* peningkatan kompetensi untuk seluruh pegawai melalui diklat yang dapat diakses melalui *elearning.kkp.go.id*.



4. Upaya Perbaikan dan Upaya Penyempurnaan Kinerja Kedepan (Rencana Aksi)

Untuk meningkatkan capaian IP ASN beberapa hal yang akan dilakukan antara lain :

1. Pengukuran IP ASN KKP Tahun 2024 dirancang menggunakan data *webservice* dari aplikasi SIASN BKN dengan dibantu sinkronisasi data dari Pusdatin KKP.
2. KKP telah melaksanakan perumusan perhitungan IP ASN sesuai surat BKN terkait penyesuaian dimensi IP ASN pada dashboard IP ASN KKP Tahun 2023 dan Tahun 2024 akan dikembangkan Kembali sesuai perubahan data kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disipilin sesuai data SIASN dari BKN.
3. Program pelatihan dan pendidikan perjenjangan yang dilakukan secara *hybrid* baik online dan offline agar kesempatan pembelajaran bagi Pejabat Pimpinan Madya dan Pratama serta Pimpinan Unit Kerja lebih mudah dilaksanakan.
4. Peningkatan *awareness* pegawai untuk melakukan pemutakhiran data elektronik dalam aplikasi Simpeg.
5. Pengusulan peningkatan kompetensi utk seluruh pegawai dengan pelatihan diklat pimpinan, diklat fungsional, diklat teknis 20 jam pelajaran dan seminar/*workshop*

5. Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka mendukung ketercapaian IP ASN di KKP, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp120.050.000,00 dengan realisasi sebesar Rp120.050.000,00 atau mencapai 100%, dengan kegiatan utama yaitu monitoring capaian IP ASN KKP secara berkala, pemantauan *dashboard* IP ASN KKP, pendampingan dan menyampaikan informasi terkait IP ASN kepada Unit Kerja Eselon I lingkup KKP. Selain itu untuk IP ASN di lingkungan Unit Kerja Eselon I dikelola oleh masing-masing unit kerja Eselon I. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam pencapaian indikator kinerja IP ASN antara lain sarana perkantoran, laptop, komputer, internet, *drive* penyimpanan file *online* dan perangkat lunak *video conference*.



Sekretaris Jenderal KKP, menerima penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya

IK3. INDEKS PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK KKP

1. Definisi Indikator Kinerja

Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) adalah Indikator Kinerja baru di Triwulan III Tahun 2023. Pengukuran indeks ini bertujuan mengukur dan mengevaluasi kinerja pengelolaan informasi publik baik yang dilaksanakan oleh satuan kerja KL maupun Pemerintah Daerah. Konteks informasi dalam indeks PIKP adalah Program Prioritas Nasional yang telah ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Presiden. Indeks PIKP disusun berdasarkan konsep manajemen komunikasi kehumas serta agenda *setting*.

Setidaknya ada 4 dimensi yang diukur yaitu dimensi input, proses, *output* dan *outcome*. Sumber data capaian Indeks PIKP berdasarkan hasil publikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika. Indeks PIKP dihitung dan diolah oleh Kementerian Kominfo berdasarkan data yang dikumpulkan sepanjang Tahun 2022 dan diumumkan pada Tahun 2023. Realisasi Indikator Kinerja Indeks PIKP Kementerian Kelautan dan Perikanan diperoleh dari hasil Dimensi Input dan hasil Dimensi Proses (rata-rata hasil). Dimensi input terdiri dari variabel anggaran, variabel bahan informasi, variabel sarana dan prasarana dan variable media dan saluran informasi. Sedangkan dimensi proses terdiri dari variabel pengumpulan data dalam rangka perencanaan program, variabel perencanaan, variabel pelaksanaan, dan variabel monitoring dan evaluasi. Adapun kriteria penilaian indeks sebagai berikut : 1). Sangat Baik (skor >80), 2). Baik (skor 71–80), 3). Sedang (skor 61–70), 4). Buruk (skor 51–60) dan 5). Sangat Buruk (skor <50).

2. Analisa Capaian Kinerja

Pada Tahun 2022, KKP telah mengisi kuesioner Survei PIKP yang dikirimkan oleh Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Direktorat Jenderal



Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Hasil Survei PIKP yang telah diajukan secara mandiri oleh KKP kemudian dinilai dan hasilnya diumumkan pada Tahun 2023 pada Buku Indeks PIKP. Target Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) KKP Tahun 2023 sebesar 87,30 dengan realisasi sebesar 87,30 atau mencapai 100%. Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) KKP belum dapat dibandingkan capaiannya dengan tahun sebelumnya karena merupakan indikator baru di Tahun 2023. Selain itu, belum dapat dibandingkan dengan target Renstra Sekretariat Jenderal 2020-2024, namun telah diusulkan dalam usulan revisi Renstra Sekretariat Jenderal 2020-2024. Capaian sebesar 87,30 didapatkan dari hasil dimensi *input* sebesar 89,36 dan dimensi proses sebesar 85,25.



TARGET INDEKS PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK (PIKP) KKP TAHUN 2023 SEBESAR 87,30 DENGAN REALISASI SEBESAR 87,30 ATAU MENCAPAI 100%.



Konsultasi Publik Harga Patokan Terendah Benih Bening Lobster di Nelayan

Tabel 16. Capaian Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi KKP Tahun 2023

SP.01. TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK LINGKUP SEKRETARIAT JENDERAL

IK 3. Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik KKP

Realisasi 2018-2022					2023				Renstra KKP 2020-2024			
2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2022-2023	Target 2023	% Capaian terhadap Target 2023	Target 2024	% Capaian terhadap Target 2024
-	-	-	-	-	87.30	87.30	100.00%	-	-	-	-	-

INDIKATOR PEMBENTUK	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
Nilai Dimensi Input Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	89,36	89,36	100%
Nilai Dimensi Proses Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	85,25	85,25	100%
Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik KKP	87,3	87,3	100%

Capaian dimensi input adalah sebesar 89,36 (sangat baik) terdiri dari variabel anggaran sebesar 92,31, Bahan informasi sebesar 77,63, sarana dan prasarana 100 dan media dan saluran komunikasi sebesar 89,36.

Tabel 17. Perbandingan Capaian Variabel Dimensi *Input* Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi KKP

KEMENTERIAN/LEMBAGA	VARIABEL DIMENSI INPUT				SKOR DIMENSI INPUT	KATEGORI
	ANGGARAN	BAHAN INFORMASI	SARANA & PRASARANA	MEDIA & SALURAN		
Kementerian ESDM	100	100	94,74	100	98,68	Sangat Baik
Kementerian Pertanian	100	90,71	100	100	97,68	Sangat Baik
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	92,31	95	89,47	100	94,20	Sangat Baik
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika	100	77,63	100	91,67	92,32	Sangat Baik
Kementerian Komunikasi dan Informatika	100	76,92	89,47	100	91,60	Sangat Baik
Kementerian Kesehatan	92,31	75,99	94,74	100	90,76	Sangat Baik
Kementerian Perindustrian	92,31	91,09	84,21	91,67	89,82	Sangat Baik
Kementerian Dalam Negeri	100	77,02	94,74	87,5	89,81	Sangat Baik
KKP	92,31	77,63	100	87,5	89,36	Sangat Baik
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	92,31	89,04	84,21	91,67	89,31	Sangat Baik

Sumber: Laporan Indeks Pengelolaan dan Komunikasi Tahun 2022 diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika

Realisasi dimensi proses adalah sebesar 85,25, dengan nilai masing-masing variabel yaitu : 1) pengumpulan data dan informasi sebesar 66,67; 2) perencanaan

program/kegiatan sebesar 91,67; 3) pelaksanaan program/kegiatan sebesar 82,67; serta 4) monitoring dan evaluasi sebesar 100.

Tabel 18. Perbandingan Capaian Variabel Dimensi Proses Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi KKP

KEMENTERIAN/LEMBAGA	PENGUM- PULAN DATA	PERENCA- NAAN	PELAKSA- NAAN	MONITO- RING & EVALUASI	SKOR DIMENSI PROSES	KATEGORI
Kementerian ESDM	100	100	94,53	100	98,63	sangat baik
Kementerian Pertanian	100	91,67	95,87	100	96,88	sangat baik
BIN	100	100	85,26	100	96,32	sangat baik
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	100	95	85,9	100	95,22	sangat baik
Kementerian Dalam Negeri	88,89	100	91,47	88,89	92,31	sangat baik
Kementerian Komunikasi dan Informatika	100	81,67	84,94	100	91,66	sangat baik
Kementerian Sekretariat Negara	77,78	95	93,79	100	91,64	sangat baik
Komisi Pemberantasan Korupsi	100	91,67	83,72	88,89	91,07	sangat baik
Kementerian PUPR	100	100	63,84	100	90,96	sangat baik
Kementerian Kesehatan	100	100	85,9	77,78	90,92	sangat baik
Sekretariat Kabinet	77,78	100	79,45	100	89,31	sangat baik
BPOM	100	100	68,77	77,78	86,64	sangat baik
Kementerian Sosial	77,78	83,33	85,39	100	86,62	sangat baik
PPATK	100	91,67	65,89	88,89	86,61	sangat baik
Kementerian Perdagangan	66,67	95	80,56	100	86,47	sangat baik
Kementerian Perindustrian	88,89	85	79,31	88,89	85,56	sangat baik
BRIN	66,67	91,67	83,40	100	85,52	sangat baik
KKP	66,67	91,67	82,67	100	85,43	sangat baik
Kementerian Ketenagakerjaan	77,78	91,67	84,70	77,78	85,25	sangat baik
					82,98	sangat baik

Faktor keberhasilan pencapaian Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi KKP antara lain :

1. Telah dilakukan pemenuhan terhadap variabel dimensi *input* dan proses secara tepat waktu.
2. Telah dilakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika selaku Penanggung Jawab Indikator Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi di tingkat nasional.
3. Koordinasi pemenuhan variabel dimensi input dalam indeks PIKP, yaitu anggaran, bahan informasi, sarana dan prasarana, dan Media dan saluran komunikasi. Untuk variabel sarana dan prasarana, KKP mencapai nilai maksimal sebesar 100 yang didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan fungsi pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah (infrastruktur komunikasi dan informasi serta telekomunikasi), dan ketersediaan pedoman internal atau mekanisme tertentu terkait keamanan data pribadi dalam PIKP.
4. Koordinasi pemenuhan variabel dimensi proses dalam indeks PIKP yaitu pengumpulan data, perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi. Untuk variabel monitoring dan evaluasi, KKP mencapai nilai maksimal sebesar 100 yang didukung oleh kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan program/kegiatan, kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap media terkait liputan pelaksanaan program/kegiatan (baik media konvensional maupun media baru), dan keberadaan dokumen “Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi” pelaksanaan program/kegiatan.
5. Sosialisasi kepada seluruh Unit Kerja Eselon I untuk turut mendukung pemenuhan variabel untuk dimensi *input* dan proses.
6. Pemantauan dan Evaluasi kinerja secara berkala untuk mengetahui variabel apa saja yang perlu ditingkatkan capaiannya.
7. Telah dilakukan produksi dan publikasi pelaksanaan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan dan pembuatan video dokumenter.
8. Pelaksanaan layanan manajemen isu dan opini publik pembangunan KP.

3. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Keberhasilan dalam memenuhi target Indeks PIKP ditentukan oleh beberapa hal diantaranya :

1. Pengelolaan media sosial akun KKP dan akun pribadi Menteri KP.
2. Pemantauan media (media cetak, sosial dan *online*).
3. Peliputan dan dokumentasi kegiatan pimpinan.
4. Publikasi capaian kinerja pembangunan kelautan dan perikanan melalui media massa.
5. Pelaksanaan kegiatan bulan bakti KKP Tahun 2023.
6. Bincang bahari dengan fokus diskusi pada topik utama pembangunan kelautan dan perikanan.
7. Produksi video dokumenter keberhasilan pembangunan kelautan dan perikanan.

4. Upaya Perbaikan dan Upaya Penyempurnaan Kinerja Kedepan (Rencana Aksi)

Upaya peningkatan kinerja tahun berikutnya dilakukan melalui :

1. Dengan meningkatkan nilai pada variabel dimensi *input* dan proses yang masih rendah berdasarkan hasil evaluasi penilaian dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.
2. Pelaksanaan kegiatan produksi dan publikasi terkait rencana dan kinerja pembangunan kelautan dan perikanan melalui *website* resmi KKP, dan media sosial.
3. Produksi video dokumenter terkait pembangunan kelautan dan perikanan.
4. Layanan manajemen isu dan pemantauan opini publik terkait pembangunan kelautan dan perikanan.

5. Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka mendukung ketercapaian Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi KKP, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp10.165.260.000,00 dengan realisasi sebesar Rp10.150.376.598,00 atau mencapai 99,85%, dengan kegiatan utama yaitu peliputan dan dokumentasi, konferensi pers, publikasi melalui media massa, penyebaran informasi terkait kebijakan KKP, *Journalist Briefing*/Bincang Bahari, Media

Relation, Media Summit (Anugerah Jurnalistik Sahabat Bahari), Forum Koordinasi Kehumasan, *Town Hall Meeting*, analisa media dan monitoring pemberitaan, pengembangan strategi komunikasi, Peningkatan *Engagement* dalam rangka publikasi kebijakan dan capaian sektor kelautan dan perikanan di media sosial, forum humas dan pengelolaan media sosial, penilaian

Jabung Pranata Humas KKP. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam pencapaian indikator kinerja indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi KKP antara lain media sosial, sarana perkantoran, laptop, komputer, internet, *drive* penyimpanan *file online* dan perangkat lunak *video conference*.



Town Hall Meeting, 12 April 2023

IK4. NILAI KINERJA ANGGARAN (NKA) KKP

1. Definisi Indikator Kinerja

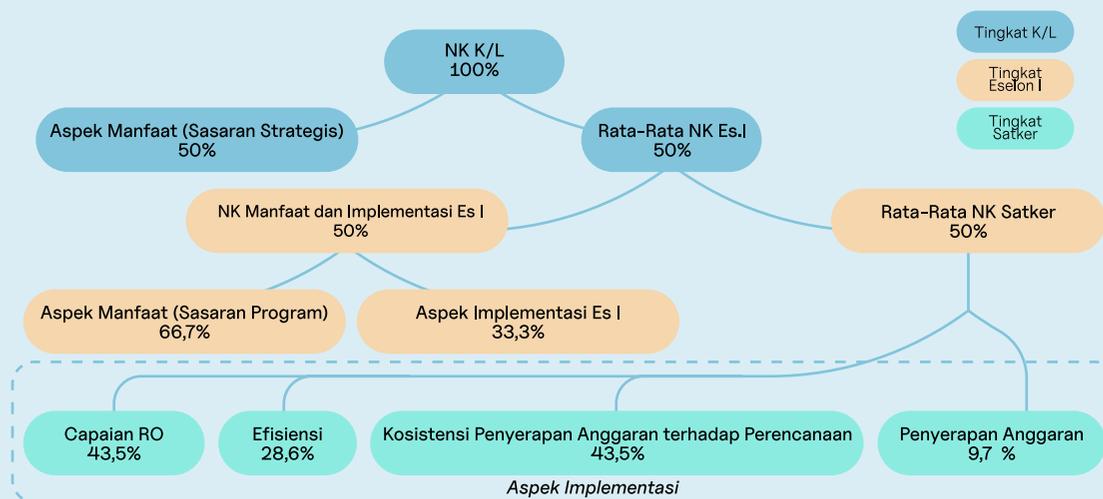
Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART DJA. Pembobotan Nilai Kinerja Anggaran KKP antara lain aspek manfaat dan implementasi 50% dan Rata-rata satker 50%. Kategori Capaian Nilai Kinerja Anggaran dibagi menjadi 5 (lima), antara lain a. Sangat Baik, apabila NKA > 90; b. Baik, apabila NKA >80 - 90; c. Cukup, apabila NKA >60 - 80; d. Kurang, apabila NKA >50 - 60; e. Sangat Kurang, apabila ≤ 50. Nilai kinerja anggaran merupakan hasil dari penilaian atas kinerja anggaran yang diukur melalui aplikasi SMART DJA. Nilai kinerja anggaran tersebut diukur dari tiga aspek sebagai berikut:

1. Aspek implementasi adalah evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya.



2. Aspek manfaat adalah evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi kinerja mengenai perubahan yang terjadi dalam pemangku kepentingan sebagai penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada program Kementerian/Lembaga.
3. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Konteks adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi Kinerja yang tertuang dalam dokumen RKA-K/L termasuk relevansinya perkembangan keadaan kebijakan Pemerintah

Secara rinci penilaian dari masing – masing aspek dan besaran bobot per level sebagai pembentuk dari capaian NKA sebagaimana pada gambar berikut :



Gambar 8. Proposi penilaian Kinerja Anggaran per level

Perhitungan per indikator dari masing – masing aspek per level sebagai pembentuk dari capaian NKA:

Perhitungan NK Satker			Perhitungan NK Unit Es. I				Perhitungan NK KL		
Indikator		Bobot	Indikator		Bobot		Indikator	Bobot	
Aspek Implementasi	Capaian RO Tingkat Satker	43,5%	Aspek Implementasi	Capaian Output Program	43,5%	33,33%	Capaian Sasaran Strategis (Aspek Manfaat)	50%	
	Efisiensi	28,6%		Efisiensi	28,6%		50%	Nilai Kinerja Unit Eselon I Rata-Rata	50%
	Konsistensi Penyerapan Anggaran Terhadap Perencanaan	18,2%		Konsistensi Penyerapan Anggaran Terhadap Perencanaan	18,2%			Nilai Kinerja KL	Total
	Penyerapan Anggaran	9,7%		Penyerapan Anggaran	9,7%				
	Nilai Kinerja Satker	Total		Capaian Kinerja Program			66,67%		
			Nilai Kinerja Satker Rata-Rata			50%			
			Nilai Kinerja Unit Eselon I			Total			

Gambar 9. Bobot Per Indikator Atas Aspek Penilaian Kinerja Anggaran Per Level



Gambar 10. Kategori Nilai Kinerja Anggaran

2. Analisa Capaian Kinerja

Target NKA KKP Tahun 2023 sebesar 86,00 dengan realisasi sebesar 95,04 atau mencapai 110,51% sesuai Nota Dinas Nomor 84/SJ.2/RC.610/I/2024 tanggal 10 Januari 2024 tentang Capaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup KKP Tahun 2023. Berdasarkan pemantauan NKA Tahun 2023 pada aplikasi SMART DJA pada tanggal 10 Januari 2024, nilai kinerja anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar 95,04 dengan kategori sangat baik dan seluruh Unit Kerja Eselon I telah mencapai target yang telah ditetapkan.

NKA KKP merupakan indikator baru di Tahun 2023 dimana sebelumnya dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal yang menjadi indikator kinerja adalah NKA Sekretariat Jenderal. Hal tersebut disebabkan adanya perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi KKP Tahun 2020-2024 sehingga merubah *cascading* indikator kinerja yang merupakan indikator pembentuk Reformasi Birokrasi General. Meskipun belum dicantumkan di Renstra Sekretariat Jenderal Tahun 2020-2024, namun capaian NKA telah didokumentasikan sejak Tahun 2019 karena NKA merupakan indikator yang dinilai ditingkat nasional oleh Kementerian Keuangan.

Tabel 19. Rincian Capaian dan Target IK-4

SPO1. TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK LINGKUP SEKRETARIAT JENDERAL												
IK-4. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) KKP												
Realisasi 2018-2022					2023				Renstra Sekretariat Jenderal 2020-2024			
2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2022-2023	Target 2023	% Capaian terhadap Target 2023	Target 2024	% Capaian terhadap Target 2024
-	94,19	85,80	95,48	95,26	86,00	95,04	110,51%	-0,25	-	-	-	-



Gambar 11. Realisasi NKA KKP dalam aplikasi SMART, Kementerian Keuangan

Smart KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Role: Pilih TA (2023) Logout

NKA Eselon I Monitoring / NKA Eselon I

Tampilkan 10 entri

Download Excel

Cari:

No.	Kode Eselon I	Eselon I	Kinerja	CSP	Penyerapan	Konsistensi	CKP	Efisiensi	Nilai Efisiensi	Rata Rata Satker
1	01	Sekretariat Jenderal	90.84	100.00	94.98	85.38	100.00	11.69	79.225	84.71
2	02	Inspektorat Jenderal	90.41	99.50	99.64	99.67	100.00	0.36	50.9	85.86
3	03	Ditjen Perikanan Tangkap	88.15	100.00	96.75	97.83	92.25	-2.75	43.125	83.07
4	04	Ditjen Perikanan Budidaya	89.77	98.51	98.76	87.28	100.00	1.07	52.675	85.85
5	05	Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	89.97	100.00	99.60	91.04	100.00	3.68	59.2	84.38
6	06	Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	90.86	100.00	98.91	96.08	100.00	5.25	63.125	85.51
7	07	Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	90.63	100.00	96.49	89.15	100.00	7.19	67.975	85.09
8	12	Badan Nisiel dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	92.77	100.00	97.95	96.57	100.00	18.02	95.05	86.29
9	13	Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	92.01	100.00	98.36	95.53	100.00	9.56	73.9	86.82

Menampilkan 1 sampai 9 dari 9 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya

Copyright © 2021 DSP DJA KEMENKEU. All rights reserved. Aplikasi SMART 3.0.0 2024-01-10 16:55:30

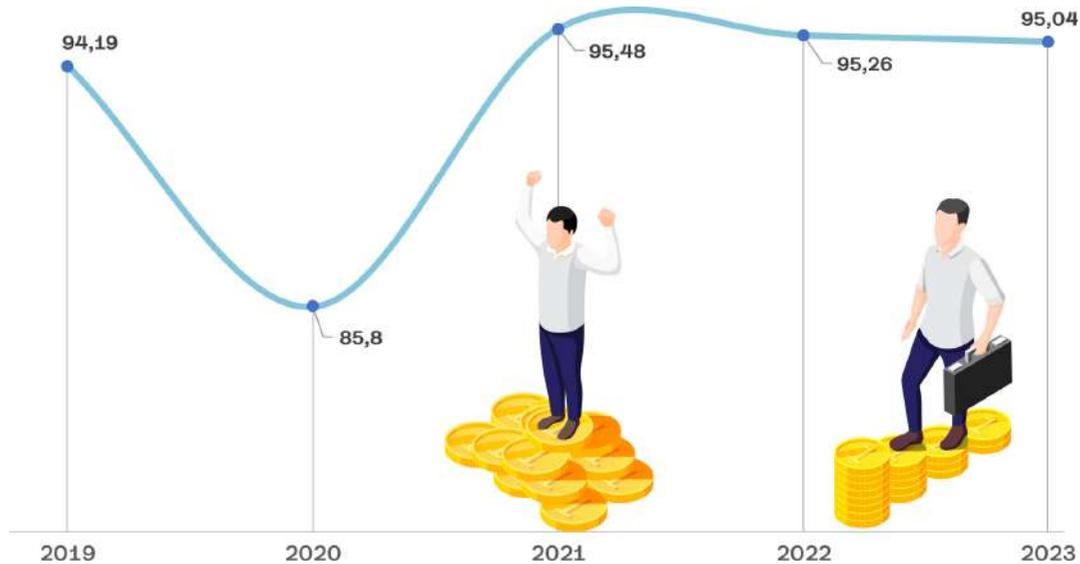
Gambar 12. Realisasi NKA Unit Kerja Eselon I dalam aplikasi SMART, Kementerian Keuangan

Faktor keberhasilan pencapaian NKA KKP disebabkan beberapa hal diantaranya:

1. Melaksanakan kegiatan Monev NKA KKP dan unit kerja eselon serta satker di lingkup KKP secara berkala.
2. Penyampaian laporan monev dan pelaporan capaian NKA kepada Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Eselon II Lingkup Sekretariat Jenderal.
3. Pendampingan dan asistensi penginputan capaian output pada aplikasi SAKTI.
4. Berkoordinasi dengan Ditjen Sistem Penganggaran (DSP) Kementerian Keuangan terkait kebijakan NKA Tahun 2024.



**TARGET NKA KKP TAHUN
 2023 SEBESAR 86,00 DENGAN
 REALISASI SEBESAR 95,04 ATAU
 MENCAPAI 110,51%**



Gambar 13. Realisasi NKA KKP 2019-2023

Meskipun telah mencapai target 2023, namun realisasi NKA mengalami penurunan sebesar -0,25% dari capaian Tahun 2022 yang disebabkan oleh :

1. Adanya ketidaksesuaian antara Rencana Penarikan Dana (RPD) halaman III DIPA dengan realisasi anggaran terutama pada satker Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sehingga menyebabkan deviasi. Hal ini menyebabkan penurunan nilai pada aspek konsistensi dengan bobot 18,2%.
2. Perubahan target kinerja pada Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan *Output* Program dan Rincian *Output* tidak diikuti perubahan pada aplikasi Krisna dan aplikasi SAKTI sehingga pembagi realisasi menggunakan target awal sedangkan ditahun berjalan terdapat kebijakan yang mempengaruhi perubahan target – target yang telah ditetapkan.
3. Masih rendahnya partisipasi pelaksana kegiatan menyampaikan progres Capaian Rincian *Output* (CRO) kepada operator yang menangani capaian *output* pada aplikasi SAKTI sehingga berdampak pada kurang tepatnya dalam penginputan CRO satker, dimana bobot dari CRO sebesar 43,5%.
4. Terdapat perubahan proses bisnis dalam penginputan CRO pada level satker, disebabkan operator SMART DJA tidak dapat melakukan koreksi atas kurang tepatnya CRO yang telah di input pada aplikasi SAKTI sehingga berdampak pada kurang tepatnya data CRO pada aplikasi SMART DJA.

3. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Keberhasilan dalam memenuhi target NKA KKP didukung beberapa hal diantaranya: kegiatan *benchmarking* dengan Kementerian Keuangan terkait dengan monev NKA di lingkungan Kementerian Keuangan arah kebijakan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Tahun 2024 sehubungan dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 pada tanggal 20 November 2023.

4. Upaya Perbaikan dan Upaya Penyempurnaan Kinerja Kedepan (Rencana Aksi)

Dalam rangka mempersiapkan capaian target NKA Tahun 2024, Sekretariat Jenderal telah berkoordinasi dengan Ditjen Sistem Penganggaran (DSP) Kementerian Keuangan. Berdasarkan hasil rapat arah kebijakan NKA Tahun 2024 terdapat reformulasi penilaian dan pengukuran NKA sebagaimana PMK 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang mengatur Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran. Berkenaan hal tersebut rencana aksi yang akan dilakukan antara lain:

1. Berkoordinasi dengan DSP Kementerian Keuangan terkait implementasi PMK 62 Tahun 2023 atas pengendalian dan pemantauan serta evaluasi kinerja anggaran.
2. Melakukan sosialisasi terkait dengan turunan turunan dari peraturan PMK 62 Tahun 2023 jika telah tersedia.
3. Melakukan penyesuaian atas manual IK, target dan pohon kinerja NKA untuk Tahun 2024 sesuai dengan kebijakan terbaru.

5. Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka mendukung ketercapaian NKA KKP, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp432.968.000,00 dengan realisasi sebesar Rp432.910.325,00 atau mencapai sebesar 99,99%, dengan kegiatan utama pendampingan/koordinasi/monitoring/pembinaan pelaksanaan anggaran, FGD/seminar/sosialisasi/*workshop* kebijakan pelaksanaan dan anggaran dalam rangka peningkatan kinerja anggaran Lingkup KKP Tahun 2023. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam pencapaian indikator kinerja NKA KKP antara lain: sarana perkantoran, *laptop*, komputer, internet, *drive* penyimpanan *file online* dan perangkat lunak *video conference*.

IK5. NILAI HASIL PENILAIAN PROPOSAL INOVASI PELAYANAN PUBLIK LINGKUP KKP

1. Definisi Indikator Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan, replikasi maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Inovasi pelayanan publik yang sudah diterapkan oleh unit kerja dapat diikuti dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021, Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) adalah kegiatan penjaringan, seleksi, penilaian, dan pemberian penghargaan yang diberikan kepada Inovasi yang telah dilakukan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan usaha milik Negara, dan badan usaha milik daerah. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023, tentang Petunjuk Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2023, tema KIPP Tahun 2023 yaitu “Peningkatan Kualitas



Pelayanan Publik Melalui Inovasi Menuju Reformasi Birokrasi yang Berdampak”. Pada KIPP Tahun 2023, terdapat perbedaan mekanisme pelaksanaannya, dimana setiap instansi dapat mendaftarkan sebanyak 30 (tiga puluh) inovasi, yang dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu inovasi kelompok umum dan kelompok khusus dengan memperoleh undangan secara langsung oleh Kementerian PAN RB.

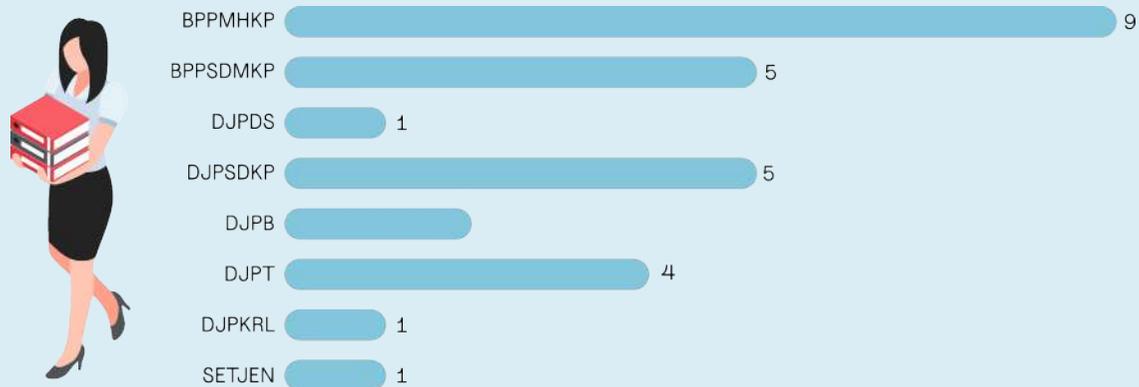
Selain itu KIPP Tahun 2023, terdapat 11 kategori inovasi, yaitu: Kesehatan, Pendidikan, Pertumbuhan ekonomi dan Kesempatan Kerja, Pengentasan Kemiskinan, Ketahanan Pangan, Pemberdayaan Masyarakat, Inklusi Sosial, Energi dan Lingkungan Hidup, Tata Kelola Pemerintahan, Penegakan Hukum dan Ketahanan Bencana.

Untuk mengikuti KIPP, setiap unit kerja mengirimkan proposal inovasi yang memuat informasi, gagasan atau ide mengenai inovasi sesuai dengan format yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK). Proposal inovasi tersebut dikirimkan kepada Tim Penilai Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan cara mengunggah proposal pada SINOVIK. Selanjutnya, tim penilai akan melakukan seleksi awal terlebih dahulu untuk menentukan inovasi kelompok yang akan diikuti pada KIPP Tahun 2023. Sedangkan untuk inovasi kelompok khusus yang diundang secara langsung oleh Kementerian PAN RB dan proposal otomatis akan di submit ke aplikasi Kementerian PAN RB oleh tim penilai internal Kementerian Kelautan dan Perikanan.

2. Analisa Capaian Kinerja

Perhitungan Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan KKP dihitung berdasarkan nilai rata-rata dari penilaian proposal inovasi yang dikirimkan kepada Tim Penilai Inovasi Pelayanan Publik Lingkup KKP yang telah diunggah pada aplikasi SINOVIK. Pada Tahun 2023 terdapat 28 proposal yang telah disubmit per Unit Kerja Eselon I sebagaimana Gambar 15.

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan KKP berdasarkan Memorandum Nomor 81/SJ.7/TU.220/I/2024 perihal Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Unit Kerja yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2023 dengan nilai realisasi sebesar 82,93. Apabila dibandingkan dengan target tahunan, maka realisasi capaian IK ini mencapai 109,77% dari target



Gambar 14. Rincian Jumlah Proposal yang Disubmit Per Unit Kerja Eselon I

Tabel 20. Capaian Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi KKP Tahun 2023

SPO1. TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK LINGKUP SEKRETARIAT JENDERAL													
IK-5. Nilai Hasil Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup KKP													
Realisasi 2018-2022					2023				Renstra KKP 2020-2024				
2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2022-2023	Target 2023	% Capaian terhadap Target 2023	Target 2024	% Capaian terhadap Target 2024	
-	-	-	-	-	75,00	82,93	110,57%	-	-	-	-	-	

yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebesar 75%. Indikator ini belum tertuang dalam Renstra Sekretariat Jenderal Tahun 2020-2024, karena di Tahun 2023 terdapat penyesuaian nomenklatur indikator dari semula di Tahun 2022 unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik dengan target 2 unit dan realisasi 2 unit yaitu inovasi *oscas fish (online scale fisheries)* di Pusdatin dan Katalog *Online Archipelago Indonesia Marine Library* di Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri. Sehingga capaian di Tahun 2023 tidak dapat dibandingkan dengan target di Renstra Sekretariat Jenderal maupun dengan tahun sebelumnya.

Faktor keberhasilan tercapainya Nilai Hasil Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup KKP antara lain :

1. Komitmen pimpinan unit kerja yang melaksanakan pelayanan publik untuk Menyusun proposal inovasi pelayanan publik dan terus melakukan perbaikan pelayanan publik
2. Pendampingan dalam menyusun proposal inovasi pelayanan publik baik dari tim penilaian internal KKP maupun tim penilai di tingkat Unit Kerja Eselon I.
3. Pemantauan, evaluasi, yang dilakukan oleh Kementerian PAN RB yang mendorong persaingan positif antar instansi dan Unit Kerja Eselon I Lingkup KKP.
4. Tersedianya rujukan nasional terkait praktik Terbaik Inovasi Pelayanan Publik Nasional yang dapat dijadikan sebagai row model inovasi.

Nilai Hasil Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup KKP tidak dapat dibandingkan dengan KL lainnya karena berdasarkan studi literatur laporan kinerja KL lainnya, beberapa KL menghitung jumlah unit kerja yang telah menerapkan inovasi pelayanan publik. Namun demikian secara substansi mempunyai fokus yang sama yaitu terkait peningkatan inovasi dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada stakeholder. Pada Tahun 2023 Kementerian PAN RB telah mengumumkan Top 45 Inovasi Pelayanan

Publik Tahun 2023 Klaster Kementerian sebagaimana Keputusan Menteri PAN RB No. 558/2023 tentang Top Inovasi Pelayanan Publik Terpuji Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD Tahun 2023 yaitu :

1. Kementerian Badan Usaha Milik Negara – Pasar Digital Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PaDi UMKM), dari BUMN untuk UMKM Indonesia.
2. Kementerian Keuangan – CEISA Barang Kiriman (*Consignment Note*): Kemudahan Impor Barang Kiriman Pekerja Migran Indonesia secara cepat, humanis dan akuntabel.
3. Kementerian Keuangan – Sistem Informasi Mineral dan Batubara Antar-Kementerian/Lembaga (SIMBARA).
4. Kementerian Pertanian – *Biochar Three in One* (BIOTRON).

Sedangkan untuk Klaster Lembaga yaitu

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan – Membangun Akuntabilitas Keuangan Desa dengan Aplikasi Siskeudes (Sistem Keuangan Desa).
2. Badan Riset dan Inovasi Nasional – Malam Batik Sawit.
3. Kepolisian Negara RI – Polisi Hebat Semarang (LIBAS).



**NILAI HASIL PENILAIAN
PROPOSAL INOVASI PELAYANAN
PUBLIK LINGKUP KKP TARGET
75,00 DENGAN REALISASI 82,93
ATAU MENCAPAI 110.57%**

3. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja Nilai Hasil Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup KKP didukung dengan adanya serangkaian kegiatan antara lain:

1. Sosialisasi pelaksanaan KIPP Tahun 2023 pada tanggal 20 Maret 2023 kepada penanggungjawab pelayanan publik di masing-masing Eselon I KKP.
2. Penetapan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 72 Tahun 2023 tentang Tim Penilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023.
3. Penilaian internal Proposal Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2023 pada tanggal 16-18 April 2023.
4. Penyampaian Hasil Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik KKP Tahun 2023 sesuai dengan Berita Acara Hasil Sidang Pleno Nomor B.1531/SJ.7/TU.220/IV/2023 tanggal 18 April 2023.
5. Telah didokumentasikan 28 (dua puluh delapan) proposal inovasi kelompok umum dan 3 (dua) proposal inovasi kelompok khusus yang memenuhi nilai di atas 75 (tujuh puluh lima) yang telah disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk ikut serta dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Proposal kategori umum, terdiri atas:
 - 1) Katalog *Daring Archipelago* Indonesia *Marine Library* dalam Mendukung Penguatan Literasi Kelautan dan Perikanan.
 - 2) PASTIQu (Pelayanan Sistem Terpadu dan Terintegrasi).
 - 3) SILAT (Sistem Informasi Izin Layanan Cepat).
 - 4) FUJI LESTARI (*Fish-Apartment* untuk Jadikan Laut Sehat, Nelayan Hebat dan Mandiri).
 - 5) BULIK MANIS IDAMAN NELAYAN (Bubu Lipat Ikan Mantap dan Istimewa Idaman Nelayan).
 - 6) Smart Fishing 4.0.
 - 7) PUSTINA (Patin Unggul Sakti Nusantara).
 - 8) SMART KIT.
 - 9) DIGITALISASI GEMARIKN-Akses Jadi Mudah dan Menyenangkan.
 - 10) Si Ikan Berprotein (Sistem Perizinan Berusaha Pengolahan Ikan Berbasis Risiko, Post Audit, dan Terintegrasi).
 - 11) GISELA (GERAI INVESTASI DAN LAYANAN USAHA);
 - 12) Invapro Kape (Inkubasi Bisnis Inovasi Produk Kelautan dan Perikanan).
 - 13) DISKON ASIK (Digitalisasi SKP *Online* yang Akuntabel, Suportif, Inovatif, dan Kreatif).
 - 14) Kartu SALMON (Sistem Aktivasi Lacak dan Monitor).
 - 15) OKE SOBAT (Olah Kembali Sampah Organik Bersama mAgoT).
 - 16) PROPOSAL INOVASI PELAYANAN PUBLIK MA'KLIK.
 - 17) PIONs (*Polytechnic Integrated Online System*).
 - 18) SiLajur (Sistem Pelayanan Jurnal Ilmiah).
 - 19) SiPintar BPPP Ambon (Sistem Pelatihan Terintegrasi Berbasis *Smartphone* (Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon).
 - 20) SKUTER (Sistem Layanan Ekspres untuk Pelintas Perbatasan).
 - 21) POK SITI (Media Pelayanan *Online* Karantina Sempel Terintegrasi) Solusi Mempercepat Pelayanan Sertifikasi Ekspor Domestik.
 - 22) INOVASI PELAYANAN PUBLIK BALAI KIPM SURABAYA I PANCEN OKE (Pelayanan Praktis, Cepat, dan Efisien).
 - 23) SIPELINTAS (Sistem Pelayanan Integrasi Perbatasan).
 - 24) SAOLIN-Bukan untuk sekedar kewajiban, tapi sudah menjadi kebutuhan.
 - 25) SIUDAUNI (Sistem Informasi UPT KIPM Padang untuk Pelayanan Digital).
 - 26) SPECTRALINE (Sistem Pelayanan Ekspor Cepat, Terintegrasi, Akuntabel, Berbasis *Online*).
 - 27) DeBest Wayan Sadar Diri (Dengan Bali Ekosistem Pengawasan dan Pelayanan Berdasarkan Pemeriksaan Data *Riil*).
 - 28) IKN LAISQU (aplikasi kantor layanan informasi *quarantine*) di Balai KIPM Balikpapan.



- b. Proposal kategori khusus, terdiri atas:
 - 1) Pelayanan Sertifikasi yang Cepat dan Efisien melalui Pelayanan Karantina Ikan dan Mutu Hasil Perikanan PASTI MESRA (Profesional Akuntabel Santun Transparan Inovatif dalam Melayani pengguna dengan SukaRelA).
 - 2) *One Stop Service Quarantine Plus (OSS-Q+)* Distribusi Hasil Perikanan Semakin Cepat, Hemat dan Efisien.
 - 3) PuGar (Pengembangan Usaha Garam Rakyat).

4. Upaya Perbaikan dan Upaya Penyempurnaan Kinerja Kedepan (Rencana Aksi)

Berdasarkan hasil evaluasi Tahun 2023, upaya perbaikan dan penyempurnaan yang akan dilaksanakan kedepan antara lain :

1. Menyampaikan informasi terkait indikator kinerja *mandatory* inovasi pelayanan publik kepada Unit Kerja Eselon I.
2. Menyiapkan SK Tim Penilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan KKP.
3. Mendorong Unit Kerja Eselon I menyiapkan proposal Inovasi Pelayanan Publik.
4. Melakukan penginputan proposal inovasi pelayanan publik pada aplikasi SINOVIK yang dikelola oleh Kementerian PAN RB.

5. Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka mendukung ketercapaian Nilai Hasil Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup KKP, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp69.020.000,00 dengan realisasi sebesar Rp63.295.900,00 atau mencapai sebesar 99,82%, dengan kegiatan utama Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik KKP, sosialisasi dan pendampingan penyusunan proposal inovasi, penginputan proposal inovasi pelayanan publik pada aplikasi SINOVIK yang dikelola oleh Kementerian PAN RB. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam pencapaian indikator kinerja Nilai Hasil Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup KKP antara lain sarana perkantoran, laptop, komputer, *internet*, *drive* penyimpanan file *online* dan perangkat lunak *video conference*.





IK 6. PERSENTASE UNIT KERJA YANG MENERAPKAN MANAJEMEN PENGETAHUAN YANG TERSTANDAR LINGKUP KKP

1. Definisi Indikator Kinerja

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Perhitungan indikator berasal dari penilaian komponen keaktifan dalam system informasi manajemen pengetahuan melalui aplikasi *Collaboration Office*.

Penghitungan keaktifan dilakukan setiap triwulanan dengan komposisi minimal mendapatkan 3 poin *upload* keaktifan dan maksimal 4 poin keaktifan sesuai dengan bobot poin yang telah ditentukan. Pembobotan yang dimaksud antara lain :

1. Berbagi pengetahuan yang berasal dari kegiatan dengan memenuhi unsur 4W1H dengan sumber pengetahuan jelas akan poin 0.5.
2. Berbagi pengetahuan yang dituangkan dalam bentuk infografis dengan sumber pengetahuan yang jelas akan mendapatkan poin 1.
3. Berbagi pengetahuan yang dituangkan dalam bentuk konten video/jurnal akan mendapatkan poin 3.

Pengukuran capaian dilakukan melalui : 1). menggunakan aplikasi Manajemen Pengetahuan yang ditunjuk (*Collaboration Office*), 2). pengukuran dilakukan setiap triwulan, dengan rincian Penghitungan keaktifan dilakukan setiap triwulan dengan komposisi minimal mendapatkan 3 poin *upload* keaktifan dan maksimal 4 poin *upload*, keaktifan sesuai dengan bobot poin yang telah ditentukan, 3). pengukuran Unit Kerja Eselon I dihitung dengan berdasarkan pejabat pusat eselon



2, 4). poin diberikan untuk postingan yang memiliki unsur pengetahuan sesuai dengan kriteria pembobotan dan 5). data capaian diterbitkan oleh Pusdatin dengan menyediakan data hasil rekapan pejabat yang telah aktif pada setiap triwulan untuk diolah menjadi capaian untuk KKP dan Unit Kerja Eselon I.

Pada Tahun 2023 terdapat perubahan penerapan Manajemen Pengetahuan yang sudah mulai terintegrasi dalam Portal *Collaboration Office* pada laman <https://portal.kkp.go.id>. Sejak periode Triwulan III (Juli s.d. September 2023) lingkup KKP, pejabat yang akan dinilai keaktifannya adalah Pejabat setingkat Eselon II karena belum semua unit kerja menetapkan Tim Kerja sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023.

Dengan adanya perubahan penerapan Manajemen Pengetahuan ini maka terdapat perubahan penilaian komponen penilaian Manajemen Pengetahuan, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

2. Analisa Capaian Kinerja

Target Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup KKP Tahun 2023 sebesar 92 dengan realisasi sebesar 112,59 atau mencapai 120% dalam aplikasi kinerjaku. Hal ini disebabkan capaian maksimal dalam aplikasi kinerjaku adalah sebesar 120%. Indikator kinerja ini belum dapat dibandingkan dengan Renstra Sekretariat Jenderal Tahun 2020-2024 dan tahun-tahun sebelumnya karena di Tahun 2023 yaitu pada November 2023 terdapat penyesuaian nomenklatur indikator kinerja semula Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen

Tabel 21. Rincian Capaian dan Target IK-6

SP.01. TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK LINGKUP SEKRETARIAT JENDERAL												
IK-6. Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup KKP												
Realisasi 2018-2022					2023				Renstra KKP 2020-2024			
2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2022-2023	Target 2023	% Capaian terhadap Target 2023	Target 2024	% Capaian terhadap Target 2024
-	-	-	-	-	92,00	112,59	120%		-	-	-	-

Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Sekretariat Jenderal menjadi lingkup KKP. Namun demikian secara substansi sama, yang membedakan adalah ruang lingkup unit yang dilakukan perhitungan, media sharing informasi yang semula di Tahun 2022 menggunakan bitrix menjadi menggunakan *coolaboration office* di Tahun 2023 serta terdapat penyesuaian perhitungan capaian di Tahun 2023 yang menghilangkan menu *upload* dokumen atau hanya menghitung keaktifan dalam berbagi pengetahuan. Indikator Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup KKP belum dapat dibandingkan dengan KL terkait, berdasarkan hasil studi terhadap laporan kinerja KL terkait belum ditemukan indikator kinerja yang serupa dengan indikator Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup KKP dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

1. Komitmen pimpinan untuk melakukan berbagi pengetahuan melalui *collaboration office*, sehingga dapat berbagi pengetahuan dengan seluruh pegawai di lingkungan KKP.
2. Pemantauan dan evaluasi capaian yang dilakukan secara berkala sehingga sebeiun periode pengukuran capaian dapat diketahui unit kerja yang

belum melakukan berbagi pengetahuan.

3. Sosialisasi tentang penggunaan *coolaboration office* yang dilakukan sehingga mempermudah pengguna aplikasi untuk berbagi informasi.
4. Adanya layanan *help desk* di aplikasi *coolaboration office* sehingga apabila ada kendala dan hambatan di aplikasi dapat langsung ditanyakan.

3. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup KKP didukung oleh beberapa kegiatan antara lain:

1. Sosialisasi penggunaan portal *collaboration office* Manajemen Pengetahuan kepada Unit Kerja Eselon I di lingkup pusat.
2. Menyampaikan adanya perubahan implementasi dalam pengisian *bitrix* menjadi menggunakan portal *collaboration office* melalui Memorandum Nomor 2658/SJ.7/TU.210/IX/2023 tanggal 4 September 2023, perihal Implementasi Portal *Collaboration Office* Triwulan 3 Tahun 2023 dan Penyampaian Perubahan Manual IK Manajemen Pengetahuan.
3. Menyampaikan hasil capaian IK Manajemen Pengetahuan Terstandar KKP Triwulan III Tahun 2023 melalui Nota Dinas dan Memorandum ke seluruh Unit Kerja Eselon I dan II.

4. Upaya Perbaikan dan Upaya Penyempurnaan Kinerja Kedepan (Rencana Aksi)

Berdasarkan hasil evaluasi Tahun 2023, upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja yang akan dilakukan kedepan antara lain :

1. Melakukan sosialisasi Portal *Collaboration Office* Manajemen Pengetahuan kepada seluruh pejabat Eselon I dan Eselon II, serta Ketua Tim Pokja.
2. Melakukan koordinasi dengan PIC melalui *whatsapp group*.
3. Melakukan rapat monitoring dengan PIC Unit Kerja Eselon I sebelum periode pengukuran capaian berakhir.
4. Penghitungan realisasi Manajemen Pengetahuan dan Monitoring Portal *Collaboration Office* Manajemen Pengetahuan.

5. Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka mendukung ketercapaian Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup KKP tidak menggunakan alokasi anggaran khusus karena sebagian besar kegiatan koordinasi, pemantauan dan evaluasi dilakukan melalui penyampaian nota dinas dan memorandum kepada Unit Kerja Eselon I, *zoom meeting*, *group whatsapp* dengan kegiatan utama yaitu sosialisasi Portal *Collaboration Office* Manajemen Pengetahuan kepada seluruh pejabat Eselon I dan Eselon II, serta Ketua Tim Pokja, koordinasi dengan PIC melalui *whatsapp group*, monitoring dengan PIC Unit Kerja Eselon I dan penghitungan realisasi Manajemen Pengetahuan dan Monitoring Portal *Collaboration Office* Manajemen Pengetahuan. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam pencapaian indikator kinerja Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup KKP antara lain aplikasi *collaboration office*, sarana perkantoran, laptop, komputer, *internet*, *drive* penyimpanan file *online* dan perangkat lunak *video conference*.





IK7. BATAS TERTINGGI PERSENTASE NILAI TEMUAN LHP BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN (LK)

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK Sekretariat Jenderal merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

1. Definisi Indikator Kinerja

Laporan Keuangan KKP setiap tahun selalu *direview* oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yaitu Inspektorat Jenderal dan diperiksa secara seksama oleh Aparat Pengawasan Eksternal Pemerintah yaitu BPK-RI. Pengawasan dan pemeriksaan ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan *good governance* agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang kekuasaan.

Informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Obyek dari capaian IK Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Sekretariat Jenderal dibandingkan Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal adalah Nilai Temuan atas Laporan Keuangan yang disajikan pada LHP BPK-RI atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan pada periode pengukuran. Penilaian capaian ini dilaksanakan setahun sekali dan diukur dari besarnya presentase nilai temuan



BATAS TERTINGGI PERSENTASE NILAI TEMUAN LHP BPK ATAS LK SETJEN DIBANDINGKAN REALISASI ANGGARAN SEKRETARIAT JENDERAL DITARGETKAN $\leq 0,5\%$ DENGAN REALISASI SEBESAR 0,01 PERSEN

LHP BPK Atas LK Sekretariat Jenderal dibandingkan dengan jumlah realisasi anggaran Sekretariat Jenderal Tahun Anggaran 2022 dengan target $\leq 0,5$.

Batas tertinggi jumlah nilai temuan atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2022 (*audited*) dengan target $\leq 0,5$, dengan realisasi sebesar 0,01 atau telah mencapai 198% atau 120% sesuai perhitungan dalam aplikasi kinerjajaku, karena capaian maksimal dalam aplikasi kinerjajaku sebesar 120%. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya Batas tertinggi jumlah nilai temuan atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2022 semakin menurun dan hal ini merupakan hal positif mengingat capaian indikator ini bersifat *minimize* dimana semakin kecil semakin baik. Perhitungan capaian Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Sekretariat Jenderal dibandingkan Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 22. Rincian Capaian dan Target IK-7

SP.01. TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK LINGKUP SEKRETARIAT JENDERAL												
IK-7. Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Sekretariat Jenderal dibandingkan Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal												
Realisasi 2018-2022					2023				Renstra KKP 2020-2024			
2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2022-2023	Target 2023	% Capaian terhadap Target 2023	Target 2024	% Capaian terhadap Target 2024
0,62	0,01	0,02	0,1	0	0,50	0,01	120.00% (dalam aplikasi kinerjajaku)	≤1	120.00%	≤1	120.00%	-

Apabila dibandingkan dengan capaian Unit Kerja Eselon I capaian Sekretariat Jenderal berada diatas capaian KKP dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 23. Perbandingan Capaian Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Sekretariat Jenderal dibandingkan Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal dengan Unit Kerja Eselon I Lingkup KKP

No	UNIT KERJA ESELON I	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Sekretariat Jenderal	≤0,5	0,01	198
2	DJ Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	≤0,5	0,19	162
3	DJ Perikanan Tangkap	≤0,5	0,17	166
4	DJ Perikanan Budidaya	≤0,5	0,38	124
5	DJ PSDKP	≤0,5	0,03	194
6	DJPDS	≤0,5	0,26	148
7	BPPSDM KP	≤0,5	0,003	199,4
8	BPPMHKP	≤0,5	0	200
9	Inspektorat Jenderal	≤0,1	0	200
	KKP	≤0,1	0,12	188

Ketercapaian indikator Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Sekretariat Jenderal dibandingkan Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal didukung beberapa faktor antara lain:

1. Komitmen pimpinan untuk mengawal pelaksanaan kegiatan melalui penyusunan perencanaan yang matang, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan yang berjenjang dan berkala.
2. Seluruh Unit Kerja telah memastikan penyajian Laporan Keuangan atas seluruh transaksi telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
3. Menerapkan, melakukan penilaian, serta melaksanakan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (PIPK) yang bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa Pelaporan Keuangan dilaksanakan dengan pengendalian intern yang memadai.
4. Melakukan monitoring dan/atau pendampingan atas penyusunan laporan keuangan pada seluruh unit kerja sesuai kebutuhan.
5. Pelaksanaan reviu Laporan Keuangan oleh Inspektorat Jenderal selaku APIP.
6. Melakukan koreksi/revisi atas angka dalam komponen laporan keuangan maupun memperbaiki pengungkapan atas hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Laporan Keuangan sesuai dengan hasil monitoring, reviu APIP maupun hasil audit BPK RI atas laporan keuangan unaudited.
7. Menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan kepada BPK RI sesuai dengan ketentuan.
8. Memenuhi permintaan dokumen Pemeriksaan BPK RI apabila terdapat permintaan dokumen.

2. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Sekretariat Jenderal dibandingkan Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal didukung dengan pelaksanaan kegiatan antara lain :

1. Pembahasan Koreksi Internal Laporan Keuangan Tahun Anggaran Tahun 2022 *Audited* di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
2. Koordinasi dengan Inspektorat Jenderal dalam rangka pemantauan penyampaian konsep temuan pemeriksaan dari Tim BPK RI atas Laporan Keuangan KKP Tahun 2022.
3. Pembahasan tindak lanjut konsep Temuan Pemeriksaan BPK-RI Tahun Anggaran 2022 di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan menyelenggarakan pembahasan tindak lanjut konsep Temuan Pemeriksaan dengan APK APBN.
4. Pembahasan Koreksi Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 *Audited* lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Tim BPK RI.
5. Koordinasi ataskoreksi penyusunan Laporan Keuangan LPMUKP Tahun Anggaran 2022 *Audited*, Dalam rangka melakukan koreksi atas penyusunan Laporan Keuangan LPMUKP Tahun Anggaran 2022 *Audited* telah dilaksanakan rapat pembahasan sebanyak 2 kali, yaitu: 1) menindaklanjuti memorandum Kepala Biro Keuangan terkait pembahasan jurnal koreksi pada satuan kerja LPMUKP; dan 2) pembahasan bersama dengan tim Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Tim BPK RI yang menyepakati beberapa hal, antara lain: kesesuaian data Piutang yang belum tercatat atau lebih dicatat akan disesuaikan dengan koreksi jurnal berdasarkan perhitungan rekapitulasi buku piutang nasabah, Data Pendapatan yang tercatat di validasi dari hasil rekonsiliasi data bank dan mengkoreksi hasil perhitungan bunga dan kebijakan pendapatan, Penyisihan Piutang perlu dilakukan perhitungan ulang sesuai kualitas piutang dan jatuh tempo, Perlu dilakukan pemeriksaan kembali terhadap kesalahan rekening Pihak ke 3 dan penerimaan lain-lain, dan Koreksi beban penyisihan Piutang PNBP.
6. Pemantauan dan evaluasi penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Inspektorat Jenderal dan BPK RI lingkup BLU LPMUKP

7. Pembahasan Lanjutan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI untuk mereviu atas klausul Perjanjian Penggunaan Sebagian Tanah/Bangunan di Kawasan Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) dan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) yang diselenggarakan pada 6 November 2023.
8. Pembahasan Progres Penyelesaian Penetapan Informasi Kerugian Negara pada Satuan Kerja pada 7 November 2023.
9. Monitoring penyelesaian tindak lanjut temuan pemeriksaan Inspektorat Jenderal pada Satker Lingkup Sekretariat Jenderal pada 27 November 2023.
10. Monitoring penyelesaian tindak lanjut temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan pada 4 Desember 2023.

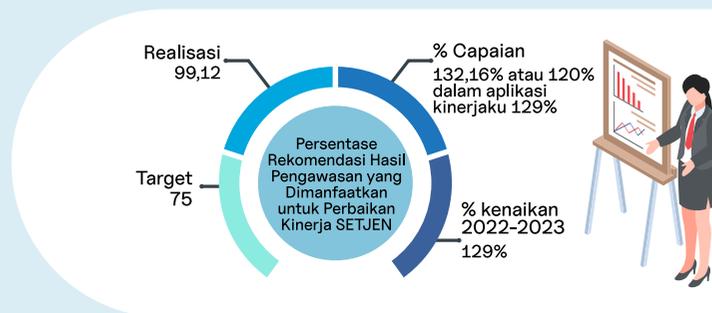
3. Upaya Perbaikan dan Upaya Penyempurnaan Kinerja Kedepan (Rencana Aksi)

Berdasarkan hasil evaluasi Tahun 2023, upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja yang akan dilakukan kedepan antara lain :

1. Pendampingan Audit atas Laporan Keuangan oleh APIP/Auditor Eksternal.
2. Meningkatkan koordinasi dengan Tim BPK RI, Inspektorat Jenderal, dan Unit Eselon I dalam rangka penyelesaian tindak lanjut rekomendasi.
3. Monitoring penyelesaian tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK RI.
4. Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sehubungan dengan indikator kinerja ini dibutuhkan anggaran sebesar Rp23.151.400,00 dengan realisasi sebesar Rp23.151.400,00 atau mencapai 99,98% dengan kegiatan utama yaitu kegiatan rapat dan koordinasi yang intensif secara rutin, monitoring atas kualitas Laporan Keuangan melalui aplikasi e-rekon LK dan MonSAKTI dan proses penyusunan Laporan Keuangan. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam pencapaian Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK RI Atas LK Sekretariat Jenderal dibandingkan Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal antara lain sarana perkantoran, laptop, komputer, *internet*, *drive* penyimpanan file *online* dan perangkat lunak *video conference*.

IK 8. PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN YANG DIMANFAATKAN UNTUK PERBAIKAN KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL



1. Definisi Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Presentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal merupakan suatu ukuran kuantitatif yang mencerminkan Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Sekretariat Jenderal berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang telah ditindaklanjuti (berstatus tuntas) oleh Unit Kerja Eselon II di lingkup Sekretariat Jenderal. Obyek capaian IK Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal adalah rekomendasi yang terbit pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi Inspektorat Jenderal. Penilaian capaian ini diukur dari jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal

KKP yang telah ditindaklanjuti oleh Unit Kerja Eselon 2 di lingkup Sekretariat Jenderal secara tuntas dengan target capaian sebesar minimal 75% selama periode pengukuran. LHP Inspektorat Jenderal yang menjadi sasaran capaian IK Presentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal Tahun 2023 adalah Laporan Hasil Audit yang terbit pada bulan Oktober 2022 s.d September 2023 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas sampai dengan 30 Desember 2023.

2. Analisa Capaian Kinerja

Pada Tahun 2023, Inspektorat Jenderal telah melakukan beberapa kali audit di lingkup Sekretariat Jenderal dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 24. Daftar Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang menjadi target penilaian capaian IK “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja, Lingkup Sekretariat Jenderal” Tahun 2023

No	UNIT KERJA	LAPORAN HASIL PENGAWASAN	JUMLAH REKOMENDASI
1	Biro Umum dan PBJ	Surat Hasil Evaluasi (SHE) Harga Satuan Pekerjaan (HSP) Tambah dan Volume Pekerjaan Kurang pada Pekerjaan Renovasi Ruang Kerja Inspektorat Jenderal KKP Lantai 2 dan 4 GMB III terkait PBJ TA 2022 oleh Biro Umum dan PBJ	2
2	Biro Keuangan	SHE Implementasi MR Tahun Anggaran 2023 Pada Satker Lingkup Sekretariat Jenderal	1
3	Biro Keuangan	Surat Hasil Reviu (SHR) Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Tahun 2022 Lingkup Sekretariat Jenderal	3
4	LPMUKP	SHR LK LPMUKP (BA BUN 999.03) Tahun 2022	1
5	Biro Umum dan PBJ	SHR Pembayaran Jeda Waktu Sewa Pemanfaatan BMN pada BUPBJ Sekretariat Jenderal KKP	2

No	UNIT KERJA	LAPORAN HASIL PENGAWASAN	JUMLAH REKOMENDASI
6	Pusdatin	Hasil Probit Audit Tahap Perencanaan dan Persiapan Pemilihan Pengadaan Pembangunan War Room dan Otomatisasi Proses Bisnis Digital KKP TA 2023 pada Pusdatin Sekretariat Jenderal KKP	4
7	Biro Umum dan PBJ	Hasil Probit Audit Tahap Perencanaan dan Persiapan PBJ Tahun 2023 pada BUPBJ	6
8	Biro Umum dan PBJ	SHR PAPBJ Sekretariat Jenderal TW II Tahun 2023	3
9	Biro SDMAO	LHA Kinerja Tahun Anggaran 2022-2023 pada Biro SDMAO	16
10	Biro Keuangan	LHA Kinerja pada Biro Keuangan Tahun Anggaran 2022 - 2023	8
11	Biro Hukum	LHA Kinerja Tahun Anggaran 2022-2023 pada Biro Hukum	15
12	Biro Perencanaan	SHR Pembayaran Termin 4, 5 dan 6 Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Hibah Pemerintah Jepang pada Biro Perencanaan	1
13	LPMUKP	SHR LK LPMUKP (BA BUN 999.03) Semester I Tahun 2023	5
14	Biro Perencanaan	SHE Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 pada Sekretariat Jenderal KKP	4
15	LPMUKP	Audit Kinerja TA 2022-2023 pada Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU-LPMUKP)	18
16	Biro Perencanaan	Hasil Reviu RKA-K/L (pagu indikatif) Tahun Anggaran 2024 pada Sekretariat Jenderal KKP	5
17	Biro Umum dan PBJ	Hasil Reviu Rencana Kebutuhan BMN Tahun Anggaran 2025 Lingkup Sekretariat Jenderal KKP	1
	LPMUKP		1
18	Biro SDMAO	Hasil Evaluasi Kepegawaian Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan	2
	Biro Hukum		1
19	BHKLN	Hasil Evaluasi Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2022-2023 pada Biro Umum dan PBJ Sekretariat Jenderal	1
	Biro Umum dan PBJ		2
20	Pusdatin	Hasil Evaluasi Sistem Informasi Sumber Daya KP Terintegrasi yang Operasional Tahun Anggaran 2022-2023 pada Pusdatin	3
21	Biro SDMAO	Hasil Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan pada Sekretariat Jenderal	6
22	Biro Umum dan PBJ	Hasil Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa Triwulan III Tahun 2023 pada Sekretariat Jenderal	2
Jumlah Rekomendasi			113

Sampai dengan berakhirnya penilaian capaian IK Tahun 2023, masih terdapat satu rekomendasi yang belum diselesaikan oleh LPMUKP terkait Pengadaan Pengembangan Aplikasi Akuntansi/e-Debitur Tahun Anggaran 2022 Tidak Efektif. Berdasarkan penyelesaian rekomendasi-rekomendasi tersebut maka capaian IK dari masing-masing Unit Eselon II lingkup Sekretariat Jenderal Tahun 2023 sebagaimana tersaji dalam Tabel 29.

Realisasi Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Sekretariat

Jenderal Tahun 2023 sebesar 99,12% dari target sebesar 75% atau telah mencapai 132,16% atau 120% dalam aplikasi kinerjaku, mengingat capaian maksimal dalam aplikasi kinerjaku sebesar 120%. Apabila dibandingkan realisasi Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 129% dan apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Sekretariat Jenderal sebesar 80% telah mencapai 123,90%. Apabila dibandingkan dengan realisasi KKP sebesar 91,52%, realisasi Sekretariat Jenderal masih berada diatas KKP, sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi Unit Kerja Eselon I Lingkup KKP capaiannya adalah sebagai dalam Tabel 30.

Tabel 25. Rekapitulasi Capaian IK “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja” Lingkup Sekretariat Jenderal Tahun 2023

No	UNIT KERJA	JUMLAH REKOMENDASI	TINDAK LANJUT (TUNTAS)	TUNTAS %	SISA REKOMENDASI	SISA REKOMENDASI %
1	Biro Perencanaan	10	10	100,00	0	00,00
2	Biro Keuangan	12	12	100,00	0	00,00
3	Biro Umum	18	18	100,00	0	00,00
4	Biro Hukum	16	16	100,00	0	00,00
5	Biro SDMAO	24	24	100,00	0	00,00
6	Biro Humas dan KLN	1	1	100,00	0	00,00
7	PUSDATIN	7	7	100,00	0	00,00
8	LPMUKP	25	24	96,00	1	04,00
9	BPISDKP	0	0	100,00	0	00,00

Tabel 26. Rekapitulasi Capaian IK “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja” Lingkup KKP Tahun 2023

No	UNIT KERJA	JUMLAH REKOMENDASI	TINDAK LANJUT (TUNTAS)	TUNTAS %	SISA REKOMENDASI	SISA REKOMENDASI %
1	Sekretariat Jenderal	113	112	99,12	1	0,88
2	BPPSDMKP	393	339	86,26	54	13,74
3	Ditjen Perikanan Tangkap	68	301	81,79	67	18,21
4	Ditjen PSDKP	140	140	100	-	-
5	Ditjen Perikanan Budi Daya	575	549	95,48	26	4,52
6	Ditjen PKRL	541	525	97,04	16	2,96
7	Ditjen PDSPKP	132	123	93,18	9	6,82
8	BPPMHKP	390	342	87,69	48	12,31
9	Inspektorat Jenderal	120	106	88,33	14	11,67
	KKP	2.772	2.537	91,52	235	8,48

Sumber: Nota Dinas Sesitjen Nomor 106/ITJ.O/TU.140/I/2024 tanggal 11 Januari 2024 hal Capaian Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja” Lingkup KKP Tahun 2023

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

1. Komitmen pimpinan untuk mengawal pelaksanaan kegiatan melalui penyusunan perencanaan yang matang, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan yang berjenjang dan berkala serta menindaklanjuti rekomendasi dari Inspektorat Jenderal atas hasil reuiu, audit dan lain-lain.
2. Memantau penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal.
3. Koordinasi dengan Inspektorat I untuk penyelesaian rekomendasi serta menyusun *timeline* penyelesaian rekomendasi.
4. Telah disusun rencana aksi penyelesaian rekomendasi sesuai dengan *timeline* yang telah disepakati.
5. Monitoring dan evaluasi terkait kendala dan kesulitan yang dihadapi dan membahas solusi terhadap LHP.

Tabel 27. Rincian capaian dan target Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Sekretariat Jenderal

SP.01. TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK LINGKUP SEKRETARIAT JENDERAL												
IK-8. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Sekretariat Jenderal												
Realisasi 2018-2022					2023				Renstra KKP 2020-2024 (Permen KP 57/2020)			
2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2022- 2023	Target 2023	% Capaian terhadap Target 2023	Target 2024	% Capaian terhadap Target 2024
-	82	70,5	100	97,86	75	99,12	132,16% atau 120% dalam aplikasi kinerjaku 129%	129%	75	132,16%	80	123,90%

3. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Sekretariat Jenderal didukung pelaksanaan kegiatan antara lain :

1. Rapat koordinasi penyelesaian tindak lanjut temuan pemeriksaan Inspektorat Jenderal pada Satker lingkup Sekretariat Jenderal secara triwulanan dengan mengidentifikasi permasalahan dalam penyelesaian tindak lanjut.
2. Monitoring penyelesaian tindak lanjut temuan pengawasan Inspektorat Jenderal pada Unit Kerja lingkup Sekretariat Jenderal sesuai dengan rencana aksi yang telah disepakati pada rapat tindak lanjut temuan pemeriksaan Inspektorat Jenderal pada satker lingkup Sekretariat Jenderal.

4. Upaya Perbaikan dan Upaya Penyempurnaan Kinerja Kedepan (Rencana Aksi)

Berdasarkan hasil evaluasi, untuk perbaikan dan sebagai upaya penyempurnaan agar Hasil pengawasan telah dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja oleh seluruh unit kerja sehingga tidak terjadi temuan berulang, beberapa hal yang akan dilakukan antara lain :

1. Melaksanakan rapat secara berkala untuk memantau penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal.
2. Koordinasi dengan Inspektorat I untuk penyelesaian rekomendasi serta menyusun *timeline* penyelesaian rekomendasi.
3. Menyusun rencana aksi penyelesaian rekomendasi sesuai dengan *timeline* yang telah disepakati.
4. Monitoring dan evaluasi terkait kendala dan kesulitan yang dihadapi dan membahas solusi terhadap LHP.

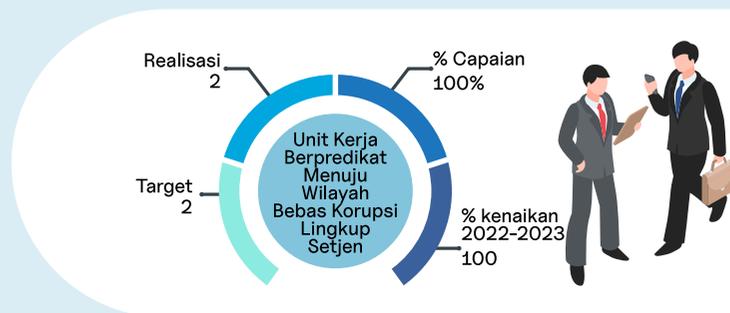
5. Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sehubungan dengan indikator kinerja ini dibutuhkan anggaran sebesar Rp221.995.000,00 dengan realisasi sebesar Rp218.969.103,00 atau mencapai 98,64% dengan kegiatan utama yaitu asistensi penyelesaian tindak lanjut rekomendasi LHP APIP dan Ekstrenal Lingkup

Sekretariat Jenderal dan rekonsiliasi perkembangan tindak lanjut LHP pengawasan internal dan eksternal lingkup Sekretariat Jenderal. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam pencapaian indikator ini antara lain sarana perkantoran, laptop, komputer, *internet*, *drive* penyimpanan file *online* dan perangkat lunak *video conference*.



IK9. UNIT KERJA BERPREDIKAT MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI LINGKUP SEKRETARIAT JENDERAL



1. Definisi Indikator Kinerja

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) merupakan sebutan/predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat indikator hasil WBK serta memperoleh hasil penilaian indikator proses di atas 75 pada Zona Integritas (ZI). Selain itu, untuk mencapai predikat WBK suatu unit kerja juga harus memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas laporan keuangannya. Nilai ini diperoleh dari hasil penilaian Tim Penilai Nasional dari Kementerian PAN RB. Apabila Tim Penilai Nasional (TPN) tidak melakukan penilaian terhadap seluruh unit kerja yang diusulkan KKP, maka tim penilai internal KKP dapat melakukan penilaian terhadap Kunit kerja yang tidak dinilai TPN sesuai dengan pedoman dari Kementerian PAN RB. Unit yang diarahkan

berpredikat WBK diusulkan oleh Sekretaris Jenderal. Capaian Kinerja Tahun 2023 dihitung dari akumulasi jumlah unit kerja yang berpredikat menuju WBK sampai dengan 2023.

Adapun menuju wilayah bebas korupsi adalah sebuah upaya buntut membangun program Reformasi Birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Syarat untuk menjadi unit kerja WBK dan WBBM berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 52 Tahun 2014 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 28. Syarat untuk menjadi Unit Kerja WBK dan WBBM berdasarkan Permen PAN RB No 52 Tahun 2014

SYARAT	WBK	WBBM
Nilai Total	75	85
Nilai Minimal Pengungkit	40	48
Bobot nilai minimal per area pengungkit	60%	75%
Nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal	18,50	18,88
Nilai sub komponen “Survei Persepsi Anti Korupsi” Minimal	13,50 (survey 3,60)	13,88 (survey 3,70)
Nilai sub komponen “Persentasi TLHP” minimal	5,0	5,0
Nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal	15 (survey 3,00)	17 (survey 3,40)

Pengukuran capaian IK Unit Kerja yang memenuhi persyaratan WBK dilakukan berdasarkan Permen PAN RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah dan atau Permen KP Nomor 62/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan KKP serta ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Realisasi Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi lingkup Sekretariat Jenderal adalah sebesar 2 unit kerja yaitu Pusdatin dan Biro Umum dan PBJ berdasarkan capaian kumulatif s.d tahun 2023. Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 9 Tahun 2021 hal Penetapan Biro Umum dan PBJ sebagai Unit Kerja yang dibangun menuju Wilayah Bebas Korupsi dengan jenis layanan pada layanan Kesehatan kantor pusat (Klinik Pratama), sebagaimana pada Tabel 34.

2. Analisa Capaian Kinerja

Sampai dengan akhir Tahun 2023 belum terdapat unit kerja baru di lingkup Sekretariat Jenderal yang berpredikat Wilayah Bebas Korupsi, namun demikian pada Tahun 2023 terdapat 3 unit kerja yang dibangun

menuju Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi lingkup Sekretariat Jenderal dan telah dilakukan pendampingan oleh Inspektorat Jenderal serta telah dilakukan penilaian mandiri sebagaimana Memo Kepala Biro Keuangan selaku Ketua Tim Penilai Mandiri Pembangunan Zona Integritas WBK WBBM di Lingkungan Sekretariat Jenderal Nomor 118/SJ.2/TU.210/I/2024 tanggal 11 Januari 2024 dengan hasil penilaian sebagai berikut 1). Biro Sumber Daya Manusia dan Aparatur sebesar 83,97, 2). Biro Perencanaan sebesar 82,70 dan Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri sebesar 81,34.

Apabila dibandingkan dengan Unit Kerja Eselon I lingkup KKP capaian Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi lingkup Sekretariat Jenderal Tahun 2023 berdasarkan penilaian internal oleh tim penilai internal KKP terhadap pemenuhan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) pada komponen pengungkit dan hasil serta pengujian implementasi terhadap pembangunan zona integritas periode 2022 sampai dengan September 2023 sebagaimana telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri KP Tahun 2023 sebagaimana pada Tabel 35.

Tabel 29. Rincian Capaian dan Target IK-9

SP.01. TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK LINGKUP SEKRETARIAT JENDERAL												
IK-9. Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi lingkup Sekretariat Jenderal												
Realisasi 2018-2022					2023				Renstra KKP 2020-2024			
2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2022-2023	Target 2023	% Capaian terhadap Target 2023	Target 2024	% Capaian terhadap Target 2024
-	-	-	-	1	2	2	100.00%	100	2	100.00%	2	100%

Tabel 30. Jumlah Unit Kerja Berpredikat WBK Tahun 2023 berdasarkan Kepmen KP 189/2023 tentang Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di Lingkungan KKP Tahun 2023

No	UNIT KERJA	JUMLAH UNIT KERJA	UNIT KERJA BERPREDIKAT WBK TAHUN 2023
1.	Ditjen Perikanan Tangkap	2	1. Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjung Pandan 2. Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang
2.	Ditjen Perikanan Budi Daya	2	1. Balai Perikanan Budi Daya Air Payau Ujung Batee 2. Balai Perikanan Budi Daya Air Payau Takalar
3.	Ditjen PDS	1	Direktorat Pemasaran
4.	Ditjen PSDKP	2	1. Stasiun Pengawasan SDKP Ambon 2. Stasiun Pengawasan SDKP Biak
5.	BPPSDMKP	3	1. Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon 2. Politeknik KP Pangandaran 3. Politeknik KP Sidoarjo
6.	BPPMHKP	4	1. Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung 2. Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pangkal Pinang 3. Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Medan II 4. Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merak
7.	Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	-	-
8.	Inspektorat Jenderal	-	-
9.	Sekretariat Jenderal	-	-

Keberhasilan pencapaian indikator Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi lingkup Sekretariat Jenderal didorong oleh beberapa faktor diantaranya :

1. Komitmen pimpinan.
2. Internalisasi dan implemntasi pembangunan ZI menuju WBK kepada seluruh pegawai yang dilakukan secara intensif.
3. Telah dilakukaannya penandatanganan pakta integritas dan komitmen bersama.
4. Telah dilakukan internasilisasi implementasi budaya kerja.

3. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja didukung pelaksanaan kegiatan antara lain:

1. Melengkapi dokumen pendukung sebagaimana LKE pembangunan ZI menuju WBK/WBBM.
2. Monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai hasil rekrutmen dan mutasi internal.
3. Memanfaatkan hasil *assessment* pegawai sebagai dasar mutasi dan pengembangan kompetensi pegawai.

4. Mengupayakan peningkatan kompetensi Tim Pengelola Akuntabilitas Kinerja melalui bimtek atau kegiatan lainnya sejenis.
5. Menyesuaikan SOP dengan Standar Pelayanan Publik, serta mengupayakan pemenuhan komponen pengungkit (pemenuhan dan *reform*) peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai persyaratan sebelum dilakukan evaluasi oleh tim TPI.

4. Upaya Perbaikan dan Upaya Penyempurnaan Kinerja Kedepan (Rencana Aksi)

Berdasarkan hasil evaluasi atas capaian Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi lingkup Sekretariat Jenderal, kedepan akan dilakukan beberapa hal antara lain :

1. Melakukan pemenuhan atas Lembar Kerja Evaluasi (LKE) pada komponen pengungkit dan hasil.
2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil penilaian mandiri atas LKE.
3. Membentuk Tim Kerja khusus yang ditetapkan di masing-masing unit kerja yang dibangun menuju WBK.
4. Koordinasi dengan Inspektorat I mengenai mekanisme penilaian.

5. Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka mencapai indikator kinerja "*Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi lingkup Sekretariat Jenderal*" alokasi anggaran tersedia di unit kerja yang melaksanakan pembangunan WBK. Penilaian WBK dinilai secara mandiri oleh Tim Penilai di lingkup Sekretariat Jenderal sebelum tahap penilaian Tim Penilai Internal dengan kegiatan utama yaitu:

- Pemenuhan atas Lembar Kerja Evaluasi (LKE) pada komponen pengungkit dan hasil.
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil penilaian mandiri atas LKE,
- Pembentukan Tim Kerja khusus yang ditetapkan di masing-masing unit kerja yang dibangun menuju WBK,
- Koordinasi dan asistensi dengan Inspektorat I mengenai mekanisme penilaian.

Sarana dan prasarana yang digunakan dalam pencapaian indikator ini antara lain sarana perkantoran, laptop, komputer, *internet*, *drive* penyimpanan file *online* dan perangkat lunak *video conference*.

SASARAN PROGRAM 2. PNBP BLU SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN MENINGKAT

Sasaran Program ini mempunyai 2 indikator kinerja utama dengan capaian sebagai berikut :

IK10. PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET PNBP BLU LPMUKP

1. Definisi Indikator Kinerja

Persentase Realisasi PNBP BLU merupakan pendapatan yang diperoleh BLU LPMUKP dari pendapatan layanan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai tarif layanan, dan pendapatan non layanan yang diperoleh dari hasil optimalisasi/pemanfaatan surplus kas dan/atau dana kelolaan dalam investasi jangka pendek berisiko rendah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Realisasi PNBP BLU ini dihitung untuk PNBP yang disahkan ke Kuasa Bendahara Umum Negara periode 1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 bahwa BLU merupakan instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melaksanakan kegiatannya didasarkan pada prinsip-prinsip efisiensi dan produktivitas. Dalam mendukung penyelenggaraan layanan kepada masyarakat, BLU dapat memungut biaya sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan, sesuai dengan PP nomor 23 Tahun 2005, yang dimasukkan sebagai pendapatan BLU.



Sebagai BLU pengelola dana, LPMUKP memiliki 2 (dua) DIPA yaitu DIPA Bagian Anggaran KKP untuk anggaran operasional satker serta DIPA Bagian Anggaran BUN untuk alokasi dana kelolaan. Anggaran dana kelolaan yang bersumber dari BA BUN termasuk dalam pembiayaan investasi pemerintah. Investasi Pemerintah yang dimaksud merupakan penempatan sejumlah dana dan/atau barang oleh Pemerintah dalam jangka panjang, yang diharapkan memberikan hasil dan nilai tambah di masa yang akan datang, baik berupa pengembalian nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. Oleh karena itu, alokasi anggaran dana kelolaan LPMUKP yang bersumber dari BA BUN tersebut dikelola mengikuti pengaturan internal LPMUKP terkait pengelolaan dana bergulir serta tidak terikat dengan tahun anggaran.

Dalam pengelolaan anggaran dana bergulir tersebut, LPMUKP sebagai BLU diberikan kewenangan untuk melakukan penempatan dana untuk memperoleh pendapatan sebagai pendapatan BLU sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 252/PMK.05/2014 tentang rekening milik kementerian negara/lembaga/satuan kerja.

Selain tarif layanan dan imbal jasa penempatan dana sebagaimana disebut diatas, pada BLU LPMUKP juga dimungkinkan untuk memperoleh pendapatan dari sumber lain, sesuai dengan PMK Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum, antara lain: Pendapatan yang akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, Hibah tidak terikat dan/ atau hibah terkait yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain, Hasil kerja sama BLU dengan pihak lain dan/ atau hasil usaha lainnya, Penerimaan lainnya yang sah; dan/atau Penerimaan anggaran yang bersumber dari APBN.

2. Analisa Capaian Kinerja

Pendapatan PNBPN BLU secara garis besar dibagi menjadi dua jenis yaitu pendapatan jasa layanan dan pendapatan non jasa layanan.

1. Pendapatan Jasa Layanan

Pendapatan jasa layanan BLU merupakan pendapatan yang diperoleh dari layanan BLU kepada masyarakat, dalam hal ini pendapatan jasa layanan BLU diantaranya pembayaran hasil bunga pinjaman dana bergulir dan biaya provisi yang diakses oleh masyarakat.

2. Pendapatan Non Jasa Layanan

Pendapatan Non Jasa Layanan merupakan pendapatan yang diperoleh BLU yang bukan merupakan layanan langsung kepada masyarakat, contohnya untuk saat ini pendapatan non jasa layanan BLU berasal dari imbal hasil penempatan dana kelolaan BLU LPMUKP yang belum tersalurkan, LPMUKP dapat menempatkan dana kelolaan kepada mitra baik dalam bentuk giro maupun deposito. Khusus untuk penempatan dana melalui deposito, maka LPMUKP harus melakukan proses pemilihan mitra kerja sama (*beauty contest*) untuk menentukan pihak mitra mana yang dapat menghasilkan tingkat *return* dari kegiatan investasi jangka pendek yang dilakukan untuk mengoptimalkan pendapatan BLU.

Persentase realisasi capaian PNBPN layanan BLU dihitung dari data penerimaan yang bersumber dari jasa layanan dan biaya provisi atas pinjaman dana bergulir yang dilakukan. Pendapatan jasa layanan tersebut berasal dari *outstanding* pinjaman dana bergulir yang telah terealisasi pada tahun sebelumnya dan pinjaman dana bergulir yang disalurkan tahun berjalan. Capaian PNBPN BLU LPMUKP disajikan pada Tabel 35.

Tabel 31. Rincian Capaian dan Target IK-10

SP.01. TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK LINGKUP SEKRETARIAT JENDERAL												
IK 10. Persentase Pencapaian Target PNBPN BLU LPMUKP												
Realisasi 2018-2022					2023				Renstra KKP 2020-2024 (Permen KP 57/2020)			
2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2022-2023	Target 2023	% Capaian terhadap Target 2023	Target 2024	% Capaian terhadap Target 2024
78,70	100,39	130,49	131,29	43,63	97,00	73,40	75,67%	-	97	75,67%	97 s	-

Sesuai dengan Manual IK persentase PNBPN layanan BLU, meskipun pencatatan yang dilakukan adalah rutin setiap bulan, namun pengukurannya dilakukan secara Triwulanan menyesuaikan dengan periode penyusunan laporan kinerja. Target persentase realisasi PNBPN layanan pada Tahun 2023 adalah sebesar 97%, sedangkan untuk realisasi PNBPN layanan secara nominal targetnya adalah sebesar Rp.30.000.000.000,00. Berdasarkan proyeksi penerimaan PNBPN yang telah dibuat, target PNBPN yang termuat dalam TPNBP Tahun 2023 adalah sebesar Rp.60,00 miliar, namun demikian target yang disepakati bersama dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku pembina keuangan BLU, realisasi PNBPN layanan BLU yang ditargetkan adalah sebesar Rp.30,00 miliar.

Realisasi PNBPN dihitung berdasarkan pencatatan atas pendapatan yang bersumber dari pembayaran jasa layanan dan pembayaran biaya provisi atas pinjaman yang telah dicairkan. Pencatatan tersebut telah divalidasi dan disahkan oleh Kuasa Bendahara Umum Negara melalui KPPN mitra LPMUKP. Capaian dari indikator kinerja ini dihitung secara *maximize* dimana semakin tinggi realisasi PNBPN yang tercatat dan disahkan maka semakin baik. Sumber data untuk mengukur validitas capaian realisasi PNBPN adalah laporan realisasi PNBPN yang dimuat dalam memorandum kepada Sekretaris Jenderal KKP, atau data yang bersumber dari aplikasi OM SPAN atas pengesahan pendapatan dan belanja yang telah dilakukan sesuai dengan periodenya.

Tabel 32. Rincian Realisasi PNBPN BLU Tahun 2023

BULAN	424911	424134	4241391	424919	PNBP
Januari	3.263.540.224	1.348.007.421	86.955.000	8.000	4.698.510.645
Februari	3.320.363.915	1.449.818.673	81.600.000	123.083	4.851.905.671
Maret	3.079.745.281	1.316.026.580	330.390.000	699.065	4.726.860.926
April	2.774.523.418	1.138.514.144	171.300.000	(124.500)	4.084.213.062
Mei	3.122.363.652	1.325.476.910	166.875.000	-	4.614.715.562
Juni	2.650.331.346	1.302.619.652	186.075.000	(137.500)	4.138.888.498
Juli	3.020.460.257	1.376.198.444	515.274.000	(176.583)	4.911.756.118
Agustus	4.386.739.411	1.388.134.264	400.650.000	(232.759)	6.175.290.916
September	2.657.811.499	1.408.561.661	359.962.500	-	4.426.335.660
Oktober	3.405.447.887	1.792.300.071	152.706.750	-	5.350.454.708
November	3.487.284.063	1.851.426.366	418.934.250	-	5.757.644.679
Desember	3.932.779.223	1.314.581.074	2.136.699.726	455.064	7.384.515.087
Total	39.101.390.176	17.011.665.260	5.007.422.226	613.870	61.121.091.532

424911: Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU; 424134: Pendapatan Program Dana Bergulir Sektoral
424139: Pendapatan Pengelolaan Dana Khusus Lainnya, 424919: Pendapatan Lain-lain BLU

Akun penerimaan yang merupakan jasa layanan adalah 424134 (pendapatan program dana bergulir sektoral) dan 424139 (pendapatan pengelolaan dana khusus lainnya), selain dari kedua akun tersebut merupakan pendapatan non jasa layanan, sehingga realisasi PNBP Layanan BLU yaitu sebesar Rp17.011.665.260,00 ditambahkan dengan Rp5.007.422.226,00 atau sebesar Rp22.019.087.486,00 Berdasarkan hasil perhitungan di atas, realisasi PNBP layanan Tahun 2023 adalah sebesar Rp22.019.087.486,00 dengan capaian atas target yaitu 73,40%. Apabila dibandingkan dengan target realisasi sebesar 97% maka capaiannya adalah 75,67%.

Rincian Realisasi capaian PNBP bulanan disajikan pada Tabel 37, sedangkan perbandingan realisasi PNBP BLU dengan PNBP KKP secara umum disajikan pada Tabel 38.

Target realisasi PNBP pada Tahun 2023 difokuskan pada realisasi PNBP jasa layanan. Secara substansi,

target ini memiliki definisi pengukuran yang berbeda dengan sumber pendapatan non jasa layanan yang tidak ditargetkan pada Tahun 2023. Sehingga Indikator Kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan Tahun 2022 mengingat manual perhitungannya telah mengalami perbedaan.

Target PNBP pada Tahun 2022 sendiri secara umum disepakati sebesar Rp.48,00 miliar, sedangkan pada tahun 2023 target PNBP layanan adalah sebesar Rp.30,00 miliar, target ini hanya mengukur PNBP yang bersumber dari jasa layanan sehingga nilai secara rupiah tentunya target Tahun 2023 relatif berkurang jika dibandingkan dengan Tahun 2022. Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,12%, dimana pada Tahun 2023 nilai realisasi PNBP layanan adalah sebesar Rp22.019.087.486,10, sedangkan pada Tahun 2022 realisasi PNBP layanan adalah sebesar Rp21.992.253.046,23.

Tabel 33. Perbandingan Realisasi PNBP BLU dengan PNBP KKP Tahun 2023

No	UNIT ESELON I	TARGET PNBP 2023 (TARGET SEMULA)	TARGET PNBP 2023 (TARGET MENJADI)	REALISASI SD. 31 DESEMBER 2023	%
1	DJPT	3.564.526.679.000	3.573.988.325.000	736.108.210.555	20,60%
	a. SDA	3.500.000.000.000	3.500.000.000.000	636.893.353.269	18,20%
	b. PNBP Lainnya	64.526.679.000	73.988.325.000	99.214.857.286	134,10%
2	DJPB	22.589.806.000	22.589.806.000	43.258.107.475	191,49%
	a. PNBP Lainnya	13.848.509.000	13.848.509.000	29.629.013.046	213,95%
	b. BLU- Jepara	4.240.598.000	4.240.598.000	1.639.471.822	38,66%
	c. BLU-Situbondo	3.375.974.000	3.375.974.000	3.850.475.751	114,06%
	d. BLU-Karawang	1.124.725.000	1.124.725.000	8.139.146.856	723,66%

No	UNIT ESELON I	TARGET PNBP 2023 (TARGET SEMULA)	TARGET PNBP 2023 (TARGET MENJADI)	REALISASI SD. 31 DESEMBER 2023	%
3	DJPSPDKP	9.336.299.000	5.836.299.000	30.613.322.664	524,53%
4	DJPDSPKP	8.647.599.000	8.647.599.000	15.226.344.631	176,08%
5	DJPKRL	333.169.648.000	333.169.648.000	707.036.792.705	212,22%
6	BPPSDMKP	24.731.913.000	24.731.913.000	32.056.666.124	129,62%
	a. PNBP Lainnya	13.199.904.000	13.199.904.000	18.191.719.739	137,82%
	b. BLU- Tegal	7.191.508.000	7.191.508.000	9.075.535.075	126,20%
	c. BLU- Sidoarjo	4.340.501.000	4.340.501.000	4.789.411.310	110,34%
7	BPPMHKP	54.908.174.000	54.927.999.000	71.800.956.299	130,72%
8	ITJEN	-	-	420.555.837	
9	Sekretariat Jenderal	61.005.857.000	61.005.857.000	62.519.537.707	102,48%
	a. Biro Umum dan PBJ	61.920.000	61.920.000	1.329.718.915	2147,48%
	b. BLU- LPMUKP	60.943.937.000	60.943.937.000	61.121.091.532	100,29%
	c. BPISDKP	-	-	68.727.260	
	Jumlah	4.078.915.975.000	4.084.897.446.000	1.699.040.493.997	41,59%

Tabel 34. Target dan Realisasi PNBP KKP Tahun 2023

No	URAIAN	TARGET PNBP 2023 (SEMULA)	TARGET PNBP 2023 (MENJADI)	REALISASI	%
3	PNBP Pemanfaatan SDA	3.500.000.000.000	3.500.000.000.000	636.893.353.269	18,20%
4	PNBP Lainnya (pelayanan, pengelolaan BMN dan hak Negara Lainnya)	497.698.732.000	503.680.203.000	973.532.008.382	193,28%
5	PNBP BLU	81.217.243.000	81.217.243.000	88.615.132.346	109,11%
	Jumlah	4.078.915.975.000	4.084.897.446.000	1.699.040.493.997	41,59%

Kendala yang dihadapi dalam merealisasikan PNBP Layanan BLU yang bersumber dari jasa layanan dan provisi Tahun 2023 antara lain:

1. Adanya kegagalan pemenuhan kewajiban debitur kepada LPMUKP untuk membayar jasa layanan sehingga menjadi piutang bagi LPMUKP. Sebetulnya hal ini juga berkaitan dengan kegagalan usaha yang dialami oleh debitur sehingga berdampak pada proses pemenuhan kewajiban kepada LPMUKP.
2. Terdapat piutang yang tidak tertagih untuk realisasi jasa layanan sebesar Rp9.550.809.130,00 untuk Tahun 2023. Sehingga jika pada Tahun 2023 tidak terjadi piutang yang baru, maka realisasi jasa layanan yang seharusnya didapatkan oleh LPMUKP adalah sebesar Rp31.569.896.616,00 atau telah melampaui target sebesar Rp30.000.000.000,00.

Apabila dibandingkan dengan kinerja realisasi PNBP lainnya di tingkat KKP, target PNBP BLU secara total di KKP sebesar Rp81.217.243.000,00 dengan realisasi sebesar Rp88.615.132.346,00 atau mencapai 109,11%, dengan rincian sebagaimana dalam Tabel 39.

3. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Meskipun capaian Persentase Pencapaian Target PNBP belum optimal, namun BLU LPMUKP telah melakukan upaya antara lain :

1. Penagihan atas jasa layanan BLU secara berkala.
2. Mengoptimalkan penyaluran dana bergulir untuk mendukung program prioritas KKP berupa penangkapan ikan terukur dan kampung perikanan budidaya.
3. Mengevaluasi pendamping di daerah berdasarkan kinerja masing-masing.
4. Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan (Rencana Aksi).

Berdasarkan hasil evaluasi serta memperhatikan permasalahan yang dihadapi beberapa upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan antara lain :

1. Monitoring terhadap debitur yang telah dibiayai dengan tetap mengingatkan terkait dengan pembayaran jasa layanan maupun pembayaran pokok melalui SMS *blast* maupun melalui tenaga pendamping di daerah.
2. Inventarisasi dan klusterisasi debitur untuk kemudian dilakukan penagihan berdasarkan skala prioritas dari tingkat kolektibilitasnya, terutama terhadap debitur yang memiliki nilai piutang jasa layanan yang tinggi. Terhadap debitur yang telah dilakukan proses penagihan dan tidak memiliki itikad yang baik, maka akan dilanjutkan kepada proses teguran, bahkan sampai dengan proses penyelesaian (jika dimungkinkan).
3. Optimalisasi penerimaan jasa provisi akad yang telah dilaksanakan di Tahun 2023 namun belum dilakukan pencairan di Tahun 2023. Karena sesuai ketentuan akad harus segera dicairkan dengan jangka waktu paling lambat selama satu tahun pasca dilakukannya akad, maka LPMUKP akan melakukan optimalisasi pencairan terhadap pinjaman yang telah diadakan, serta potensi pencairan baru di Tahun 2024.

4. Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja Persentase Pencapaian Target PNBP BLU LPMUKP, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp416.000.000,00 untuk penanganan pinjaman bermasalah dan terealisasi sebesar Rp222.150.099. Selain itu juga terdapat langganan sms *blast* dengan anggaran Rp30.000.000,00 dan terealisasi Rp5.550.000,00.

Kegiatan utama lainnya yang dilakukan di tahun 2023 antara lain : Layanan Pengelolaan dan Pengendalian Risiko Modal Usaha, Layanan Pengelolaan Jaminan. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam pencapaian indikator ini antara lain: sarana perkantoran, laptop, komputer, *internet*, *drive* penyimpanan file *online* dan perangkat lunak *video conference*.

IK11. PERSENTASE REALISASI PENYALURAN DANA BERGULIR BLU LPMUKP

1. Definisi Indikator Kinerja

Penyaluran Dana Bergulir LPMUKP merupakan program pembiayaan kepada pelaku usaha sektor Kelautan dan Perikanan yang pada Tahun 2023 difokuskan untuk mendukung program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan. Proses pengajuan pinjaman dana bergulir dilakukan melalui beberapa proses tahapan seperti verifikasi kelayakan usulan pinjaman, komite pinjaman, persetujuan, akad, dan pencairan. Pelaksanaan pencairan dana bergulir pada program prioritas KKP dilakukan secara bertahap dengan melihat kesiapan kondisi debitur untuk mengelola dana bergulir yang akan diberikan. Sehingga pelaksanaan pencairan tersebut kemungkinan tidak dapat dilakukan pada tahun berjalan secara sekaligus. Sehingga untuk mendukung penyaluran program prioritas tersebut, lebih tepat menggunakan akad sebagai parameter realisasi yang diukur dalam proses penyaluran dana bergulir. Akad pinjaman dana bergulir adalah suatu perjanjian pemberian pinjaman/pembiayaan antara LPMUKP sebagai pemberi pinjaman/pembiayaan dengan penerima pinjaman/pembiayaan (debitur). Pinjaman yang diadakan telah melalui proses pembahasan komite yang melibatkan unit Eselon I Teknis KKP sehingga mendapatkan persetujuan pinjaman melalui Surat Pemberitahuan Persetujuan Pinjaman atau Pembiayaan (SP3). Realisasi akad pinjaman dana bergulir adalah jumlah nilai rupiah yang diadakan sesuai dengan hasil persetujuan pasca pembahasan komite pinjaman selama Tahun 2023 (terhitung mulai tanggal 1 Januari 2023 s.d 31 Desember 2023).



Perhitungan dilakukan terhadap realisasi akad pinjaman dana bergulir dilakukan berdasarkan data jumlah nominal dana bergulir yang diadakan oleh LPMUKP kepada debitur sepanjang Tahun 2023. Persentase Realisasi Penyaluran Dana bergulir dihitung berdasarkan Realisasi Akad Pinjaman Dana Bergulir dibandingkan dengan Target Akad Pinjaman Dana Bergulir.

Pada Tahun Anggaran 2023 BLU LPMUKP tidak mendapatkan penambahan dana bergulir yang akan dikelola, sehingga total dana yang dikelola oleh BLU LPMUKP masih berjumlah sama dengan penerimaan pada Tahun 2017 sebesar Rp.500,00 miliar dan Tahun 2018 sebesar Rp.850,00 miliar sehingga total dana kelolaan BLU LPMUKP sebesar Rp.1,35 triliun. Dengan memperhitungkan dana kelolaan BLU LPMUKP yang belum tersalurkan, serta asumsi pengembalian pinjaman dana bergulir yang telah disalurkan, maka rencana alokasi dana kelolaan BLU LPMUKP yang akan disalurkan pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp660.000.000.000,00.

Dalam rangka percepatan penyaluran dana bergulir, LPMUKP bersinergi dengan program Unit Eselon I Teknis KKP dalam rangka mendukung program prioritas KKP yang dikoordinir oleh Unit Eselon I Teknis KKP tersebut.

LPMUKP berperan sebagai lembaga yang memberikan stimulus berupa modal usaha agar program prioritas yang dicanangkan dapat berkelanjutan. Sinergi tersebut dilakukan dengan menyiapkan skema penyaluran dana bergulir yang difokuskan kepada koperasi yang memiliki usaha di sektor kelautan dan perikanan agar dapat meneruskan program prioritas KKP dengan memanfaatkan pembiayaan sebagai upaya untuk mengembangkan usaha yang dilakukan. Program prioritas KKP yang akan menjadi fokus LPMUKP adalah penangkapan ikan terukur, dan kampung budidaya. Selain itu, sinergi yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan penyaluran dana bergulir adalah dengan mengikutsertakan Unit Eselon I sebagai pengambil keputusan dalam rapat komite pinjaman dana bergulir dikarenakan secara teknis Unit Eselon I teknis lebih memiliki pemahaman yang baik dan juga kemungkinan besar akan mengetahui karakteristik dan kemampuan dari debitur yang mengajukan pinjaman dikarenakan beberapa debitur LPMUKP merupakan binaan dari KKP sendiri. Pola penyaluran yang dilakukan pada Tahun 2023 menggunakan pola kombinasi yang lebih jelasnya adalah sebagai berikut:

a) Pola Lama/Pola Pasif

Pola pasif adalah pola penyaluran dana bergulir LPMUKP yang hanya mengandalkan pendamping untuk memperoleh proposal, sehingga apabila pendamping tidak produktif, maka LPMUKP tidak bisa menyalurkan dana bergulir secara optimal. Proses yang dilakukan adalah dari pendamping yang mencari potensi debitur yang dapat dibiayai kemudian para pendamping tersebut melakukan pendampingan berupa penyusunan proposal pengajuan usulan pinjaman dana bergulir kepada LPMUKP. Pemanfaat program pada pola ini rata-rata adalah pola retail dimana pemanfaatnya lebih didominasi oleh perorangan dan memiliki nilai pengajuan yang biasa diajukan oleh perorangan dengan pembatasan nilai maksimum plafon sebesar Rp500,00 juta dengan persyaratan agunan sebesar 125%.

b) Pola Baru/Pola Aktif

Pola aktif dilaksanakan dengan membentuk tim program prioritas yang mendukung penyaluran dana bergulir LPMUKP melalui dukungan pembiayaan pada program prioritas KKP berupa program penangkapan ikan terukur berbasis kuota, dan program kampung budidaya. Pada pola penyaluran ini, LPMUKP tidak hanya mengandalkan pendamping di daerah, namun melalui tim yang dibentuk akan mencari calon debitur yang potensial berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, serta data-data dari sumber yang lain terkait dengan potensi masyarakat pelaku usaha perikanan yang tergabung dalam suatu korporasi maupun kelompok, sehingga bila pendamping sekalipun tidak produktif, LPMUKP masih mampu untuk menyalurkan dana bergulir melalui pola aktif dimaksud.

Selanjutnya, berkenaan dengan dukungan pembiayaan pada program prioritas KKP yang memerlukan dana bergulir yang cukup besar, maka dilakukan pula skema penyaluran bertahap dan penyesuaian plafon pinjaman untuk mendukung para pelaku usaha memiliki skala usaha yang lebih besar dengan harapan para pelaku usaha tersebut dapat menyerap tenaga kerja secara lebih masif dan optimal dibandingkan dengan pembiayaan yang dilakukan secara perorangan. Pembiayaan ini tentunya menyebabkan penyesuaian proses bisnis berupa pemberian pinjaman bertahap dengan plafon pembiayaan yang jauh lebih besar. Dengan demikian, proses bisnis LPMUKP dianggap kurang sesuai apabila yang ditargetkan menjadi Indikator Kinerja Utama adalah berupa pencairan, maka sesuai dengan kesepakatan yang dibahas, penyaluran dana bergulir LPMUKP pada Tahun 2023 yang diukur dan dapat diklaim sebagai penyaluran adalah pinjaman tersebut sudah dilakukan akad kredit.

Tabel 35. Rincian Capaian dan Target IK-11

SPO1. TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK LINGKUP SEKRETARIAT JENDERAL												
IK-11. Persentase Realisasi Penyaluran Dana Bergulir BLU LPMUKP												
Realisasi 2018-2022					2023				Renstra KKP 2020-2024 (Permen KP 57/2020)			
2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2022- 2023	Target 2023	% Capaian terhadap Target 2023	Target 2024	% Capaian terhadap Target 2024
-	-	-	-	-	80	90,77	113,46%	-	113,46%	190,14%	100	90,77%

Hal tersebut selaras dengan kemungkinan yang terjadi apabila pencairan dana bergulir digunakan sebagai indikator kinerja utama dimana kemungkinan pencairan dana yang diadakan memiliki kemungkinan pencairan pada tahun selanjutnya. Proses akad pun sebetulnya telah melalui berbagai tahapan layaknya proses pencairan, dimana proposal tersebut telah melalui tahapan pengecekan kelengkapan berkas serta pengecekan riwayat peminjaman melalui sistem layanan informasi kredit (SLIK), kemudian dilakukan analisa kelayakan usulan pinjaman oleh analis LPMUKP, selanjutnya dilakukan komite bersama dengan anggota tim komite dari Unit Eselon I Teknis terkait, kemudian dilakukan pengambilan keputusan kelayakan pinjaman, diterbitkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Pinjaman (SP3), lalu SP3 tersebut ditanggapi oleh calon debitur, barulah akad kredit dilaksanakan. Setelah akad tersebut dilaksanakan, dan debitur telah siap dengan segala kelengkapan dalam penerimaan dana bergulir, barulah pinjaman tersebut dicairkan. Berdasarkan proses penyaluran tersebut, sebetulnya akad sudah sangat memenuhi kriteria dalam hal realisasi penyaluran dana bergulir dikarenakan akad juga merupakan komitmen antara pemerintah melalui LPMUKP kepada masyarakat bahwa masyarakat selaku debitur telah disetujui pembiayaannya.

2. Analisa Capaian Kinerja

Sejak Tahun 2017 hingga Tahun 2022, telah disalurkan dana bergulir kepada masyarakat yang mempunyai usaha di Sektor Kelautan dan Perikanan dengan total dana bergulir yang tersalurkan sebesar Rp.1.005.846.548.490,00 dengan penerima pemanfaat sebesar 26.078 Orang, pengembalian dana bergulir sebesar Rp.368.836.606.749,00 dan jumlah *outstanding* pinjaman dana bergulir sebesar Rp.637.009.941.741,00 maka total dana bergulir yang belum tersalurkan pada akhir Tahun 2022 adalah sebesar Rp.712.990.058.259,00. Dari sisa dana bergulir yang belum tersalurkan tersebut, pada Tahun 2023 LPMUKP idealnya akan menyalurkan dana kelolaan kepada Masyarakat KP sebesar Rp.660 Miliar yang diharapkan dapat terserap oleh 5.924 pemanfaat dan mampu membiayai usaha di sektor KP guna mensejahterakan perekonomian masyarakat. Proses pengajuan pinjaman dana bergulir dilakukan melalui beberapa proses tahapan seperti verifikasi kelayakan usulan pinjaman, komite pinjaman, persetujuan, akad, dan pencairan. Capaian Persentase Realisasi Penyaluran Dana Bergulir BLU LPMUKP dapat dilihat pada Tabel 40.

Pelaksanaan pencairan dana bergulir pada program prioritas KKP dilakukan secara bertahap dengan melihat kesiapan kondisi debitur untuk mengelola dana bergulir yang akan diberikan. Sehingga pelaksanaan pencairan tersebut kemungkinan tidak dapat dilakukan pada tahun berjalan secara sekaligus. Sehingga untuk mendukung penyaluran program prioritas tersebut, lebih tepat menggunakan akad sebagai parameter realisasi yang diukur dalam proses penyaluran dana bergulir. Pada Tahun 2023 target IK-11. Persentase Realisasi Penyaluran Dana Bergulir BLU LPMUKP sebesar 80% dengan realisasi sebesar 151,29% atau telah mencapai 189,11% atau sebesar 120% dalam aplikasi kinerjanya. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena di Tahun 2023 terdapat penyesuaian perhitungan semula berdasarkan jumlah dana bergulir yang disalurkan menjadi jumlah akad penyaluran dana bergulir. Berkaitan dengan hal tersebut, capaian realisasi di Tahun 2023 tidak dapat dibandingkan *apple to apple* dengan

capaian sebelumnya karena adanya perbedaan manual indikator. Apabila dibandingkan dengan Lembaga sejenis misal LPDB penyaluran dan bergulir di LPMUKP Tahun 2023 belum dapat dibandingkan karena keterbatasan informasi disebabkan pada saat penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal, KL terkait juga dalam proses penyusunan Laporan Kinerja.

Sebagai pembanding kinerja, Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) di Kementerian Koperasi dan UKM pada Tahun 2022 telah menyalurkan Rp1,861 triliun dari target 1,8 triliun kepada 41.475 penerima dari target 30.000 penerima. Sedangkan dana bergulir BLU LPMUKP di Tahun 2022 target sebesar Rp600,00 miliar dengan realisasi sebesar 133,22 miliar dan disalurkan kepada 1.735 pemanfaat (894 sektor usaha perikanan budi daya, 457 sektor usaha perikanan tangkap, 353 sektor usaha pengolahan dan pemasar hasil perikanan, 30 sektor usaha garam rakyat dan usaha 1 sektor usaha masyarakat lainnya. Capaian Realisasi Akad Penyaluran

Tabel 36. Rincian Realisasi Akad Penyaluran Dana Bergulir

No	PROGRAM/SUB SEKTOR USAHA	JUMLAH AKAD	JUMLAH DEBITUR
1	Kampung Budidaya	142.477.000.000	13
	Perikanan Budidaya	142.477.000.000	13
2	Penangkapan Ikan Terukur (PIT)	762.586.500.000	23
	Perikanan Tangkap	762.586.500.000	23
3	Ritel	93.454.500.000	352
4	Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan	21.411.600.000	80
5	Perikanan Budidaya	28.180.000.000	188
6	Perikanan Tangkap	28.327.200.000	65
7	Usaha Garam Rakyat	4.989.700.000	6
8	Usaha Masyarakat Pesisir Lainnya	10.546.000.000	13
	Total Keseluruhan	998.518.000.000	388

Sumber: Laporan BLU-LPMUKP

Dana Bergulir dapat dilihat pada Tabel 41.

Pada Tahun 2023 juga substansi target yang diukur mengalami penyesuaian mengikuti alur proses bisnis LPMUKP pada saat ini yang memang lebih berfokus pada penyaluran dana bergulir kepada program prioritas KKP berupa program penangkapan ikan terukur, dan program kampung budidaya. Sehingga nilai yang dibandingkan adalah akad dan realisasi. Jika dibandingkan dengan realisasi penyaluran dana bergulir pada periode Tahun 2022, maka penyaluran dana bergulir periode Tahun 2023 mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Hal tersebut dikarenakan beberapa hal diantaranya:

1. Pada Tahun 2022, LPMUKP masih mempersiapkan skema dan pola penyaluran dana bergulir yang mendukung program prioritas KKP, sehingga kegiatan penyaluran sebetulnya sempat mengalami moratorium terhadap penerimaan proposal baru, dan fokus menyelesaikan proposal yang telah diterima. Hal tersebut juga tidak mampu untuk mendongkrak nilai penyaluran dana bergulir dikarenakan ternyata proposal yang diajukan pun banyak yang dinyatakan tidak lengkap, sehingga harus dikembalikan untuk dilengkapi atau diperbaharui.
2. Komparasi nilai penyaluran pada Tahun 2023 dan 2022 merujuk pada substansi yang berbeda, sehingga selain kendala yang dihadapi pada Tahun 2022, juga terjadi gap nilai yang cukup signifikan.

Faktor yang menyebabkan berhasilnya pencapaian target penyaluran dana bergulir pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pemberlakuan proses *clean and clear* proposal diawal dan dukungan sistem Loan Originating System (LOS) berpengaruh kepada kecepatan pemrosesan proposal usulan pembiayaan yang diajukan oleh debitur kepada LPMUKP. Proses *clean and clear* membuat proposal yang diajukan harus sudah lengkap dan harus mempunyai rekomendasi hasil pengecekan karakter berdasarkan Sistem Layanan Informasi Kredit (SLIK). Kemudian, prosesnya juga

telah melalui sistem LOS sehingga usulan tersebut dapat dimonitoring secara *online* oleh pendamping di daerah, maupun oleh LPMUKP di pusat.

2. Konsistensi dalam mendukung pembiayaan pada program prioritas KKP membuah hasil yang positif, dimana dukungan pembiayaan pada program prioritas relatif menyerap dana kelolaan yang lebih besar jika dibandingkan dengan pembiayaan kepada perorangan. Namun demikian pembiayaan pada program prioritas juga diberikan kepada koperasi atau kelompok yang memiliki anggota aktif dengan jumlah yang besar, agar kepemanfaatan dana tersebut tetap dapat dirasakan oleh masyarakat. Kemudian, pembiayaan pada program prioritas juga lebih mudah untuk dimonitoring dikarenakan jumlah debiturnya akan relatif lebih sedikit. Maka dengan dana kelolaan yang relatif terbatas, SDM dan sistem informasi LPMUKP yang belum begitu memadai, pembiayaan kepada koperasi atau kelompok yang memiliki anggota dengan jumlah besar dan mendukung program prioritas KKP akan lebih mudah dilakukan pengawasan daripada pembiayaan kepada perorangan yang tentu serapan dananya relatif lebih kecil dan pastinya dana kelolaan LPMUKP akan tersebar di banyak lokasi, sehingga memerlukan upaya ekstra untuk dapat memonitoring dana kelolaan secara akurat.

3. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja Persentase Realisasi Penyaluran Dana Bergulir BLU LPMUKP didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan antara lain:

1. Pelaksanaan kegiatan identifikasi dan pendampingan serta penilaian kelayakan usulan pinjaman.
2. Koordinasi dengan calon debitur
3. Pelaksanaan kegiatan temu teknis untuk menumbuhkan pemahaman *stakeholder* kelautan

dan perikanan terkait dana bergulir.

4. Upaya Perbaikan dan Upaya Penyempurnaan Kinerja Kedepan (Rencana Aksi)

Dalam upaya pencapaian kinerja pada periode selanjutnya, akan dilakukan langkah-langkah :

1. meningkatkan proses layanan pembiayaan dari mulai pengajuan proposal yang tetap diberlakukan proses *clean and clear*, pengecekan riwayat karakter calon debitur melalui SLIK, serta memproses usulan tersebut melalui sistem LOS untuk mengoptimalkan proses penyaluran pada Tahun selanjutnya.
2. Melakukan identifikasi dan verifikasi oleh tim program prioritas terhadap calon debitur baru melalui pola aktif untuk mendukung pembiayaan pada program prioritas KKP, serta menjalin sinergi dengan Unit Eselon I Teknis KKP untuk memperoleh data rekomendasi calon debitur yang merupakan binaan dari Unit Eselon I Teknis KKP, maupun dalam hal pelaksanaan pembahasan komite pinjaman yang memang melibatkan Unit Eselon I Teknis KKP.

5. Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja Persentase Realisasi Penyaluran Dana Bergulir BLU LPMUKP, alokasi anggaran yang digunakan sebesar Rp.1.277.500.000,00 dengan kegiatan utama yaitu Layanan Operasional Penyaluran Dana Bergulir LPMUKP, Temu Teknis Akses Permodalan LPMUKP Mendukung Program Prioritas KKP, Layanan Kemitraan dan Kerjasama LPMUKP dengan Lembaga/Instansi Lain, Rapat Kerja Teknis Pendampingan LPMUKP, Fasilitasi Pembentukan Kelembagaan Konsorsium Koperasi Mendukung PIT, Dukungan Penyaluran Modal melalui Program Penangkapan Terukur Berbasis Kuota. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam pencapaian indikator ini antara lain sarana perkantoran, laptop, komputer, *internet*, *drive* penyimpanan file *online* dan perangkat



Sosialisasi dan pendampingan LPMUKP ke pelaku usaha di Kab. Hulu Sungai Tengah

lunak *video conference*.

KINERJA ANGGARAN

Postur Anggaran Sekretariat Jenderal Tahun 2023

Postur APBN Sekretariat Jenderal Tahun 2023 adalah sebesar Rp656.780.605.000,00 dengan realisasi sebesar Rp631.793.931.033 atau mencapai 96,20%. Alokasi anggaran Sekretariat Jenderal tersebar di 2 Satker Pusat yaitu Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa dan BLU-LPMUKP, 1 satker Kantor Daerah yaitu

Badan Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan 34 Provinsi satker dekonsentrasi. Porsi anggaran terbesar terdapat di Satker Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa mencapai 86,69%, BLU-LPMUKP sebesar 9,71%, BPISDKP sebesar 3,4% dan satker dekonsentrasi sebesar 1,2%. Sedangkan untuk persentase penyerapan anggaran terbesar yaitu Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa sebesar 99,21%, 34 provinsi satker dekonsentrasi 98,26%, BPISDKP sebesar 97,17% dan paling rendah yaitu BLU-LPMUKP sebesar 65,52% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 37. Anggaran dan Realisasi Sekretariat Jenderal Per Satker Tahun 2023

No	SATKER	PAGU	REALISASI	%
A	DEKONSENTRASI	7.925.656.000	7.788.068.712	98,26%
1	010076 DINAS KETAHANAN PANGAN KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	181.699.000	161.454.000	88,86%
2	026221 DINAS KELAUTAN DAN PERIKNAN PROVINSI JAWA BARAT	241.036.000	238.986.304	99,15%
3	030012 DINAS KELAUTAN DAN PERIKNAN PROVINSI JAWA TENGAH	241.036.000	233.402.700	96,83%
4	040093 DINAS KELAUTAN DAN PERIKNAN PROVINSI YOGYAKARTA	169.534.000	169.446.300	99,95%
5	050064 DINAS KELAUTAN DAN PERIKNAN PROVINSI JAWA TIMUR	262.226.000	261.132.212	99,58%
6	060032 DINAS KELAUTAN DAN PERIKNAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	307.278.000	302.721.149	98,52%
7	070044 DINAS KELAUTAN DAN PERIKNAN PROVINSI SUMATERA UTARA	271.253.000	235.509.207	86,82%
8	080007 DINAS KELAUTAN DAN PERIKNAN PROVINSI SUMATERA BARAT	220.392.000	209.629.369	95,12%
9	090099 DINAS KELAUTAN DAN PERIKNAN PROVINSI RIAU	220.392.000	218.396.456	99,09%
10	100094 DINAS KELAUTAN DAN PERIKNAN PROVINSI JAMBI	197.082.000	197.081.080	100,00%
11	110098 DINAS KELAUTAN DAN PERIKNAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	190.724.000	189.318.749	99,26%
12	120099 DINAS KELAUTAN DAN PERIKNAN PROVINSI LAMPUNG	197.082.000	196.794.750	99,85%
13	130095 DINAS KELAUTAN DAN PERIKNAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	245.822.000	240.990.055	98,03%
14	140097 DINAS KELAUTAN DAN PERIKNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	211.916.000	211.033.610	99,58%
15	150098 DINAS KELAUTAN DAN PERIKNAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	211.916.000	203.694.218	96,12%
16	160094 DINAS PERIKNAN DAN KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	199.200.000	195.253.244	98,02%

No	SATKER	PAGU	REALISASI	%
17	175355 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROPINSI SULAWESI UTARA	286.086.000	286.061.000	99,99%
18	180091 DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROPINSI SULAWESI TENGAH	211.916.000	211.913.459	100,00%
19	190091 DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	292.444.000	290.897.900	99,47%
20	200093 DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	250.061.000	250.001.520	99,98%
21	210055 DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI MALUKU	250.061.000	246.125.820	98,43%
22	225127 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI	243.703.000	239.743.300	98,38%
23	235221 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. NUSA TENGGARA BARAT	254.298.000	254.194.410	99,96%
24	249001 DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROV. NUSA TENGGARA TIMUR	296.683.000	294.726.000	99,34%
25	250069 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA	296.683.000	296.683.000	100,00%
26	260059 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU	201.321.000	195.936.503	97,33%
27	280049 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	211.916.000	200.130.000	94,44%
28	290095 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN	190.724.000	190.510.000	99,89%
29	300078 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	211.916.000	211.745.700	99,92%
30	310046 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI GORONTALO	211.916.000	211.915.763	100,00%
31	320014 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	211.916.000	211.909.900	100,00%
32	330036 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT	307.354.000	307.354.000	100,00%
33	340048 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. SULAWESI BARAT	203.440.000	203.360.060	99,96%
34	417747 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROPINSI KALIMANTAN UTARA	224.630.000	220.016.974	97,95%
B,	KANTOR PUSAT	626.551.731.000	602.333.293.312	96,13%
35	622081 BIRO UMUM DAN PENGADAAN BARANG/JASA	569.376.735.000	564.875.044.573	99,21%
37	660056 LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN	57.174.996.000	37.458.248.739	65,52%
C.	KANTOR DAERAH	22.303.218.000	21.672.569.009	97,17%
36	632004 BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	22.303.218.000	21.672.569.009	97,17%
JUMLAH		656.780.605.000	631.793.931.033	96,20%

Sumber: Aplikasi OMSPAN, Kementerian Keuangan

Apabila dilihat per jenis belanja, realisasi anggaran tertinggi di Sekretariat Jenderal yaitu belanja modal

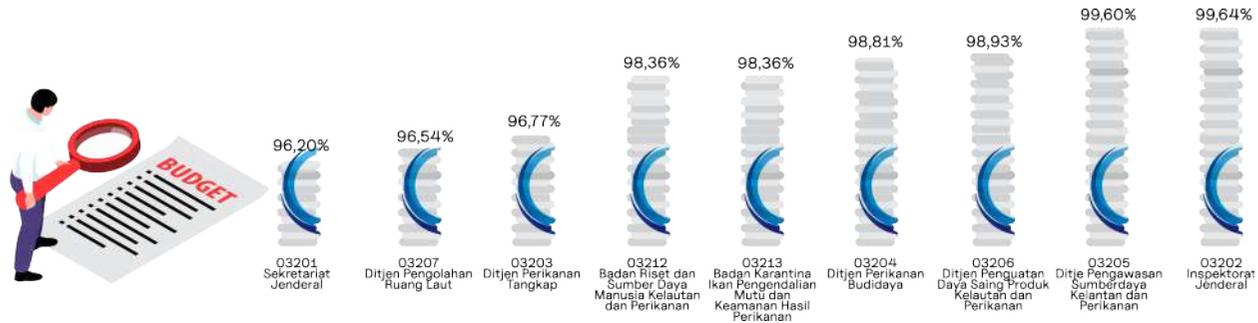
sebesar 99,60%, selanjutnya belanja pegawai sebesar 96,97% dan terendah yaitu belanja barang sebesar 94,78%. Rincian anggaran dan realisasi per jenis belanja

Tabel 38. Anggaran dan Realisasi Per Unit Kerja Eselon I berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2023

NO	ESELON 1	PEGAWAI			
		PAGU	REAL	%	
1	SEKRETARIAT JENDERAL	77.585.945.000	75.237.085.486	96,97%	
2	INSPEKTORAT JENDERAL	33.995.348.000	33.738.656.038	99,24%	
3	DITJEN PERIKNAN TANGKAP	190.303.701.000	188.285.717.036	98,94%	
4	DITJEN PERIKNAN BUDIDAYA	168.653.178.000	165.462.819.652	98,11%	
5	DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKNAN	170.336.026.000	169.510.309.113	99,52%	
6	DITJEN PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKNAN	56.500.000.000	54.810.973.275	97,01%	
7	DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT	100.241.987.000	98.632.702.317	98,39%	
8	BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKNAN	742.912.977.000	734.036.420.418	98,81%	
9	BADAN KARANTINA IKN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKNAN	260.471.817.000	257.663.221.939	98,92%	
	JUMLAH	1.801.000.979.000	1.777.377.905.274	98,69%	

Sumber: Aplikasi OMSPAN, Kementerian Keuangan

	BARANG			MODAL		
	PAGU	REAL	%	PAGU	REAL	%
	421.398.023.000	399.383.649.590	94,78%	157.796.637.000	157.173.195.957	99,60%
	39.513.389.000	39.498.216.463	99,96%	2.157.649.000	2.157.036.000	99,97%
	618.211.426.000	593.084.980.863	95,94%	62.299.899.000	61.309.163.546	98,41%
	807.237.488.000	797.757.879.989	98,83%	124.346.639.000	123.916.206.636	99,65%
	696.778.928.000	693.643.129.401	99,55%	256.578.577.000	256.063.304.961	99,80%
	280.969.412.000	279.088.484.003	99,33%	5.811.201.000	5.705.080.128	98,17%
	298.774.570.000	286.169.017.708	95,78%	14.596.439.000	14.496.104.926	99,31%
	583.146.966.000	570.985.639.092	97,91%	39.219.572.000	37.823.209.252	96,44%
	224.938.272.000	219.918.148.247	97,77%	20.504.079.000	20.045.573.281	97,76%
	3.970.968.474.000	3.879.529.145.356	97,70%	683.310.692.000	678.688.874.687	99,32%



Sumber: Aplikasi OMSPAN, Kementerian Keuangan

Gambar 15. Perbandingan % Penyerapan Realisasi Anggaran Per Unit Kerja Eselon I

dapat dilihat pada tabel berikut :

Apabila dibandingkan dengan realisasi penyerapan anggaran Unit Kerja Eselon I, penyerapan anggaran Sekretariat Jenderal sebesar 96,20% merupakan paling rendah diantara Unit Kerja Eselon I lainnya, namun masih berada diatas target rata-rata realisasi nasional yaitu sebesar 95%. Rendahnya penyerapan realisasi anggaran Sekretariat Jenderal disebabkan belum optimalnya penyerapan di LPMUKP yang hanya sebesar 65,52%. Beberapa kendala yang dihadapi di tahun 2023 dalam hal realisasi penyerapan anggaran diantaranya :

1. Masih terdapat alokasi anggaran yang terblokir DJA (kode 2) berkenaan dengan belum dilengkapi dasar hukum terkait dengan pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, terdapat peralihan tugas dan fungsi ke BRIN sehingga membutuhkan Organisasi dan Tata Kerja (OTK), belum dilengkapi persetujuan terkait dengan RKBMN, terblokir berkenaan dengan Alokasi Anggaran Tambahan (ABT), dan kurang kelengkapan dokumen (KAK, TOR, dan RAB) sehingga beberapa kegiatan belum dapat dilaksanakan. Selain itu sebagian blokir baru selesai dibuka dan satuan kerja akan segera melaksanakan kegiatan dan belanja

untuk mempercepat realisasi anggaran.

2. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang dekonsentrasi dan tugas pembantuan masih dalam tahap penyusunan sehubungan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2022 sedangkan Peraturan Menteri Keuangan masih mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2008. Hal tersebut berdampak pada kegiatan dekonsentrasi

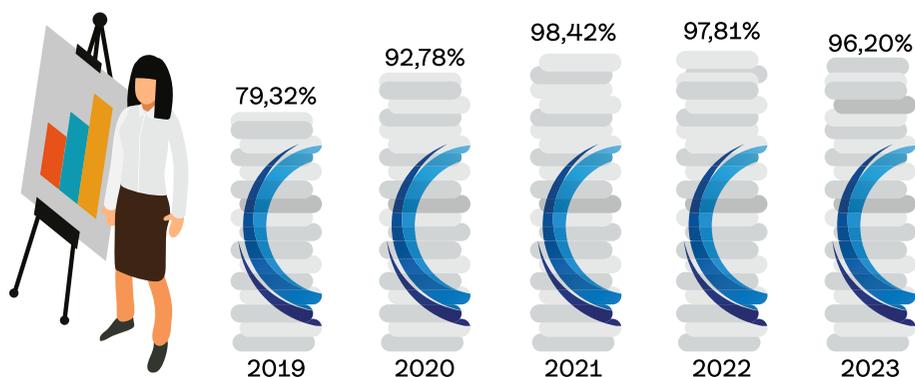


**RENDAHNYA PENYERAPAN
REALISASI ANGGARAN
SEKRETARIAT JENDERAL
DISEBABKAN BELUM
OPTIMALNYA PENYERAPAN DI
LPMUKP YANG HANYA SEBESAR
65,52%.**

Tabel 39. Anggaran dan Realisasi Sekretariat Jenderal Tahun 2019-2023

TAHUN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	% REALISASI
2019	528.228.939.000	419.012.813.148	79,32%
2020	400.700.274.000	371.774.244.798	92,78%
2021	390.019.429.000	383.839.736.923	98,42%
2022	534.535.057.000	522.851.228.283	97,81%
2023	656.780.605.000	631.793.931.033	96,20%

Sumber. Aplikasi OMSPAN, Kementerian Keuangan

**Gambar 16.** Tren % Penyerapan Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal 2019-2023

masih belum dapat dilaksanakan sejak awal tahun. Dalam rangka peningkatan penyerapan kedepan sebagai upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja anggaran, beberapa hal yang perlu dilakukan antara lain :

1. Penyusunan rencana kegiatan yang kemudian akan menjadi kalender kegiatan dan dilaksanakan secara disiplin dan tepat waktu.

Rencana Penarikan Dana merupakan cascading dari target penyerapan unit di atasnya. Target penyerapan anggaran ditetapkan dari tingkat

kementerian/lembaga yang kemudian diturunkan menjadi target setiap unit organisasi eselon I. Unit eselon I menurunkannya menjadi target penyerapan anggaran unit eselon II atau satuan kerjanya. Rencana Penarikan Dana Bulanan atau RPD Bulanan, RPD Bulanan di satuan kerja dituangkan dalam dokumen Halaman III DIPA, yang merupakan bagian dari dokumen pelaksanaan anggaran. Untuk mencapai target RPD Bulanan tersebut satker harus menyusun rencana kegiatan.

2. Melakukan identifikasi kegiatan yang dapat dilaksanakan di awal tahun sehingga penyerapan anggaran tidak menumpuk di akhir tahun.
3. Pemantauan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan anggaran secara berkala. Pengawasan dilakukan oleh unit di atasnya, untuk mengetahui sejauh mana satker dapat melaksanakan rencana kegiatan dan RPD.
4. Pengendalian intern yang memadai untuk mengawal proses pelaksanaan kegiatan dan mengantisipasi hal-hal yang menghambat kelancaran pelaksanaan kegiatan.
5. Koordinasi dan sinergi yang harmonis dengan seluruh *stakeholder* yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan. Koordinasi dan sinergi akan mudah terlaksana dengan adanya komunikasi yang baik.

EFISIENSI SUMBER DAYA

Pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi unit kerja dalam mencapai target yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan alokasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target. Data yang digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan sumber daya meliputi : data capaian nilai kinerja sasaran program, data alokasi anggaran dan realisasi anggaran yang mendukung pencapaian sasaran 2 sasaran program

yang telah ditetapkan.

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan pengeluaran sebenarnya dengan pengeluaran seharusnya. Pengeluaran seharusnya merupakan anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan perhitungan, nilai efisiensi anggaran Sekretariat Jenderal Tahun 2023 adalah sebesar 12,30%. Efisiensi tersebut merupakan hasil optimalisasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sekretariat Jenderal melalui koordinasi dan integrasi antar Unit Kerja Eselon II lingkup Sekretariat Jenderal dan komitmen bersama seluruh jajaran untuk terus berbenah diri dan mendukung pencapaian kinerja organisasi. Perhitungan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran dapat dilihat pada Tabel 46.

EVALUASI ATAS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

Memperhatikan analisis capaian kinerja sebagaimana diuraikan pada Bab.3 Akuntabilitas Kinerja terdapat 1 Indikator kinerja yang tidak mencapai target, yaitu Persentase Pencapaian Target PNBPN BLU LPMUKP dengan target 2023 sebesar 97% dengan realisasi sebesar 73,4%. Telah disampaikan pada bab sebelumnya rencana aksi dalam rangka upaya perbaikan dan penyempurnaan yang akan dilaksanakan kedepan. Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja Tahun 2023, Sekretariat

Tabel 40. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran Kelamin

No	SASARAN PROGRAM	NILAI PENCA-PAIAN SASARAN PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI	%NPSP X ANGGARAN PER SASARAN	% EFISIENSI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7=3x4	8=(7-5)
1.	SP 1. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Jenderal	108,87%	634.477.387.000	610.121.362.024	96,16%	690.755.531.227	80.634.169.203
2.	SP2. PNBPN Sektor KP Meningkat	97,84%	22.303.218.000	21.672.569.009	97,17%	21.821.468.491	148.899.482
Jumlah			656.780.605.000	631.793.931.033	96,20%	712.576.999.718	80.783.068.685
						% Efisiensi (8/4)	12,30%

Sumber: Aplikasi kinerjaku dan OMSPAN, Kementerian Keuangan (diolah)

Jenderal telah menetapkan target tahun 2024 sebagai salah satu bentuk pemanfaatan informasi pada Laporan Kinerja sebagai *feedback* bagi perencanaan kedepan dengan rincian sebagaimana dalam Tabel 47.

Untuk mencapai kinerja di Tahun 2024, Sekretariat Jenderal mengalokasikan anggaran sebesar Rp659.661.999.000, mencakup 6 kegiatan sebagai berikut:

- Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Kerja Sama Antarlembaga.
- Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Kerja Sama

di Bidang Kelautan dan Perikanan.

- Layanan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pengawasan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK), ANEV Peraturan Perundang-undangan, pelaksanaan Advokasi Hukum di Bidang Kelautan dan Perikanan.
- Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM.
- Pelayanan Pengelolaan BMN berupa Penggunaan di Lingkup Sekretariat Jenderal dan Lingkungan KKP.
- Pengelolaan data dan sistem informasi serta kegiatan

Tabel 41. Capaian Sekretariat Jenderal Tahun 2023 dan Penetapan Target 2024

No	IK	TARGET 2023	CAPAI-AN	TARGET 2024	PENJELASAN
1.	Indeks Reformasi Birokrasi KKP	78	85,40	80	Target disusun berdasarkan hasil evaluasi capaian tahun 2023 dan sesuai dengan roadmap RB KKP 2023-2024
2	Indeks Profesionalitas ASN KKP	81,22	84,75	85	Target disusun berdasarkan hasil evaluasi tahun 2023 dan Nota Dinas Kepala Biro SDMAO Nomor B.88/SJ.3/TU.140/I/2024 tanggal 11 Januari 2024 tentang Capaian Indikator Kinerja Utama IP ASN 2023 dan Target 2024
3	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) KKP	87,3	87,3	95	Target disusun berdasarkan hasil evaluasi tahun 2023
4	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) KKP	86	90,84	86	Target disusun berdasarkan hasil evaluasi tahun 2023, dan sesuai Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan Nomor 938/SJ.1/RC.610/XI/2023 tanggal 1 November 2023 tentang Hasil Pembahasan Indikator Kinerja Manajerial Tahun 2024, dimana untuk NKA akan diterbitkan PMK tentang Perhitungan NKA TA 2024
5	Nilai Hasil Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup KKP	75	82,93	76	Target disusun berdasarkan hasil evaluasi tahun 2023, dan sesuai Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan Nomor 938/SJ.1/RC.610/XI/2023 tanggal 1 November 2023 tentang Hasil Pembahasan Indikator Kinerja Manajerial Tahun 2024
6	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup KKP	92	112,59	94	Target disusun berdasarkan hasil evaluasi tahun 2023, dan sesuai Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan Nomor 938/SJ.1/RC.610/XI/2023 tanggal 1 November 2023 tentang Hasil Pembahasan Indikator Kinerja Manajerial Tahun 2024
7	Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Sekretariat Jenderal dibandingkan Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal TA. 2023	≤0,5	0,01	≤0,5	Target disusun berdasarkan hasil evaluasi tahun 2023, dan sesuai Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan Nomor 938/SJ.1/RC.610/XI/2023 tanggal 1 November 2023 tentang Hasil Pembahasan Indikator Kinerja Manajerial Tahun 2024
8	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Sekretariat Jenderal	75	99,12	95	Target disusun berdasarkan hasil Evaluasi Capaian dan hasil Validasi Indikator Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2024 bersama Inspektorat I
9	Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi lingkup Sekretariat Jenderal	2	2	5	Target disusun berdasarkan hasil evaluasi tahun 2023 dan sesuai Nota Dinas Kepala Biro Keuangan untuk tahun 2023 untuk Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan WBK Lingkup Sekretariat Jenderal dari hasil Penilaian Mandiri 3 unit Kerja yaitu : Biro Perencanaan 83,97, Biro Humas dan KLN 81,34 dan Biro SDMAO 83,97
10	Persentase Pencapaian Target PNPB BLU LPMUKP	97	73,4	97	Target disusun berdasarkan hasil evaluasi tahun 2023
11.	Persentase Realisasi Penyaluran Dana Bergulir BLU LPMUKP	80	90,77	90	Target disusun berdasarkan hasil evaluasi tahun 2023

Tabel 42. Komposisi Pegawai Sekretariat Jenderal Berdasarkan Unit Kerja dan Jenis 47

No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (RP)
1	Legislasi, Litigasi dan Kerjasama	22,003,481,000
2	Pengelolaan Organisasi dan SDM	15,390,932,000
3	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan BMN	50,887,007,000
4	Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik dan Umum	454,754,605,000
5	Pengelolaan Data dan Informasi	74,886,880,000
6	Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan	41,739,094,000
Total Anggaran Sekretariat Jenderal Tahun 2024		659.661.999.000

Sumber. Aplikasi OMSPAN, Kementerian Keuangan

PRESTASI DAN KINERJA LAINNYA

Tahun 2023, KKP dengan dukungan Sekretariat Jenderal telah menorehkan prestasi di tingkat nasional dalam rangka mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik. Prestasi tersebut terdiri atas :





Penghargaan Juristica Award 2023
kepada JDIH



Prestasi dalam bidang kearsipan AA
(Sangat Memuaskan)



UPP Terbaik Penyedia Sarana
Prasarana Pelayanan Publik Ramah
Kelompok Rentan





28,331.92

+0.30%

6,045.60

+0.14%

3,190.15

+0.98%

25,331.80



04

PENUTUP



Sekretariat Jenderal sebagai lokomotif dukungan manajemen beserta seluruh unsur Sekretariat pada Unit Eselon 1 KKP terus berupaya maksimal sebagai *support system* dalam mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan. Berbagai inovasi dan terobosan dilakukan demi lancarnya pencapaian target kinerja utama KKP.

Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2023 telah melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 103,36%. Capaian tersebut merupakan agregasi dari capaian kinerja seluruh unit kerja dibawah Sekretariat Jenderal yang memiliki komitmen untuk mewujudkan tata kelola yang baik dan tidak berpuas diri atas capaian yang telah dicapai dalam menyediakan layanan dukungan manajemen. Tahun 2023 juga ditandai pengakuan atas upaya-upaya perbaikan penyelenggaraan layanan baik internal maupun eksternal. Pertama, di awal tahun 2023 kinerja anggaran KKP meraih penghargaan kinerja anggaran terbaik ke-2 Tahun

2022 untuk kategori KL dengan pagu sedang, kemudian KKP juga terus mempertahankan opini WTP dari BPK RI, disusul penghargaan dari Komisi ASN Implementasi Manajemen ASN yang Baik Dari Komisi Aparatur Sipil Negara. Selanjutnya, KKP juga meraih penghargaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH), Peningkatan Nilai SAKIP menjadi 83,65 dari 82,84, penghargaan sarpras ramah kelompok rentan dari Kementerian PAN RB, Peringkat Kedua Kategori Implementasi Penerapan Manajemen, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KKP meraih Penghargaan *Juristica Award Tahun 2023* dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Terbaik dan peringkat Terbaik V Tingkat Kementerian pada Pertemuan Nasional Dokumentasi dan Informasi Hukum *Legal Development Content Creator (LDCC) Tahun 2023*, Juara Pertama Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Award Tahun 2023, Parahita Ekapraya untuk penerapan pengarusutamaan gender dengan kategori Mentor terbaik 2023,



Dialog Kinerja Sekretariat Jenderal di Ballroom KKP

Juara Kedua Anugrah “Reksa Bandha” Tahun 2023 kategori Peningkatan Tata Kelola BMN Berkelanjutan, Predikat Kantor Ramah Wanita dan Anak dari Kementerian Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan Anak, Akreditasi A (sangat baik) penyelenggaraan Kearsipan, dan Hasil Pengawasan Kearsipan dengan nilai 92,47 (sangat memuaskan) dari Arsip Nasional Republik Indonesia, Predikat Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Pusat, Peringkat Kedua Kategori Implementasi Penerapan Manajemen Kinerja dan peringkat Ketiga Kategori Pengembangan (BKN Award 2023), Predikat Kualitas Tertinggi atau Zona Hijau (Penilaian Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik dari Ombudsman),

Bhumandala Kanaka (Medali Emas) untuk kategori Kementerian/Lembaga, dan Bhumandala Kencana untuk kategori Geoportal terbaik. Penghargaan Bhumandala Kanaka dan Bhumandala Kencana diberikan kepada KKP atas pencapaiannya dalam pengembangan simpul jaringan informasi geospasial Tahun 2023.

Seluruh apresiasi di atas, merupakan berkah dan penghargaan publik atas tekad Sekretariat Jenderal untuk mewujudkan peningkatan kualitas layanan dan merealisasikan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 SEKRETARIAT JENDERAL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Effin Martiana**

Jabatan : Pih. Sekretaris Jenderal

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu.

Nama : **Sakti Wahyu Trenggono**

Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 06 Januari 2023

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan

Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Kesatu
Pih. Sekretaris Jenderal

Effin Martiana

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIAT JENDERAL**

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET
Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya				
1	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Sekretariat Jenderal	1	Nilai PMPRB Setjen (nilai)	33,5
		2	Nilai SAKIP KKP (nilai)	82
		3	Nilai PM SAKIP SETJEN (nilai)	80,5
		4	Nilai SPBE KKP (nilai)	3
		5	Opini BPK atas LK KKP (opini)	WTP (5)
		6	Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK SETJEN dibandingkan Realisasi Anggaran SETJEN TA. 2022 (persen)	≤ 0,5
		7	Level Maturitas SPIP KKP (level)	3
		8	Nilai Pengawasan Kearsipan (nilai)	90
		9	Indeks Sistem Merit KKP (indeks)	0,85
		10	Indeks Profesionalitas ASN Setjen (indeks)	80
		11	Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (unit)	3
		12	Rasio Jumlah Pemberitaan Negatif terhadap total pemberitaan tentang sektor kelautan dan perikanan (persen)	< 5
		13	Nilai Hasil Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik (nilai)	75
		14	Persentase Unit Kerja Setjen yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (persen)	92
		15	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Setjen (persen)	75
		16	Indeks Perencanaan KKP (indeks)	83
		17	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Setjen (nilai)	89
		18	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Setjen (nilai)	86
		19	Indeks Reformasi Hukum KKP (indeks)	79
2	PNBP BLU Sektor KP Meningkat	20	Persentase Pencapaian Target PNBP Layanan LPMUKP (persen)	97
		21	Persentase penyaluran dana bergulir BLU LPUMKP (persen)	80



Data Anggaran :

SASARAN PROGRAM		Anggaran (Rp.)
PROGRAM : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya		
1	Legislasi, Litigasi dan Kerjasama	20.405.885.000
2	Pengelolaan Organisasi dan SDM	14.783.782.000
3	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan BMN	48.478.381.000
4	Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik dan Umum	402.675.388.000
5	Pengelolaan Data dan Informasi	134.636.969.000
6	Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan	57.174.996.000
Total Anggaran Sekretariat Jenderal tahun 2023		678.157.401.000

Jakarta, 06 Januari 2023

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan

Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Kesatu
Plh. Sekretaris Jenderal

Effin Martiana



**KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 SEKRETARIAT JENDERAL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Riza Trianzah**

Jabatan : Plh. Sekretaris Jenderal

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu.

Nama : **Sakti Wahyu Trenggono**

Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 Juni 2023

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan



Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Kesatu
Plh. Sekretaris Jenderal



Riza Trianzah



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIAT JENDERAL**

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya		
1 Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Sekretariat Jenderal	1 Nilai PMPRB Setjen (nilai)	33,5
	2 Nilai SAKIP KKP (nilai)	82
	3 Nilai PM SAKIP SETJEN (nilai)	80,5
	4 Nilai SPBE KKP (nilai)	3
	5 Opini BPK atas LK KKP (opini)	WTP (5)
	6 Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK SETJEN dibandingkan Realisasi Anggaran SETJEN TA. 2022 (persen)	≤ 0,5
	7 Level Maturitas SPIP KKP (level)	3
	8 Nilai Pengawasan Kearsipan (nilai)	90
	9 Indeks Sistem Merit KKP (indeks)	0,85
	10 Indeks Profesionalitas ASN Setjen (indeks)	80
	11 Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (unit)	3
	12 Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) KKP (Indeks)	88,8
	13 Nilai Hasil Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik (nilai)	75
	14 Persentase Unit Kerja Setjen yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (persen)	92
	15 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Setjen (persen)	75
	16 Indeks Perencanaan KKP (indeks)	83
	17 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Setjen (nilai)	89
	18 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Setjen (nilai)	86
	19 Indeks Reformasi Hukum KKP (indeks)	79
2 PNBP BLU Sektor KP Meningkat	20 Persentase Pencapaian Target PNBP Layanan LPMUKP (persen)	97
	21 Persentase penyaluran dana bergulir BLU LPUMKP (persen)	80

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIAT JENDERAL**

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya		
1 Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Sekretariat Jenderal	1 Nilai PMPRB Setjen (nilai)	33,5
	2 Nilai SAKIP KKP (nilai)	82
	3 Nilai PM SAKIP SETJEN (nilai)	80,5
	4 Nilai SPBE KKP (nilai)	3
	5 Opini BPK atas LK KKP (opini)	WTP (5)
	6 Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK SETJEN dibandingkan Realisasi Anggaran SETJEN TA. 2022 (persen)	≤ 0,5
	7 Level Maturitas SPIP KKP (level)	3
	8 Nilai Pengawasan Kearsipan (nilai)	90
	9 Indeks Sistem Merit KKP (indeks)	0,85
	10 Indeks Profesionalitas ASN Setjen (indeks)	80
	11 Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (unit)	3
	12 Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) KKP (Indeks)	88,8
	13 Nilai Hasil Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik (nilai)	75
	14 Persentase Unit Kerja Setjen yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (persen)	92
	15 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Setjen (persen)	75
	16 Indeks Perencanaan KKP (indeks)	83
	17 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Setjen (nilai)	89
	18 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Setjen (nilai)	86
	19 Indeks Reformasi Hukum KKP (indeks)	79
2 PNBP BLU Sektor KP Meningkat	20 Persentase Pencapaian Target PNBP Layanan LPMUKP (persen)	97
	21 Persentase penyaluran dana bergulir BLU LPUMKP (persen)	80



Data Anggaran :

SASARAN PROGRAM		Anggaran (Rp.)
PROGRAM : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya		
1	Legislasi, Litigasi dan Kerjasama	20.405.885.000
2	Pengelolaan Organisasi dan SDM	14.783.782.000
3	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan BMN	48.478.381.000
4	Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik dan Umum	402.675.388.000
5	Pengelolaan Data dan Informasi	134.638.969.000
6	Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan	57.174.996.000
Total Anggaran Sekretariat Jenderal tahun 2023		678.157.401.000

Jakarta, 15 Juni 2023

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan

Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Kesatu
Plh. Sekretaris Jenderal

Riza Trianzah



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 SEKRETARIAT JENDERAL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Antam Novambar**

Jabatan : Plt. Sekretaris Jenderal

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu.

Nama : **Sakti Wahyu Trenggono**

Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 3⁰ November 2023

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan

Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Kesatu
Plt. Sekretaris Jenderal

Antam Novambar

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIAT JENDERAL**

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET
1	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Sekretariat Jenderal	1	Indeks Reformasi Birokrasi KKP (nilai)	78
		2	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup KKP (indeks)	81,22
		3	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik KKP (indeks)	87,3
		4	Nilai Kinerja Anggaran KKP (nilai)	86
		5	Nilai Hasil Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan KKP (nilai)	75
		6	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar lingkup KKP (persen)	92
		7	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Sekretariat Jenderal (persen)	≤0,5
		8	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Sekretariat Jenderal (persen)	75
		9	Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup Sekretariat Jenderal (unit)	2
2	PNBP BLU Sektor KP Meningkat	10	Persentase Pencapaian Target PNBP Layanan LPMUKP (persen)	97
		11	Persentase Penyaluran Dana Bergulir BLU LPMUKP (persen)	80

Data Anggaran :

SASARAN PROGRAM		Anggaran (Rp.)
PROGRAM : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya		
1	Legislasi, Litigasi dan Kerjasama	14.244.415.000
2	Pengelolaan Organisasi dan SDM	10.877.316.000
3	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan BMN	29.473.117.000
4	Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik dan Umum	358.106.197.000
5	Pengelolaan Data dan Informasi	102.519.382.000
6	Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan	57.174.996.000
Total Anggaran Sekretariat Jenderal tahun 2023		572.395.423.000

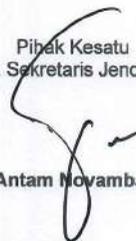
Jakarta, 30 November 2023

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan



Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Kesatu
Plt. Sekretaris Jenderal



Antam Novambar



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 SEKRETARIAT JENDERAL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Rudy Heriyanto Adi Nugroho**

Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu.

Nama : **Sakti Wahyu Trenggono**

Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 13 Desember 2023

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan

Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Kesatu
Sekretaris Jenderal

Rudy Heriyanto Adi Nugroho

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIAT JENDERAL**

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET
1	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Sekretariat Jenderal	1	Indeks Reformasi Birokrasi KKP (nilai)	78
		2	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup KKP (indeks)	81,22
		3	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik KKP (indeks)	87,3
		4	Nilai Kinerja Anggaran KKP (nilai)	86
		5	Nilai Hasil Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan KKP (nilai)	75
		6	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar lingkup KKP (persen)	92
		7	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Sekretariat Jenderal (persen)	≤0,5
		8	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Sekretariat Jenderal (persen)	75
		9	Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup Sekretariat Jenderal (unit)	2
2	PNBP BLU Sektor KP Meningkat	10	Persentase Pencapaian Target PNBP Layanan LPMUKP (persen)	97
		11	Persentase Penyaluran Dana Bergulir BLU LPMUKP (persen)	80



Data Anggaran :

SASARAN PROGRAM		Anggaran (Rp.)
PROGRAM : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya		
1	Legislasi, Litigasi dan Kerjasama	14.244.415.000
2	Pengelolaan Organisasi dan SDM	10.877.316.000
3	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan BMN	29.473.117.000
4	Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik dan Umum	358.106.197.000
5	Pengelolaan Data dan Informasi	102.519.382.000
6	Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan	57.174.996.000
Total Anggaran Sekretariat Jenderal tahun 2023		572.395.423.000

Jakarta, 13 Desember 2023

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan

Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Kesatu
Sekretaris Jenderal

Rudy Heriyanto Adi Nugroho

TIM PENYUSUN

Pengarah

Sekretaris Jenderal KKP

Penanggungjawab

1. Kepala Biro Perencanaan
2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
3. Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa
4. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri
5. Kepala Biro Keuangan
6. Kepala Biro Hukum
7. Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi
8. Kepala Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
9. Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan

Pelaksana

1. Katimja Pengelolaan Kinerja, Biro Perencanaan
2. Katimja Pengelolaan Program dan Anggaran, Biro Perencanaan
3. Katimja Pengelolaan Program Strategis dan Lintas Sektor, Biro Perencanaan
4. Katimja Pengelolaan Perencanaan dan Pendanaan Luar Negeri, Biro Perencanaan
5. Katimja Pengelolaan Kerja Sama Antarlembaga, Biro Perencanaan
6. Katimja Dukungan Manajemen, Biro Perencanaan
7. Meirina Anggraeni, S.Pi., M.Si, Biro Perencanaan
8. Helena Yusufik, S.TP, M.E, Biro Perencanaan
9. Ika Yusnita, S.Pi, M.Si, Biro Perencanaan
10. Dr. Munawar, S.Pi., M.Ec.Dev, Biro Perencanaan
11. Sigit Rachmad Admojiarso, S.T, Biro Perencanaan
12. Ikhsan Zuhry, A.Md, Biro Perencanaan,
13. Yusmansyah, S.Pi., MP, M.Sc, Biro Perencanaan
14. Elimawati Birro, S.St.Pi, Biro Perencanaan
15. Juniyanti Romauli Hutahean, Biro Perencanaan
16. Ratna Ayu Rahardini, S.Pi, Biro Perencanaan
17. Cut Pinta Keumala, S.Pi, Biro Perencanaan
18. Satriani Situmorang, S.E, Biro Keuangan
19. Feri Yuniarto, S.T, Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi
20. Deny Sukmana, S.H, Biro Hukum
21. Trissa Restiasputi Elsafira, Biro Hukum
22. Lisa Duma, S.A.P.M.A.B, Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri
23. Anton Ojak Panjaitan, S.Pi, Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri
24. Sri Rahayu, S.H, Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri
25. Ety Dwi Wijayanti S.Pi, Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa
26. Denanda Febry Kurniavandi, S.Pi, Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa
27. Mohamad Armansyah, S.T., MAP, Pusat Data, Statistik dan Informasi
28. Mega Afrianti, S.T., MAP, Pusat Data, Statistik dan Informasi
29. Iko Prasetyo, BLU LPUMKP
30. Deby, BLU LPMUKP



Laporan Kinerja 2023
Sekretariat Jenderal KKP

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak
sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis

160 hlm.; 23 cm x 23 cm

ISBN:

